



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2010

**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2011**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, atas Taufiq dan Hidayah-Nya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Provinsi DKI Jakarta Akhir Tahun Anggaran 2010 ini dapat disusun dan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tersebut dijelaskan bahwa LKPJ merupakan laporan pencapaian (*progress report*) penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran, disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir untuk dibahas oleh DPRD paling lambat 30 hari setelah disampaikan oleh Gubernur. Hasil pembahasan DPRD berupa rekomendasi kepada Pemerintah Daerah untuk perbaikan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada tahun berikutnya.

LKPJ Tahun 2010 ini memiliki makna strategis, karena merupakan LKPJ Tahun ke-3 bagi penyelenggaraan pembangunan yang didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2007-2012. Untuk itu dalam buku LKPJ ini disajikan data capaian pada tahun 2010 yang mengindikasikan adanya kemajuan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi DKI Jakarta.

Segala bentuk kemajuan dan keberhasilan yang dapat diraih pada tahun 2010 merupakan upaya bersama dari seluruh pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan pembangunan Provinsi DKI Jakarta, yang terdiri dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, DPRD Provinsi DKI Jakarta dan masyarakat

secara luas. Namun disadari bahwa, disamping keberhasilan yang telah dicapai, masih terdapat hal-hal yang memerlukan upaya peningkatan di masa mendatang. Untuk itu, catatan-catatan dan rekomendasi dari DPRD Provinsi DKI Jakarta terhadap LKPJ ini merupakan masukan penting bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Provinsi DKI Jakarta pada masa yang akan datang.

Akhirnya, saya ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan LKPJ Tahun 2010. Semoga Allah SWT, Tuhan YME senantiasa meridhoi kita semua.

Terima Kasih

Jakarta, Maret 2011
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

FAUZI BOWO

DAFTAR ISI

Kata pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Gambar	viii
Daftar Tabel	ix
BAB I PENDAHULUAN	I-1
A. DASAR HUKUM	I-1
B. DASAR HUKUM PEMBENTUKAN PROVINSI DKI JAKARTA	I-3
1. Sejarah Kota Jakarta	I-3
2. Dasar Hukum Pemprov DKI Jakarta	I-6
C. GAMBARAN UMUM PROVINSI DKI JAKARTA	I-7
1. Kondisi Geografis	I-7
a. Batas Administrasi Daerah dan Luas Wilayah	I-7
b. Iklim	I-9
c. Geologi	I-9
2. Kondisi Demografis	I-11
3. Kondisi Ekonomi	I-14
a. Potensi Unggulan Daerah	I-14
b. Pertumbuhan Ekonomi	I-19
c. Inflasi	I-22
BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH	II-1
A. VISI DAN MISI	II-1
1. Visi	II-1
2. Misi	II-1
B. STRATEGI PEMBANGUNAN PROVINSI DKI JAKARTA	II-4
1. Tujuan Pembangunan Daerah	II-4
2. Strategi Pembangunan Daerah	II-4
3. Pendekatan	II-7
C. PRIORITAS DAERAH	II-8
1. Program Dedicated	II-8
2. Prioritas Pembangunan Menurut Urusan	II-8
3. Prioritas Pembangunan Wilayah	II-10

BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	III-1
A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	III-3
1. Kebijakan Pendapatan Daerah	III-3
2. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah	III-4
a. Pendapatan Asli Daerah	III-5
b. Dana Perimbangan	III-10
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	III-11
3. Permasalahan dan Solusi	III-13
a. Permasalahan yang Dihadapi	III-13
b. Solusi	III-13
B. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH	III-14
1. Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah	III-14
a. Kebijakan Umum Belanja Daerah	III-14
b. Kebijakan Belanja Pegawai	III-15
2. Target dan Realisasi Belanja	III-15
3. Permasalahan dan Solusi	III-18
a. Permasalahan	III-18
b. Solusi	III-19
C. PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAERAH	III-19
1. Kebijakan Pembiayaan	III-19
2. Target dan Realisasi Pembiayaan	III-20
a. Penerimaan Daerah	III-20
b. Sumber Pengeluaran Daerah	III-20
c. Permasalahan dan Solusi	III-21
D. DANA CADANGAN DAERAH	III-21
E. IKHTISAR APBD PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2010	III-22
F. PERHITUNGAN SILPA TAHUN 2010	III-22
 BAB IV PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	 IV-1
A. PROGRAM DEDICATED	IV-1
1. Pengendalian Banjir	IV-1
2. Pembangunan Perhubungan dan Transportasi	IV-3
3. Penanggulangan Polusi dan Perubahan Iklim	IV-6
4. Peningkatan Kualitas Kebutuhan Dasar Masyarakat	IV-6
5. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	IV-8

6. Pengembangan Budaya Keragaman	IV-8
7. Penerapan Kaidah Good Governance	IV-9
8. Antisipasi Perubahan Iklim	IV-10
B. PROGRAM PRIORITAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN	
WAJIB	IV-10
1. Urusan Pendidikan	IV-10
2. Urusan Kesehatan	IV-15
3. Urusan Pekerjaan Umum	IV-20
4. Urusan Perumahan Rakyat	IV-28
5. Urusan Penataan Ruang	IV-28
6. Urusan Perencanaan Pembangunan	IV-30
7. Urusan Perhubungan	IV-33
8. Urusan Lingkungan Hidup	IV-35
9. Urusan Pertanahan	IV-40
10. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil	IV-41
11. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	IV-43
12. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	IV-46
13. Urusan Sosial	IV-50
14. Urusan Ketenagakerjaan	IV-54
15. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	IV-58
16. Urusan Penanaman Modal	IV-59
17. Urusan Kebudayaan	IV-61
18. Urusan Olahraga dan Pemuda	IV-65
19. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	IV-67
20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	IV-71
21. Urusan Ketahanan Pangan	IV-78
22. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	IV-79
23. Urusan Statistik	IV-81
24. Urusan Kearsipan	IV-82
25. Urusan Komunikasi dan Informatika	IV-84
26. Urusan Perpustakaan	IV-86
27. Urusan Pariwisata	IV-88
28. Urusan Perikanan, Kelautan dan Peternakan	IV-90

29. Urusan Perdagangan	IV-95
C. PROGRAM PRIORITAS WILAYAH	IV-97
1. Kota Administrasi Jakarta Pusat	IV-97
2. Kota Administrasi Jakarta Utara	IV-99
3. Kota Administrasi Jakarta Barat	IV-100
4. Kota Administrasi Jakarta Selatan	IV-103
5. Kota Administrasi Jakarta Timur	IV-105
6. Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	IV-109
D. PENCAPAIAN MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS (MDG's)	IV-112
E. DAMPAK PEMBANGUNAN DAERAH	IV-114
1. Indeks Pembangunan Manusia	IV-114
2. Indikator Ekonomi Makro	IV-116
a. Ekonomi	IV-116
b. Investasi	IV-120
3. Indikator Makro Sosial	IV-122
a. Jumlah Penduduk	IV-122
b. Jumlah Keluarga Miskin	IV-122
c. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	IV-123
d. Angka Melek Huruf	IV-124
e. Angka Partisipasi Sekolah	IV-124
f. Tingkat Pendidikan	IV-125

BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN DEKONSENTRASI

	V-1
A. DASAR HUKUM	V-1
1. Dasar Hukum Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi	V-1
B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA	V-1
1. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan dan Instansi Pelaksana	V-2
2. Program dan Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya	V-2
a. Kementerian Kelautan dan Perikanan	V-2
b. Kementerian Pertanian	V-3
c. Kementerian Sosial	V-3
d. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	V-4
C. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN	V-4
D. DEKONSENTRASI	V-5

E. PERMASALAHAN DAN SOLUSI	V-13
BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN	VI-1
A. KERJASAMA ANTAR DAERAH / KOTA	VI-1
1. Kerjasama DKI Jakarta dengan Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Cianjur (Bodetabekjur)	VI-1
2. Kerjasama DKI Jakarta dengan Provinsi se-Jawa Bali	VI-1
3. Kerjasama Multilateral Mitra Praja Utama (MPU)	VI-7
4. Kerja Sama Multilateral Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia(APPSI)	VI-7
5. Kerjasama Luar Negeri	VI-8
B. KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA TAHUN 2010	VI-13
C. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL	VI-14
D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA	VI-15
1. Kebakaran	VI-15
2. Banjir	VI-16
BAB VII PENUTUP	VII-1
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar	1.1	Peta Pembagian Wilayah DKI Jakarta	I-7
Gambar	1.2	Sungai, Kanal, dan Flood Way yang Mengaliri DKI Jakarta	I-8
Gambar	1.3	Peta Geologi Teknik Kawasan Jabodetabekpunjur	1-10
Gambar	1.4	Jumlah Penduduk DKI Jakarta Hasil Sementara SP 2010 Menurut Kabupaten/Kota	I-12
Gambar	1.5	Ekspor Produk DKI Jakarta Menurut 5 Besar Negara Tujuan	1-15
Gambar	1.6	Impor DKI Jakarta Menurut 5 Besar Negara Asal 2010	1-17
Gambar	1.7	Laju Pertumbuhan 2006-2010	I-19
Gambar	1.8	Inflasi DKI Jakarta dan Nasional Tahun 2006-2010	I-23
Gambar	3.1	Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah	III-10
Gambar	4.1	Indeks Pembangunan Manusia DKI Jakarta	IV-115
Gambar	4.2	Distribusi Prosentase PDRB DKI Jakarta Menurut Sektoral	IV-116
Gambar	4.3	Nilai Investasi Di Provinsi DKI Jakarta	IV-121
Gambar	4.4	Kemampuan Investasi Pemprov DKI Jakarta	IV-121
Gambar	4.5	Peranan Investasi Pemprov DKI Jakarta terhadap Investasi Total	IV-122

DAFTAR TABEL

Tabel	1.1	Pembagian Wilayah Administrasi Provinsi DKI Jakarta	I-9
Tabel	1.2	Jumlah Penduduk Provinsi DKI Jakarta	I-11
Tabel	1.3	Prosentase Penduduk yang Bekerja (15 Tahun Ke Atas) Menurut Lapangan Pekerjaan Tahun 2010	I-13
Tabel	1.4	Tingkat Pendidikan Penduduk Kota Jakarta Tahun 2010 (10 Tahun Ke Atas)	I-14
Tabel	1.5	Nilai Ekspor Produk DKI Jakarta Menurut 5 Komoditi Utama, Januari – Desember 2010	I-16
Tabel	1.6	Nilai Impor Melalui DKI Jakarta Menurut 5 Komoditi Utama Tahun 2010	I-18
Tabel	1.7	Laju Pertumbuhan PDRB Tahun 2007-2010 Menurut Lapangan Usaha	I-21
Tabel	1.8	Laju Pertumbuhan PDRB DKI Jakarta Menurut Komponen Pengeluaran Tahun 2008-2010	I-22
Tabel	1.9	Inflasi DKI Jakarta Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2007 – 2010	I-23
Tabel	3.1	Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2010	III-4
Tabel	3.2	Realisasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2010	III-6
Tabel	3.3	Realisasi Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2010	III-7
Tabel	3.4	Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2010	III-8
Tabel	3.5	Realisasi Pengelolaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2010	III-8
Tabel	3.6	Realisasi Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2010	III-10
Tabel	3.7	Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2010	III-11
Tabel	3.8	Rekapitulasi Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2010	III-12
Tabel	3.9	Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010	III-16
Tabel	3.10	Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2010	III-18
Tabel	3.11	Ringkasan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2010	III-21
Tabel	3.12	Perhitungan SiLPA Tahun Anggaran 2010	III-22
Tabel	4.1	Pencapaian MDG's DKI Jakarta	IV-112
Tabel	4.2	Karakteristik Pembentuk IPM	IV-115
Tabel	5.1	Instansi Pemberi dan Pelaksana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2010	V-2
Tabel	5.2	Nilai Dana Dekonsentrasi yang Diterima DKI Jakarta Tahun Anggaran 2010	V-6
Tabel	6.1	Program Sister City DKI Jakarta dengan Kota Lain	VI-9

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat, disebutkan bahwa LKPJ disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur yang akan disampaikan kepada DPRD Provinsi DKI Jakarta untuk dibahas secara internal oleh DPRD. Diharapkan hasil pembahasan dimaksud dapat ditetapkan menjadi keputusan DPRD Provinsi DKI Jakarta dan disampaikan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta sebagai rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan.

Penyusunan LKPJ tahun 2010 didasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2007-2012
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008, tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
16. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah
17. Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2009 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2010.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, LKPJ Gubernur Tahun 2010 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	Pendahuluan
BAB II	Kebijakan Pemerintahan Daerah
BAB III	Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
BAB IV	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
BAB V	Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi
BAB VI	Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan
BAB VII	Penutup

B. DASAR HUKUM PEMBENTUKAN PROVINSI DKI JAKARTA

1. SEJARAH KOTA JAKARTA

Pada tahun 1527, berkembang sebuah kawasan perdagangan antar pulau yang terletak di muara sungai Ciliwung dengan inti sebuah pelabuhan laut yang dikenal sebagai Bandar Sunda Kelapa. Faletehan sebagai penguasa wilayah Bandar Sunda Kelapa mengganti nama Sunda Kelapa menjadi *Fathan Mubina* atau Jayakarta yang artinya kemenangan akhir.

Kota pelabuhan Jayakarta menarik banyak pendatang asing dari Eropa, Cina dan Arab terutama pedagang dari negeri Belanda (VOC), yang menetap di Jayakarta. Pada tahun 1611 VOC mendapat izin untuk membangun kompleks perkantoran, gudang, dan tempat tinggal orang Belanda yang berlokasi di dekat muara tepi bagian timur Sungai Ciliwung. Kemudian di lokasi ini dibangun benteng sebagai pusat perdagangan VOC, yang selanjutnya mengubah nama Jayakarta menjadi Batavia.

Tanggal 4 Maret 1621 Pemerintah Belanda membentuk *Stad Batavia* dan VOC diberi kewenangan oleh Pemerintah Belanda untuk melaksanakan pemerintahan *Stad Batavia* tersebut. Pada tahun 1799 karena alasan merugi maka VOC dibubarkan sehingga pemerintahan daerah-daerah yang selama itu dikuasai VOC diambil alih kembali oleh

Pemerintah Belanda. Sejak saat itu Pemerintah Belanda menjadikan daerah-daerah bekas VOC sebagai daerah otonomi yang dinamakan Hindia Belanda di bawah pimpinan seorang Gubernur Jenderal.

Pada tanggal 1 April 1905 *Stad Batavia* diubah menjadi *Gemeente Batavia*, yang diberi kewenangan untuk mengatur keuangannya sendiri sebagai bagian dari Pemerintah Hindia Belanda. *Gemeente Batavia* merupakan Pemerintah Daerah yang pertama kali dibentuk di Hindia Belanda. Luas wilayah *Gemeente Batavia* kurang lebih 125 km², tidak termasuk pulau-pulau di Teluk Jakarta (Kepulauan Seribu).

Wilayah Karesidenan (*Stad*) Batavia dibagi menjadi 5 (lima) wilayah yang lebih kecil, yang disebut "*afdeling*" (kabupaten/kota), yaitu (1) Afdeling Batavia (kota dan pinggiran kota Batavia), (2) Afdeling Meester Cornelis (sekarang Jatinegara), (3) Afdeling Tangerang (4) Afdeling Buitenzorg (Bogor) dan (5) Afdeling Karawang.

Tahun 1908 wilayah Afdeling Batavia dibagi menjadi 2 Distrik, yakni Distrik Batavia dan Weltevreden yang dibagi lagi menjadi 6 sub Distrik (Onderdistrik). Distrik Batavia terdiri dari sub Distrik Mangga Besar, Penjaringan dan Tanjung Priuk sedangkan Distrik Weltevreden terdiri dari sub Distrik Gambir, Senen, dan Tanah Abang.

Pada tahun 1922 keluar Undang-Undang (UU) tentang Pembaharuan Pemerintahan, diikuti terbitnya UU Propinsi, UU Kabupaten (*Regentschap*, 1924) dan UU Kota (*Stadsgemeente*, 1926). Selanjutnya "Gemeente Batavia" ditetapkan menjadi Pemerintahan Kota (*Stadsgemeente Batavia*).

UU Pemerintahan Kota (*Stadsgemeente*) tahun 1926 menetapkan sistem pemerintahan Kota (*Stadsgemeente*) yang terdiri dari: (1) DPRD (Raad); (2) DPD (*College van Burgemeester en Wethouders*) dan (3) Walikota (*Burgemeester*).

Pada tanggal 5 Maret 1942 kota Batavia jatuh ke tangan balatentara Jepang dan tanggal 9 Maret 1942 Pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Pemerintah Jepang mengeluarkan UU Nomor 42 Tahun 1942 tentang Perubahan Tata Pemerintahan Daerah

yang mengatur bahwa Pulau Jawa dibagi menjadi satuan-satuan daerah yang disebut Pemerintahan Keresidenan (*Syuu*). Keresidenan (*Syuu*) dibagi lagi menjadi beberapa Kabupaten (*Ken*) dan Kota (*Shi*).

Kalau *Stadsgemeente* hanya merupakan badan yang mengurus rumah tangganya saja tanpa melaksanakan urusan kepamongprajaan maka menurut UU Tata Pemerintahan Daerah masa Pemerintahan Jepang, "*Shi*" (*Stadsgemeente*) mengerjakan semua urusan pemerintahan, termasuk kepamongprajaan dalam lingkup wilayahnya. Urusan pemerintahan (pamongpraja) di dalam '*Stadsgemeente*' yang sebelumnya diurus oleh *Regent* (Bupati), *Wedana*, *Asisten-Wedana*, Kepala Kampung atau *Wijkmeester*, sekarang diurus dan merupakan kewenangan "*Shichoo*" (Walikota). Mereka itu mejadi pegawai *Shi* dan menjalankan urusan pemerintahan *Shi* di bawah pemerintahan dan pimpinan "*Shichoo*".

Selanjutnya menurut Undang-Undang tersebut, "*Gunseikan*" (Kepala Pemerintahan Militer Jepang) dapat membentuk pemerintahan kota khusus (*Tokubetsu Shi*). Beda pemerintahan kota khusus (*Tokubetsu Shi*) dengan pemerintahan kota (*Shi*) adalah bahwa pemerintahan kota khusus (*Tokubetsu Shi*) tidak di bawah Keresidenan (*Syuu*), melainkan langsung di bawah Pemerintahan Militer Jepang (*Gunseikan*). Jakarta merupakan pemerintahan kota khusus (*Jakarta Tokubetsu Shi*) yang dipimpin oleh walikota khusus (*Tokubetsu Shi*), yang berarti kedudukan Jakarta meningkat dari kota (*Shi*) menjadi kota khusus (*Tokubetsu Shi*). Walikota khusus Jakarta (*Tokubetsu Shichoo*) dibantu oleh beberapa pegawai tinggi (*Zyoyaku*). Walikota dan pegawai tinggi diangkat oleh Pemerintahan Militer Jepang (*Gunseikan*).

Selama pemerintahan militer Jepang, Jakarta adalah satu-satunya pemerintahan kota khusus (*Tokubetsu Shi*) di Indonesia. Walikota pertama kota khusus Jakarta adalah Tsukamoto dan yang terakhir adalah Hasegawa. Setelah kemerdekaan, dengan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1950 kedudukan kota Djakarta ditetapkan sebagai daerah Swatantra yang disebut "Kotapradja Djakarta Raya" dengan Walikotanya

adalah Soewiryo (1945-1951), Syamsuridjal (1951-1953), dan Soediro (1953-1960).

Pada tanggal 15 Januari 1960 kota Djakarta ditingkatkan menjadi Daerah Tingkat I dengan Kepala Daerah yang berpangkat Gubernur. Pada periode Gubernur Soemarno (1960-1964) terbit UU Nomor 2 Tahun 1961 tentang pembentukan “Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Djakarta Raya”. Sejak itu disebut Pemerintah DCI Djakarta Raya. Pada periode Gubernur Henk Ngantung (1964-1966) terbit UU Nomor 10 Tahun 1964 tentang Djakarta sebagai Ibukota Republik Indonesia dengan nama “Djakarta”. Sejak itu Pemerintah DCI Djakarta Raya berubah menjadi Pemerintah DCI Djakarta.

Pada periode Gubernur Ali Sadikin (1966-1977) sebutan Pemerintah DCI Djakarta berubah menjadi Pemerintah Daerah DKI Djakarta, dengan Gubernurnya yaitu Tjokropranolo (1977-1982), Soeprapto (1982-1987), Wiyogo Atmodarminto (1987-1992).

Pada periode Gubernur Wiyogo Atmodarminto terbit UU Nomor 11 Tahun 1990 tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta. Sejak itu sebutan Pemerintah Daerah DKI Jakarta berubah menjadi Pemerintah Propinsi DKI Jakarta sampai dengan periode Gubernur Surjadi Soedirdja (1992 – 1997).

Pada periode Gubernur Sutiyoso (1997-2008) terbit UU Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta. Sejak itu sebutan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta berubah menjadi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pada akhir masa jabatan Gubernur Sutiyoso terbit Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebutan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak berubah.

2. DASAR HUKUM PEMPROV DKI JAKARTA

Dasar hukum yang melandasi penyelenggaraan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
- b. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- d. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
- e. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah

C. GAMBARAN UMUM PROVINSI DKI JAKARTA

1. KONDISI GEOGRAFIS

a. Batas Administrasi Daerah dan Luas Wilayah

Provinsi DKI Jakarta terletak pada posisi 6° 12' Lintang Selatan dan 106° 48" Bujur Timur. Berdasarkan SK Gubernur Nomor 171 Tahun 2007, luas wilayah Provinsi DKI Jakarta terdiri dari daratan seluas 662,33 km² termasuk 110 pulau yang tersebar di Kepulauan Seribu dan berupa lautan seluas 6.977,5 km².

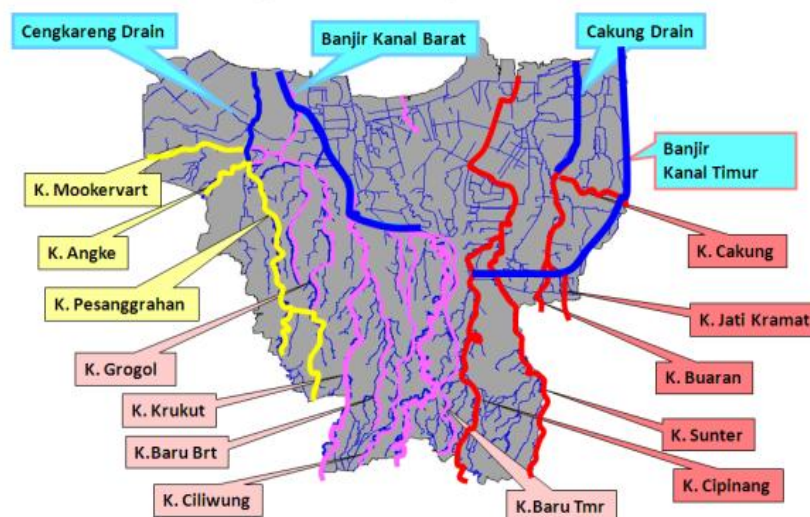
Gambar 1.1
Peta Pembagian Wilayah DKI Jakarta



Sumber : Statistik Daerah Provinsi DKI Jakarta 2010

Ketinggian rata-rata Kota Jakarta ± 7 meter di atas permukaan laut, sedangkan sebagian wilayah khususnya di sekitar pantai laut Jawa terdapat beberapa tempat yang berada di bawah permukaan air laut pasang sehingga rawan genangan. Secara geografis di sebelah utara Jakarta berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah selatan dan timur berbatasan dengan wilayah Provinsi Jawa Barat, dan sebelah barat dengan Provinsi Banten. Di bagian utara membentang pantai dari Barat sampai ke Timur sepanjang ± 35 km yang menjadi tempat bermuaranya 13 sungai, 2 kanal, dan 2 *flood way*.

Gambar 1.2
Sungai, Kanal, Dan Flood Way yang Mengaliri DKI Jakarta



Sumber : Pemprov DKI Jakarta

Wilayah Administrasi Provinsi DKI Jakarta terbagi menjadi lima wilayah kota Administrasi dan 1 (satu) Kabupaten Administrasi, yakni kota Jakarta Selatan dengan luas daratan 145,73 km², Jakarta Timur dengan luas daratan 187,73 km², Jakarta Pusat dengan luas daratan 47,90 km², Jakarta Barat dengan luas daratan 126,15 km² dan Jakarta Utara dengan luas daratan 142,40 km², serta Kabupaten Administrasi dengan luas daratan 11,81 km². Pembagian wilayah Administrasi Provinsi DKI Jakarta terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1
Pembagian Wilayah Administrasi Provinsi DKI Jakarta

No	Kota / Kabupaten Administrasi	Jumlah			
		Kecamatan	Kelurahan	RW	RT
1	Jakarta Pusat	8	44	394	4.652
2	Jakarta Utara	6	31	431	5.072
3	Jakarta Timur	10	65	699	7.843
4	Jakarta Selatan	10	65	576	6.312
5	Jakarta Barat	8	58	580	6.409
6	Kep. Seribu	2	4	24	125
Jumlah		44	267	2.704	30.368

Sumber : Biro Tata Pemerintahan Pemprov DKI Jakarta

b. Iklim

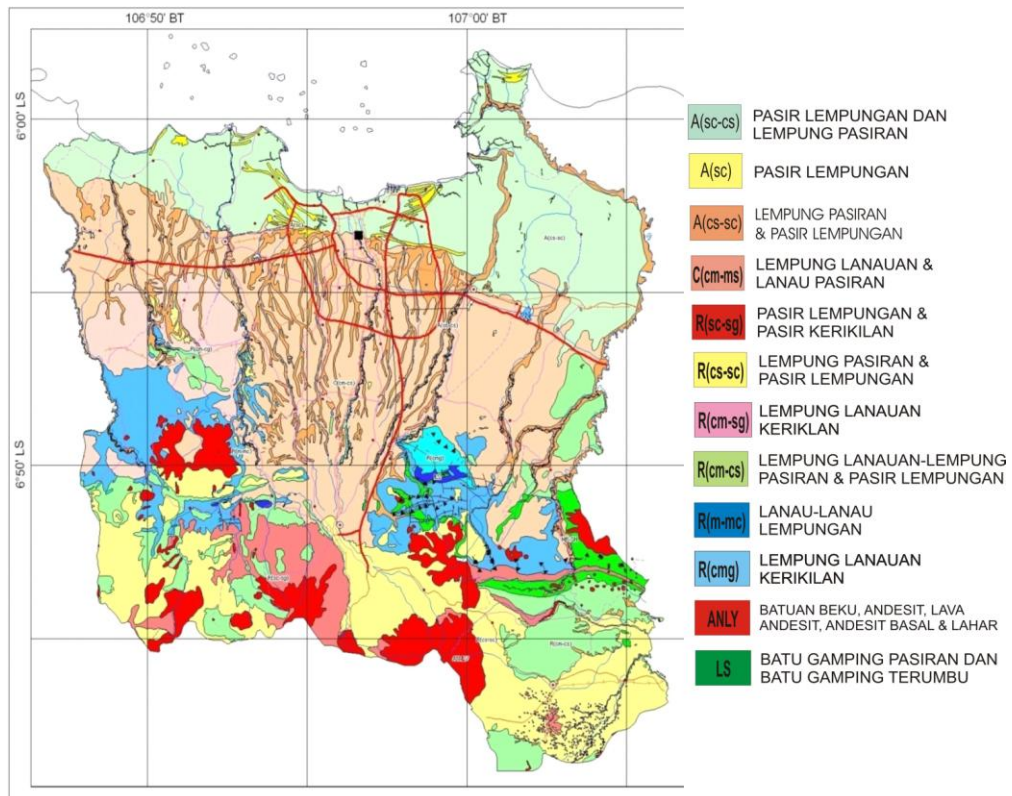
Kota Jakarta dan pada umumnya seluruh daerah di Indonesia mempunyai dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Keadaan kota Jakarta umumnya beriklim panas dengan suhu udara rata-rata di sepanjang tahun 2010 berkisar 27,1 - 29,4° C. Temperatur terendah terjadi pada bulan Januari sedangkan tertinggi pada bulan September, dengan tingkat kelembaban udara rata-rata mencapai 68,0 – 71,0% dan kecepatan angin rata-rata mencapai 2,2 m/detik. Curah hujan tertinggi sebesar 547,9 mm yang terjadi pada bulan Januari.

c. Geologi

Seluruh daerah terdiri dari endapan Pleistocene terdapat ± 50 m di bawah permukaan tanah. Bagian selatan terdiri atas lapisan alluvial, sedang dataran rendah pantai merentang ke bagian pedalaman sekitar 10 km. Di bawah terdapat lapisan endapan yang lebih tua yang tidak tampak pada permukaan tanah karena timbunan seluruhnya oleh endapan alluvium. Di bawah bagian utara, permukaan keras baru terdapat pada kedalaman 10–25 m, makin ke selatan permukaan keras semakin dangkal pada kedalaman 8–15 m, pada bagian kota

tertentu, lapisan permukaan tanah yang keras terdapat pada kedalaman 40 m.

Gambar 1.3
Peta Geologi Teknik Kawasan Jabodetabekpunjur



Sumber : Sawarendro 2010

Dengan kondisi geografis seperti itu, Jakarta termasuk wilayah rawan banjir. Dalam siklus lima tahunan, Jakarta memiliki potensi banjir cukup tinggi, terbukti pada tahun 2002 dan 2007 terjadi banjir besar dengan kerugian yang besar pula.

Jakarta merupakan kota yang terbentuk secara alami, sehingga penataan kota tidak dapat dilakukan secara optimal khususnya dalam sistem tata air/drainase dan jalan. Sebagian besar tanah di Jakarta sudah menjadi hak milik atau dikuasai perorangan sehingga menyulitkan dalam penataan kota, karena memerlukan dana yang sangat besar untuk pembebasan lahan milik warga.

2. KONDISI DEMOGRAFIS

Jumlah penduduk Kota Jakarta tahun 2010 (hasil sementara Sensus Penduduk 2010) sebanyak 9.588,2 ribu jiwa, terdiri dari laki-laki 4.859,27 ribu orang dan perempuan 4.728,93 jiwa. Jumlah tersebut melampaui angka proyeksi penduduk DKI Jakarta yang diperkirakan sebesar 9.295 ribu jiwa. Laju pertumbuhan penduduk DKI Jakarta tahun 2000/2010 sekitar 1,40 persen. Angka ini meningkat sepuluh kali lipat dibandingkan laju pertumbuhan penduduk 1990/2000 yang hanya 0,14 persen. Tingginya laju pertumbuhan penduduk disebabkan oleh banyaknya migran masuk dari daerah lain, sedangkan penduduk yang keluar DKI Jakarta relatif lebih sedikit. Selain itu jumlah kelahiran lebih besar daripada jumlah kematian. Jumlah kelahiran pada tahun 2010 diperkirakan sekitar 144 ribu jiwa sedangkan kematian sekitar 32,5 ribu jiwa

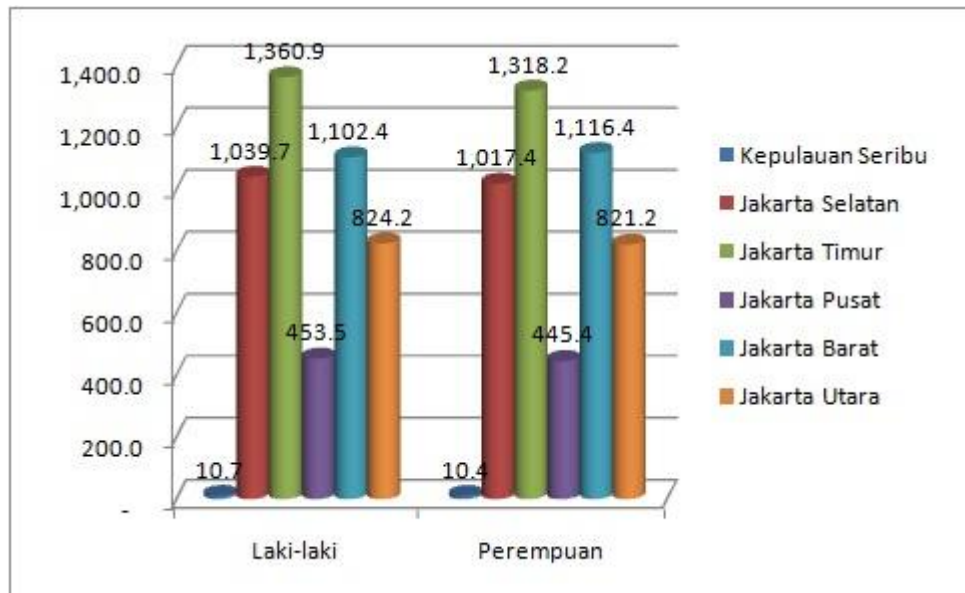
Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Provinsi DKI Jakarta

Uraian	Satuan	SP2000	SP2010
Jumlah Penduduk	Jiwa	8.347,08	9.588,20
Laki-laki	Jiwa	4.223,12	4.859,27
Perempuan	Jiwa	4.123,96	4.728,93
Pertumbuhan Penduduk	%	0,14	1,40
Kepadatan Penduduk	Jiwa/Km ²	12.603	14.476
Sex Ratio	%	102,00	103,00

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta 2010

Hasil sementara Sensus Penduduk menurut Kabupaten/Kota menunjukkan sebaran penduduk terbesar ada di Jakarta Timur, yaitu sebesar 2.687,027 jiwa, terbesar kedua Jakarta Barat sebanyak 2.278,825 jiwa, diikuti Jakarta Selatan sebesar 2.057,080 jiwa, berikutnya Jakarta Utara sebesar 1.645,312 jiwa, lalu Jakarta Pusat sebanyak 898,883 jiwa dan terakhir Kepulauan Seribu ada 21.071 jiwa.

Gambar 1.4
Jumlah Penduduk DKI Jakarta Hasil Sementara SP 2010
Menurut Kabupaten/Kota (Ribu Orang)



Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta 2010

Laju pertumbuhan penduduk menurut Kabupaten/Kota seluruhnya menunjukkan nilai yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan tahun 1990/2000. Laju pertumbuhan tertinggi terjadi di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yakni 2,02 persen, sedangkan yang terendah di Kota Administrasi Jakarta Pusat, yakni sebesar 0,27 persen. Kota administrasi Jakarta Timur memiliki jumlah penduduk tertinggi namun laju pertumbuhannya terendah kedua setelah Kota Administrasi Jakarta Pusat, yakni 1,36 persen. Wilayah lain yang memiliki laju pertumbuhan penduduk diatas rata-rata Provinsi adalah Kota Administrasi Jakarta Barat (1,81 persen), Jakarta Utara (1,49 persen) dan Jakarta Selatan (1,43 persen).

Tabel 1.3
Prosentase Penduduk yang Bekerja (15 tahun ke atas)
Menurut Lapangan Pekerjaan Tahun 2010

LAPANGAN PEKERJAAN	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		Laki-Laki +	
	Jumlah (ribu orang)	%	Jumlah (ribu orang)	%	Jumlah (ribu orang)	%
Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan	26,936	0.92	1,541	0.09	28,477	0.61
Pertambangan dan Penggalian	14,293	0.49	4,891	0.28	19,184	0.41
Industri	461,551	15.76	293,434	16.66	754,985	16.1
Listrik, Gas dan Air Minum	15,060	0.51	2,413	0.14	17,473	0.37
Konstruksi	173,416	5.92	18,077	1.03	191,493	4.08
Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi	1,002,903	34.25	730,728	41.48	1,733,631	36.97
Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	366,180	12.51	59,451	3.38	425,631	9.08
Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan	210,699	7.2	101,714	5.77	312,413	6.66
Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	657,225	22.44	549,249	31.18	1,206,474	25.73
Total	2,928,263	100	1,761,498	100	4,689,761	100

Sumber : Sakernas, BPS Provinsi DKI Jakarta Tahun 2010

Jumlah penduduk yang bekerja mencapai 4,69 juta orang, terdiri atas laki-laki 2,93 juta orang dan perempuan sebanyak 1,76 juta orang. Menurut lapangan pekerjaan kegiatan ekonomi yang paling banyak menyerap pekerja adalah bidang perdagangan, restoran dan hotel (36,97%) ; jasa-jasa (25,73%) ; dan industri pengolahan (16,10%). Dengan demikian bidang jasa-jasa atau sektor tersier menyerap tenaga kerja sebanyak 78,79 persen.

Menurut tingkat pendidikan (khususnya bagi penduduk yang berusia 10 tahun ke atas) tercatat sebanyak 2.808,1 ribu jiwa atau 35 persen dari penduduk yang berusia 10 tahun ke atas berhasil menyelesaikan pendidikan dari tingkatan Sekolah Menengah Tingkat Atas. Penduduk yang menyelesaikan pendidikan tinggi mencapai 1.033,4 ribu orang yang terdiri atas sebanyak 358.5 orang (4 persen) pada level DI hingga DIII, dan sebanyak 674,9 ribu orang atau sebesar 8 persen berpendidikan sarjana.

tabel 1.4
Tingkat Pendidikan Penduduk Kota Jakarta Tahun 2010
(10 tahun ke atas)

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Tidak/Belum Pernah Sekolah	423,25	532,57	955,82
2	SD	720,05	898,71	1.618,76
3	SMTp	780,30	788,31	1.568,61
4	SMTA	1.555,85	1.252,24	2.808,09
5	Diploma I – III	171,61	186,85	358,46
6	Universitas	383,03	291,88	674,91
Jumlah		4.034,09	3.950,56	7.984,65

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta tahun 2010

3. KONDISI EKONOMI

a. Potensi Unggulan Daerah

1) Ekspor Melalui DKI Jakarta

Sejalan dengan membaiknya perekonomian global, nilai ekspor melalui DKI Jakarta tahun 2010 sebesar US \$ 39.656,18 juta, atau naik 21,88 persen dari tahun 2009 yang sebesar US\$ 32.536,51 juta. Nilai ekspor 2010 bahkan tertinggi dalam 10 tahun.

2) Ekspor Produk DKI Jakarta

Ekspor yang mempunyai pengaruh langsung terhadap perekonomian Jakarta adalah ekspor atas produk-produk yang dihasilkan oleh unit usaha yang berdomisili di wilayah DKI Jakarta. Pada tahun 2009, nilai ekspor barang produk Provinsi DKI Jakarta mencapai nilai US\$ 7.536,44 juta, dan tahun 2010 mencapai US\$ 8.464,9 juta atau naik sebesar 12,32.

Persentase ekspor produk DKI Jakarta terhadap ekspor yang melalui pelabuhan di Jakarta selama tahun 2007 hingga 2010 berkisar antara 21 hingga 26 persen. Hal ini dirasakan wajar mengingat Jakarta memiliki pelabuhan internasional sehingga barang yang dikirim tidak hanya berasal dari Jakarta saja.

Sampai dengan bulan Desember 2010 negara tujuan ekspor produk DKI Jakarta yang terbesar adalah Amerika Serikat, dengan nilai sebesar 1.209,90 juta US \$, selanjutnya Malaysia sebesar 669,9 juta US \$, disusul Singapura dan Hongkong masing-masing sebesar 669,75 juta US \$ dan 609,72 US \$.

Gambar 1.5
Ekspor Produk DKI Jakarta Menurut 5 Besar Negara Tujuan (Juta \$) 2010



Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta Tahun 2010

Jika ditinjau menurut komoditi, ekspor produk DKI Jakarta yang terbesar selama periode Januari – Desember 2010 adalah, kendaraan dan bagiannya yakni sebesar 1.409,80 juta US \$ atau sekitar 16,65 persen dari total ekspor produk DKI Jakarta. Perhiasan/permata menempati peringkat selanjutnya sebesar 1.072,7 juta US \$ atau sekitar 12,67 persen dari total ekspor.

Tabel 1.5
Nilai Ekspor Produk DKI Jakarta Menurut 5 Komoditi Utama,
Januari – Desember 2010

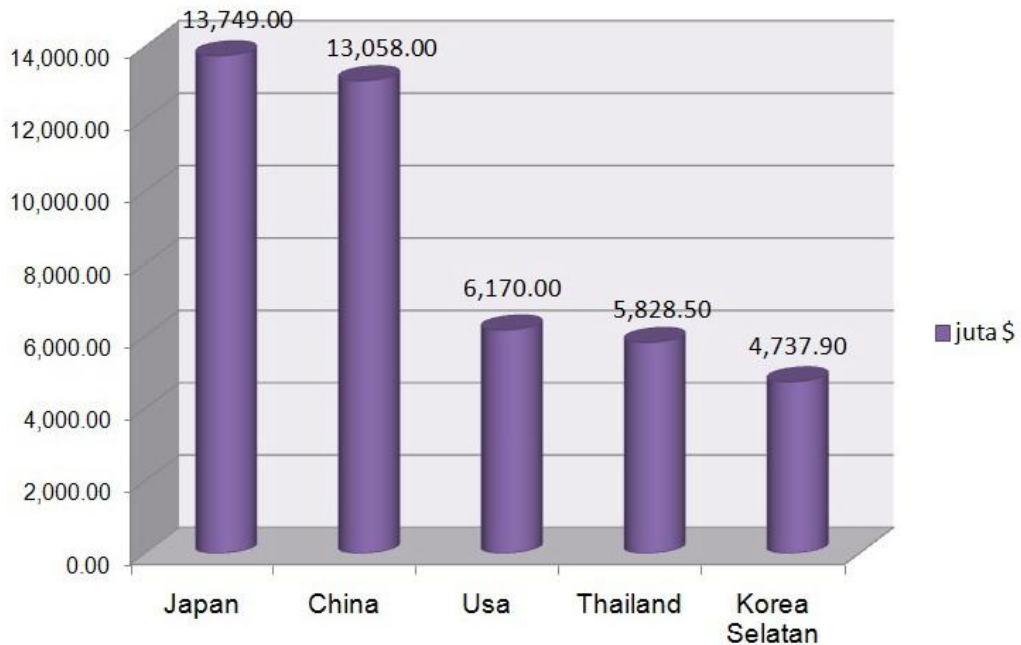
No	Komoditi	Total (Jan – Des) (Juta US \$)	% Peran thd Total
1	Kendaraan dan Bagiannya	1.409,80	16,65
2	Perhiasan / Permata	1.072,7	12,67
3	Mesin-mesin / Pesawat Mekanik	793,68	9,38
4	Pakaian Jadi Bukan Rajutan	790,08	9,33
5	Mesin / Peralatan Listrik	522,77	6,18
Lainnya		3.875,87	45,79
Total		8.464,90	100,00

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta Tahun 2010

3) Impor

Selama tahun 2010, nilai impor melalui pelabuhan bongkar di DKI Jakarta mencapai US\$ 70.072,11 juta. Dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 48.99,31 maka terjadi kenaikan impor sebesar 45,68 persen. Selama tahun 2010, nilai impor DKI Jakarta terbesar berasal dari negara Jepang yaitu sebesar 13.749,00 juta US \$ atau sebesar 19,62 persen dari total impor, kemudian disusul China yaitu 13.058,00 juta US atau sekitar 18,63 persen dari total impor.

Gambar 1.6
Impor DKI Jakarta Menurut 5 Besar Negara Asal (Juta \$), 2010



Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta Tahun 2010

Di lain sisi tinjauan terhadap komoditi menunjukkan nilai impor melalui pelabuhan DKI Jakarta terbesar pada tahun 2010 berasal dari produk mesin-mesin/pesawat mekanik dengan nilai sebesar 13.339,00 juta US \$ atau sebesar 19,04 persen dari total impor, disusul mesin/peralatan listrik dan kendaraan dan bagiannya yang masing-masing sebesar 10.998,00 juta US \$ (sebesar 15,70 persen) dan 4.954,90 juta US \$ (7,07 persen). Tiga besar komoditi yang diimpor adalah barang modal, hal ini merupakan indikasi positif bahwa perekonomian di Jakarta mulai bergerak kearah yang positif.

Tabel 1.6
Nilai Impor Melalui DKI Jakarta Menurut 5 Komoditi Utama
Tahun 2010 (juta US \$)

No	Komoditi	2010	% Peran terhadap Total
1	Mesin-mesin / Pesawat Mekanik	13.339,00	19,04
2	Mesin / Peralatan Listik	10.998,00	15,70
3	Kendaraan dan Bagiannya	4.954,90	7,07
4	Besi dan Baja	3.807,90	5,43
5	Plastik dan Barang dari Plastik	3.270,80	4,67
6	Lainnya	33.702,02	48,10
Total		70.072,62	100,00

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta Tahun 2010

Selain ekspor, potensi daerah juga dapat dilihat dari gambaran tingkat pariwisata khususnya dari wisatawan mancanegara.

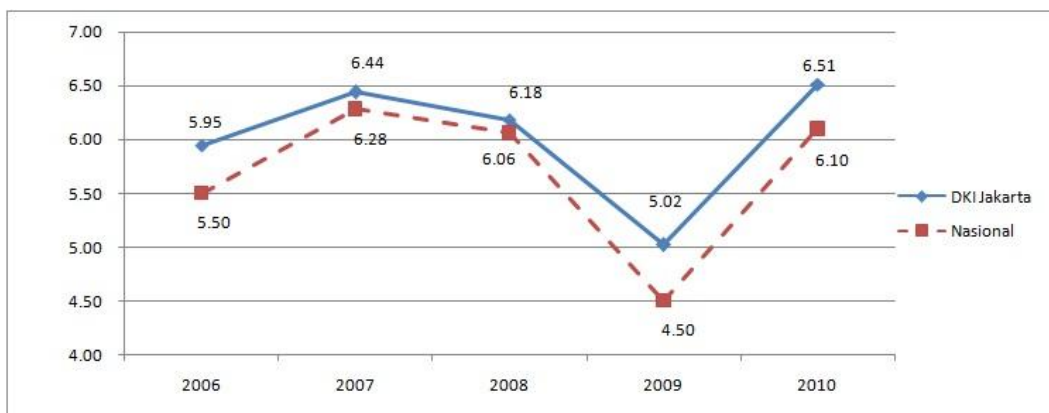
Wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung ke Kota Jakarta melalui tiga pintu masuk (Soekarno-Hatta, Tanjung Priok, dan Halim Perdana Kusumah) selama tahun 2010 mencapai 1.892.866 kunjungan atau mengalami kenaikan sebesar 30,37 persen dibandingkan kunjungan wisman tahun sebelumnya yang sebesar 1.451.914 kunjungan. Kenaikan ini lebih terkait dengan faktor eksternal, seiring membaiknya kondisi perekonomian global setelah krisis menyebabkan kunjungan wisman ke DKI Jakarta mengalami kenaikan yang signifikan. Hal ini terkait dengan kenyataan bahwa sebagian besar (lebih dari 50 persen) kunjungan wisman ke DKI Jakarta maksud utama kunjungannya adalah bisnis.

Selama periode tahun 2010, wisman yang paling banyak mengunjungi Kota Jakarta adalah wisman yang berasal dari Malaysia diikuti oleh wisman dari Singapura, China, Jepang, dan Korea Selatan.

b. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Jakarta dapat dikatakan sudah mampu mengatasi dampak krisis keuangan global. Pada tahun 2010 pertumbuhan DKI Jakarta mencapai 6,51 persen lebih tinggi dari yang dicapai tahun 2009 (5,02%). Pertumbuhan ini terbilang cukup tinggi karena telah mampu melampaui pertumbuhan yang dicapai tahun 2007 (sebelum krisis global).

Gambar 1.7
Laju Pertumbuhan (%), 2006-2010



Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta Tahun 2010

Selama tahun 2010 dapat dikatakan kondisi perekonomian global berjalan lebih baik dari tahun 2009, yang antara lain ditunjukkan dengan membaiknya perekonomian Amerika dan negara-negara Eropa meskipun belum sepenuhnya pulih dari krisis. Dampak dari kondisi tersebut mendorong perekonomian Indonesia, termasuk Jakarta menjadi lebih baik dari tahun 2009. Pulihnya perekonomian negara-negara tujuan ekspor mendorong kegiatan sektor industri di Jakarta kembali bergerak sehingga menstimulus sektor lainnya untuk ikut bergerak dinamis. Hal ini diindikasikan dengan nilai ekspor dan impor luar negeri Jakarta yang menunjukkan pertumbuhan lebih tinggi bila dibandingkan dengan tahun 2009. Dari sisi internal, kondisi keamanan yang relatif stabil telah mampu menciptakan kondisi investasi dan penyaluran kredit yang lebih baik pula. Selain itu, konsumsi domestik masih menjadi faktor penggerak utama

perekonomian Jakarta seiring dengan membaiknya perekonomian Jakarta.

Dari sisi produksi hampir seluruh sektor mengalami pertumbuhan lebih cepat dari yang dicapai pada tahun 2009, kecuali sektor pengangkutan dan komunikasi. Perlambatan yang terjadi di sektor ini lebih dikarenakan pertumbuhan sektor komunikasi yang mulai memasuki titik jenuh.

Membaiknya perekonomian Jakarta selain karena pengaruh domestik (konsumsi rumah tangga dan pemerintah) juga didorong oleh membaiknya perekonomian dunia, terutama negara-negara yang menjadi tujuan ekspor produk Jakarta. Pada gilirannya peningkatan permintaan membuat sektor industri pengolahan juga menunjukkan peningkatan produksi. Pada tahun 2010 sektor ini tumbuh 3,63 persen setelah pada tahun sebelumnya hanya tumbuh 0,14 persen. Peningkatan yang terjadi di sektor industri pengolahan antara lain didorong oleh peningkatan produksi industri alat angkutan, mesin, dan peralatannya, industri makanan-minuman, dan industri tekstil, barang kulit, dan alas kaki.

Peningkatan kegiatan industri telah mendorong meningkatnya nilai impor, baik impor barang konsumsi, bahan baku, maupun barang modal, sehingga hal ini menjadi salah satu pendorong pertumbuhan sektor perdagangan-hotel-restoran menjadi 7,29 persen setelah pada periode yang sama di tahun sebelumnya hanya tumbuh 4,01 persen. Faktor lain yang mendorong pertumbuhan sektor ini adalah kegiatan di sektor jasa hiburan dan mulai beroperasinya beberapa hotel berbintang yang baru di Jakarta.

Pergerakan sektor riil tentunya akan diikuti oleh pergerakan sektor keuangan. Pada tahun 2010 pertumbuhan yang dicapai oleh sektor keuangan-persewaan-jasa perusahaan meningkat menjadi 4,21 persen setelah sebelumnya tumbuh 3,97 persen. Faktor-faktor yang mendorong tingginya pertumbuhan di sektor ini antara lain adalah peningkatan yang cukup tinggi pada nilai kredit yang disalurkan serta

berkembangnya kegiatan leasing, asuransi dan pegadaian. Selain itu juga didorong oleh menguatnya pasar properti di Jakarta, baik berupa apartemen maupun ruang perkantoran dan ruko.

Tabel 1.7
Laju Pertumbuhan PDRB Tahun 2007-2010
Menurut Lapangan Usaha

Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan (%)			
	2007	2008	2009	2010
Pertanian	0,92	0,77	0,34	1,70
Pertambangan dan penggalian	0,46	0,32	-0,21	1,49
Industri pengolahan	4,68	3,87	0,14	3,63
Listrik, gas, & air bersih	4,44	6,32	4,58	5,64
Konstruksi	7,62	7,67	6,20	7,08
Perdagangan, hotel dan restoran	7,04	6,66	4,01	7,29
Pengangkutan dan komunikasi	14,65	14,83	15,63	14,75
Keuangan, real estat & jasa perusahaan	4,40	4,21	3,97	4,21
Jasa-jasa	6,07	6,05	6,49	6,58
PDRB	6,39	6,22	5,02	6,51
PDRB Tanpa Migas	-	6,24	5,03	6,53

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta

Dari sisi pengeluaran, membaiknya perekonomian global didukung dengan semakin kondusifnya kondisi keamanan Jakarta telah mendorong peningkatan permintaan luar negeri akan produk Jakarta serta mendorong arus investasi masuk ke Jakarta. Kondisi tersebut tergambarkan melalui pertumbuhan yang dicapai oleh komponen ekspor, impor, dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB).

PMTB tumbuh signifikan menjadi 8,81 persen, demikian pula dengan komponen impor yang tumbuh 8,10 persen. Pesatnya pertumbuhan komponen impor terutama didorong oleh tingginya impor bahan baku dan barang modal. Sementara itu, komponen ekspor tumbuh 7,30 persen. Komponen konsumsi rumah tangga pun mengalami percepatan pertumbuhan menjadi 6,34 persen pada tahun

2010. Percepatan ini didorong oleh meningkatnya pendapatan masyarakat. Peningkatan pendapatan ini terjadi seiring dengan membaiknya kinerja sektor riil, selain itu antara lain juga disebabkan oleh meningkatnya upah minimum provinsi (UMP) di Jakarta dari sebesar Rp 1.188.010,- menjadi Rp 1.290.000. Satu-satunya komponen yang mengalami perlambatan adalah komponen konsumsi pemerintah yang hanya tumbuh 0,73 persen. Hal ini disebabkan pada tahun 2009 pemerintah melakukan percepatan realisasi belanja dalam rangka stimulus perekonomian yang lesu akibat krisis ekonomi disamping pengeluaran pemerintah untuk menggelar Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden pada tahun 2009.

Tabel 1.8
Laju Pertumbuhan PDRB DKI Jakarta Menurut Komponen Pengeluaran
Tahun 2008 – 2010

Komponen Penggunaan	Laju Pertumbuhan (%)		
	2008	2009	2010
Konsumsi Rumah Tangga	7,47	5,90	6,34
Konsumsi Pemerintah	7,64	10,45	0,73
Pembentukan Modal Tetap Bruto	8,49	2,76	8,81
Ekspor	4,60	0,24	7,30
Minus Impor	27,56	-1,85	8,10
PDRB	6,22	5,02	6,51

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta

c. Inflasi

Indikator lain yang sangat penting dalam menentukan kondisi dan stabilitas perekonomian daerah adalah inflasi. Inflasi selain berkaitan dengan interaksi antara penawaran dan permintaan, juga tidak lepas dari faktor-faktor lainnya seperti tata-niaga dan kelancaran distribusi barang dan jasa, serta peran kebijakan pemerintah di bidang moneter.

Inflasi dalam arti sempit adalah peningkatan harga barang dan jasa kebutuhan dasar masyarakat secara rata-rata.

Laju inflasi DKI Jakarta sepanjang tahun 2010 (Januari-Desember) adalah sebesar 6,21 persen. Angka ini sudah melampaui laju inflasi tahun 2009 yang sebesar 2,34 persen. Tingginya laju inflasi tahun 2010 mengindikasikan semakin membaiknya perekonomian Jakarta yang ditandai dengan meningkatnya permintaan barang dan jasa.

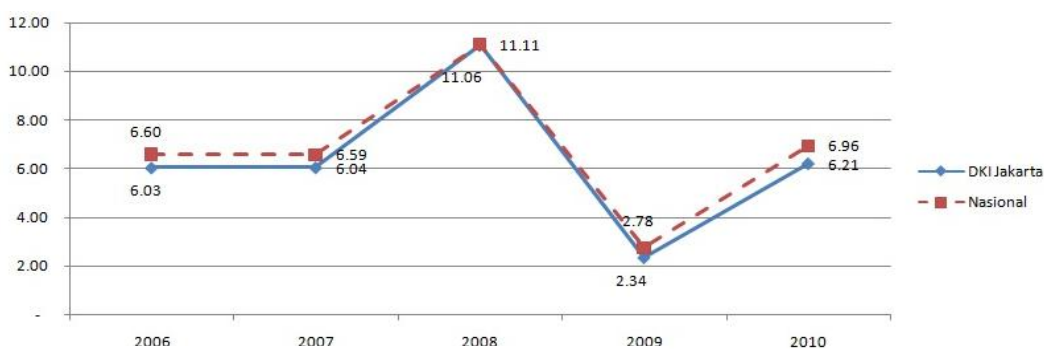
Tabel 1.9
Inflasi DKI Jakarta Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2007 – 2010

Kelompok	Inflasi			
	2007	2008	2009	2010
Umum	6,04	11,11	2,34	6,21
Bahan Makanan	11,40	15,48	5,17	14,80
Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau	5,36	12,91	8,55	8,89
Perumahan	4,81	14,84	0,28	3,41
Sandang	8,15	8,56	5,31	5,61
Kesehatan	3,99	7,31	4,13	1,23
Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga	9,09	5,56	1,96	1,40
Transpor dan Komunikasi	1,14	6,20	3,87	4,56

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta

Besaran inflasi DKI Jakarta dalam beberapa tahun terakhir hampir selalu berada dibawah nasional. Meskipun bobot inflasi Jakarta terhadap inflasi nasional secara keseluruhan sekitar sebesar 29 persen, inflasi DKI Jakarta relatif terjaga.

Gambar 1.8
Inflasi DKI Jakarta dan Nasional (%) Tahun 2006-2010



Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta

BAB II

KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. VISI DAN MISI

1. Visi

Visi Pembangunan 2007–2012 adalah **"JAKARTA YANG NYAMAN DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA"**.

Pemahaman terhadap visi tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Jakarta yang nyaman bermakna terciptanya rasa aman, tertib, tentram dan damai.
- b. Jakarta yang sejahtera bermakna terwujudnya derajat kehidupan penduduk Jakarta yang sehat, layak dan manusiawi.

Jakarta adalah sebuah kota yang bisa menjanjikan kehidupan yang nyaman dan sejahtera untuk semua jika pemerintah dan masyarakatnya sepakat untuk secara optimal menjawab tantangan, menyelesaikan permasalahan, serta memanfaatkan potensi dan peluang yang ada. Kebersamaan adalah sebuah kata kunci. Kepemimpinan adalah jawaban terhadap setiap tantangan. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah titik tolak untuk menyelesaikan berbagai permasalahan.

Dengan modal kebersamaan, kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan yang baik, diharapkan masyarakat akan lebih mampu memanfaatkan segala potensi dan peluang yang tersedia.

2. Misi

Misi pembangunan 2007-2012 adalah sebagai berikut:

- a. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik dengan menerapkan kaidah-kaidah *Good Governance*
- b. Melayani masyarakat dengan prinsip pelayanan prima
- c. Memberdayakan masyarakat dengan prinsip pemberian otoritas pada masyarakat untuk mengenali permasalahan yang dihadapi dan mengupayakan pemecahan yang terbaik pada tahapan

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan

- d. Membangun sarana dan prasarana kota yang menjamin kenyamanan, dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan
- e. Menciptakan lingkungan kehidupan kota yang dinamis dalam mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan.

Makna misi yang dimaksud adalah:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan menerapkan kaidah-kaidah "*Good Governance*", bermakna bahwa tata pemerintahan dijalankan dengan mengacu pada 10 (sepuluh) prinsip *Good Governance*, yakni:
 - a. Partisipasi masyarakat
 - b. Tegaknya supremasi hukum
 - c. Transparansi
 - d. Kesetaraan
 - e. Daya tanggap kepada *stakeholders*
 - f. Berorientasi pada visi
 - g. Akuntabilitas
 - h. Pengawasan
 - i. Efektivitas dan efisiensi
 - j. Profesionalisme

Pendekatan yang dilakukan untuk aktualisasi misi ini melalui peningkatan kinerja aparatur, sistem dan unit kerja. Misi ini akan mewujudkan efektivitas program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi.

2. Melayani masyarakat dengan prinsip pelayanan prima, bermakna bahwa pelayanan prima dilakukan dengan mengutamakan norma pelayanan yakni: ramah, efisien, bermutu, cepat, transparan dan berkepastian hukum. Pelayanan prima terutama akan diprioritaskan pada bidang-bidang yang sangat menyentuh kehidupan masyarakat

antara lain pendidikan, kesehatan, sosial budaya, keamanan, ketertiban, hukum, sarana dan prasarana kota, serta perhubungan dan transportasi.

3. Memberdayakan masyarakat dengan prinsip pemberian otoritas pada masyarakat untuk mengenali permasalahan yang dihadapi dan mengupayakan pemecahan yang terbaik pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan, bermakna bahwa pemberian otoritas dilandasi oleh pertimbangan bahwa di kalangan masyarakat telah ada komunitas keahlian tertentu yang berkemampuan untuk berpartisipasi secara luas dalam pembangunan. Pemberian otoritas telah dapat diimplementasikan pada bidang tertentu, sesuai dengan kemampuan masyarakatnya.

Lebih lanjut melalui pemberdayaan masyarakat ini, terbuka pula ruang publik untuk bermusyawarah dan sekaligus merupakan proses pembelajaran kehidupan demokratis.

4. Membangun sarana dan prasarana kota yang menjamin kenyamanan dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan, bermakna bahwa untuk menjamin kenyamanan dilakukan melalui pembangunan sarana dan prasarana kota terutama berkaitan dengan pengendalian banjir, kelancaran arus lalu lintas, penyediaan layanan air bersih, penyediaan ruang terbuka hijau skala kota dan taman interaktif.
5. Menciptakan lingkungan kehidupan kota yang dinamis dalam mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan, bermakna bahwa Jakarta memiliki "*favorable climate*" untuk 7 (tujuh) aset kota, yakni:
 - a. *Human*
 - b. *Social*
 - c. *Cultural*
 - d. *Intellectual and Creative*

- e. *Natural*
- f. *Environmental*
- g. *Infrastructure*

Pertumbuhan yang diharapkan adalah pertumbuhan yang serasi antar bidang dan wilayah. Kesejahteraan yang diarahkan adalah meningkatnya derajat kualitas kehidupan yang sinergis untuk ketujuh asset kota dimaksud.

B. STRATEGI PEMBANGUNAN PROVINSI DKI JAKARTA

1. Tujuan Pembangunan Daerah

- a. Meningkatnya kualitas layanan publik sesuai prinsip-prinsip layanan prima
- b. Meningkatnya kualitas dan kapasitas infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial
- c. Meningkatnya kapasitas keuangan daerah untuk membiayai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur kota
- d. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
- e. Meningkatnya kebersamaan antara Pemerintah Provinsi, masyarakat dan semua pemangku kepentingan dalam rangka menyelesaikan berbagai masalah, menjawab tantangan masa depan, dan memanfaatkan potensi dan peluang yang dimiliki kota
- f. Makin bertambah erat dan produktifnya jejaring kerja sama (networking) pemerintah provinsi dengan lembaga-lembaga di tingkat nasional, regional dan internasional
- g. Bertambah baiknya tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan oleh perangkat Daerah

2. Strategi Pembangunan Daerah

- a. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya kota yang mencakup aset *Human, Social, Cultural, Intellectual and Creative, Natural, Environmental dan Infrastructure*, dalam rangka memberikan

kontribusi guna terwujudnya kota Jakarta yang nyaman dan sejahtera untuk semua serta berkelanjutan

- b. Pengembangan jejaring kerja sama (*networking*) nasional, regional dan internasional, meliputi antara lain pertukaran informasi, penggunaan sumber-sumber yang dibutuhkan secara bersama, pertukaran barang dan jasa, pengetahuan serta keahlian yang saling menguntungkan
- c. Menerapkan sistem manajemen mutu pada setiap layanan publik
- d. Membangun, meningkatkan dan memelihara semua infrastruktur ekonomi/sosial kota yang strategis
- e. Meningkatkan efisiensi dan kinerja belanja, diversifikasi dan optimalisasi pendapatan daerah, kemampuan pembiayaan daerah dan kemitraan strategis pemerintah dengan swasta (*public private partnership*)
- f. Konsistensi dalam implementasi Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, penegakan hukum terhadap pelanggaran baku mutu lingkungan, mengembalikan keadaan udara bersih, laut biru dan air tanah yang tidak tercemar
- g. Membangun model kebersamaan antara pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka menyelesaikan berbagai masalah, menjawab tantangan masa depan, dan memanfaatkan potensi dan peluang yang dimiliki kota, dengan tahapan antara lain:
 - Memilih urusan/masalah di setiap tingkat pemerintahan yang akan menjadi model perwujudan kesepakatan antara Pemerintah Provinsi dan masyarakat
 - Membuat *pilot project* tentang mekanisme penyelesaian masalah kota, dengan pemberian otoritas kepada masyarakat (komunitas profesional) untuk mengenali permasalahan yang dihadapi dan mengupayakan pemecahannya

- Apabila mekanisme tersebut berhasil maka proses pembangunan kesepakatan tersebut dapat ditingkatkan menjadi kebijakan daerah
 - Replikasi dan penyempurnaan model pada urusan lainnya
- h. Membangun model peningkatan kinerja jejaring kerjasama dilakukan dengan tahapan :
- Membuat model pemanfaatan sumber daya kota dan jejaring kerjasama untuk penyelesaian masalah kota seperti banjir, kemacetan dan lain-lain
 - Membuat model pemanfaatan sumber daya kota dan jejaring kerjasama untuk pengembangan kerjasama antar Kota/ Kabupaten Jabodetabekjur maupun dengan Provinsi se-Jawa Bali
 - Membuat model pemanfaatan sumber daya kota dan jejaring kerjasama internasional untuk permasalahan yang spesifik di Ibukota
- i. Membentuk birokrasi yang efektif melalui :
- Perampingan organisasi
 - Penguatan fungsi regulator di tingkat Provinsi
 - Pendelegasian kewenangan Provinsi dan fungsi operator sampai ke tingkat wilayah atau satuan kerja operasional
 - Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah
 - Penerapan prinsip *good governance* pada setiap tingkat pemerintahan
 - Pemanfaatan teknologi informasi / internet pada semua tingkat pemerintahan
 - Pengintegrasian dan pembentukan satuan kerja perijinan dan investasi
 - Pembentukan fungsi pengelolaan hutang dan aset pemerintah Provinsi (*debt management and asset management unit*)

- Penerapan dan penyempurnaan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) pada satuan kerja operasional.
 - Penetapan SKPD sebagai *pilot project* untuk model penerapan kaidah *Good Governance*. Pada SKPD tersebut secara terencana dilakukan perbaikan pada proses kerja, organisasi, SDM, infrastruktur dan teknologi yang digunakan
- j. Membangun kapasitas penanggulangan bencana dengan mengintegrasikan fungsi *crisis centre*, pemadam kebakaran dan ambulan gawat darurat dalam satu pengelolaan
 - k. Menjamin akses layanan publik untuk keluarga miskin antara lain melalui pengelolaan data gakin terpadu, distribusi beras (raskin), pendidikan SD, SMP dan SMK, pelayanan kesehatan melalui Sistem Jaminan Pelayanan Kesehatan dan pelayanan pemakaman
 - l. Menyediakan subsidi langsung berupa dana *Public Service Obligation* (PSO) untuk pelayanan publik tertentu, antara lain angkutan umum dan pelayanan rawat inap
 - m. Menetapkan kinerja dan menuangkan dalam bentuk *performance agreement contract* antara pimpinan dan bawahan secara berjenjang

3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam melaksanakan pembangunan daerah adalah :

- a. Pendekatan Partisipatoris Pembangunan berbasis komunitas yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian secara sinergis
- b. Pendekatan Teknis Administratif Reformasi birokrasi melalui penataan kelembagaan, penataan mekanisme kerja organisasi, penataan administrasi sumber daya aparatur dan peningkatan kompetensi aparatur, dengan pelimpahan tugas yang lebih luas kepada Kotamadya/Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan

C. PRIORITAS DAERAH

1. Program Dedicated

Program Prioritas Daerah yang bersifat *top-down* dikenal dengan sebutan Program *Dedicated* yang merupakan komitmen dari Pimpinan Daerah yang berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, lintas sektor, berskala besar dan memiliki urgensi yang tinggi serta memberikan dampak luas pada masyarakat, dapat bersifat *multi-years* yaitu kegiatan yang waktu penyelesaiannya lebih dari 1 (satu) tahun anggaran, berbentuk fisik, dalam satu kesatuan fungsi dan satu kesatuan kontrak. Dalam hal pembangunan fisik, program dedicated antara lain ditujukan untuk pembangunan dan pengembangan pengendalian banjir, perhubungan dan transportasi, penanggulangan polusi, peningkatan kualitas kebutuhan dasar masyarakat (permukiman dan penyediaan air bersih), pengelolaan bencana serta antisipasi perubahan iklim.

Dalam bidang sosial program dedicated meliputi perbaikan derajat kesehatan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan pendidikan. Mekanisme pengalokasian anggaran untuk Program *Dedicated* menggunakan pendekatan *top-down* sehingga mengikat instansi wilayah maupun sektoral untuk melaksanakan program dimaksud.

2. Prioritas Pembangunan Menurut Urusan

Prioritas pembangunan menurut urusan terdiri atas 29 urusan pemerintahan, yaitu :

- 1) Pendidikan
- 2) Kesehatan
- 3) Pekerjaan Umum
- 4) Perumahan Rakyat
- 5) Penataan Ruang
- 6) Perencanaan dan Pembangunan
- 7) Perhubungan
- 8) Lingkungan Hidup

- 9) Pertanian
- 10) Kependudukan dan Catatan Sipil
- 11) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 12) Keluarga Berencana (KB) dan Keluarga Sejahtera (KS)
- 13) Sosial
- 14) Ketenagakerjaan
- 15) Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
- 16) Penanaman Modal
- 17) Kebudayaan
- 18) Pemuda dan Olahraga
- 19) Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
- 20) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
- 21) Ketahanan Pangan
- 22) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 23) Statistik
- 24) Kearsipan
- 25) Komunikasi dan Informatika
- 26) Perpustakaan
- 27) Pariwisata
- 28) Perikanan, Kelautan, dan Peternakan
- 29) Perdagangan

Sesuai dengan visi misi dalam RPJMD 2007-2012 yang diselaraskan dengan prioritas nasional, kebijakan pembangunan DKI Jakarta Tahun 2010 yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2009 tentang RKPD Tahun 2010 diprioritaskan untuk :

- a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menata kelembagaan dan pelaksanaan sistem pemenuhan kebutuhan masyarakat berbasis pemberdayaan
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan sosial

- c. Membangun sarana prasarana kota untuk memperlancar aktivitas perekonomian kota dan pemenuhan kebutuhan perumahan rakyat
- d. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui lini terdepan (*front line*) di tingkat Kecamatan dan Kelurahan
- e. Meningkatkan kualitas lingkungan kota sesuai prinsip pembangunan berkelanjutan.

3. Prioritas Pembangunan Wilayah

Prioritas pembangunan wilayah ditetapkan menurut lima Indikator Kinerja Utama Kota Administrasi, yaitu :

- 1) Bangun Praja / Adipura
- 2) RW Binaan Kumuh
- 3) Gerakan Jumat Sehat
- 4) Peningkatan Pelayanan Terpadu Satu Atap
- 5) Penataan Kawasan Khusus / Unggulan

BAB III

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2010 didasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Peraturan perundangan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
8. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya.
9. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008, tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penetapan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2010
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2010

Azas umum pengelolaan keuangan daerah yang telah menjadi komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah pengelolaan keuangan daerah yang

dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi, diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

APBD mempunyai fungsi sebagai alokasi, distribusi dan stabilisasi dalam pengelolaan perekonomian daerah. Selain itu APBD juga merupakan salah satu instrumen yang menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah. Agar APBD dapat disusun dan dilaksanakan dengan baik dan benar, maka landasan administratif dalam pengelolaan anggaran daerah yang mengatur antara lain prosedur dan teknis penganggaran harus diikuti secara tertib dan taat azas.

Beberapa prinsip disiplin anggaran dalam penyusunan anggaran daerah, antara lain adalah :

1. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional, yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja
2. Penganggaran pengeluaran harus didukung oleh kepastian penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi anggarannya dalam APBD/Perubahan APBD
3. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD dan dibukukan dalam rekening Kas Umum Daerah.

Aspek penting dalam penyusunan anggaran adalah penyelarasan antara kebijakan (*policy*), perencanaan (*planning*) dengan penganggaran (*budgeting*) antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah agar tidak tumpang tindih. Penyusunan APBD pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik.

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun dalam penyusunan LKPJ Tahun 2010 ini data yang digunakan adalah data APBD yang belum diaudit oleh BPK, karena sesuai ketentuan, hasil audit BPK baru akan diterima awal bulan Juni atau 2 bulan setelah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah diserahkan ke BPK dan hasilnya akan dilaporkan dalam raperda Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (LP2APBD) 2010.

A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

1. Kebijakan Pendapatan Daerah

a. Kebijakan Pendapatan Asli Daerah

Secara umum kebijakan Pendapatan Asli Daerah akan dilakukan dengan meningkatkan sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang diprediksi akan memberikan sumbangan yang berarti pada perolehan pendapatan. Kebijakan tersebut antara lain dilakukan melalui :

- Optimalisasi Pajak Daerah melalui Online Sistem Pajak Hotel dan Restoran;
- Menaikkan tarif parkir off street dengan sistem zona;
- Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi daerah.
- Memperluas Tim Optimalisasi Pendapatan Pajak Daerah;
- Melakukan evaluasi terhadap Perda Nomor 1 Tahun 2006 tentang Retribusi Daerah;
- Meningkatkan kemampuan manajemen pengelolaan bisnis BUMD melalui Kontrak Kinerja Direksi;
- Evaluasi terhadap seluruh perjanjian-perjanjian pemanfaatan asset daerah dengan Pihak Ketiga;
- Pengembangan asset daerah yang berada di lahan-lahan yang strategis dan ekonomis melalui kerjasama dengan Pihak Ketiga

- b. Kebijakan Dana Perimbangan
Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk memperoleh insentif Dana Alokasi Umum (DAU);
- c. Kebijakan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Melakukan koordinasi untuk pencairan hibah MRT yang telah dituangkan dalam Naskah Perjanjian Penerusan Hibah (NPPH);

2. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah Tahun 2010 direncanakan sebesar Rp22.963.351.075.250, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Hingga akhir Tahun 2010 realisasinya dapat melampaui target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar Rp23.025.061.717.516 atau 100,27 persen.

Untuk lebih jelasnya, realisasi Pendapatan Daerah tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1
Realisasi Pendapatan daerah Tahun Anggaran 2010

No	Uraian	Rencana	Realisasi	
			Rp	%
1	2	3	4	5 (4:3)
1	Pendapatan Asli Daerah	12.315.398.272.250	12.969.114.969.129	105,31
2	Dana Perimbangan	10.006.090.000.000	9.540.485.770.387	95,35
3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	641.862.803.000	515.460.978.000	80,31
Jumlah		22.963.351.075.250	23.025.061.717.516	100,27

Sumber : BPKD Provinsi DKI Jakarta per 21 Maret 2011

Realisasi Pendapatan Daerah tersebut secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Pengelolaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Hingga akhir tahun 2010, dari rencana sebesar Rp12.315.398.272.250, realisasinya dapat melampaui target yang ditetapkan, yaitu sebesar Rp12.969.114.969.129 atau 105,31 persen.

Secara lebih rinci, realisasi Pendapatan Asli Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Pajak Daerah

Pajak Daerah terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, BBN Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Pengambilan Air Bawah Tanah, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Parkir yang ditargetkan sebesar Rp10.083.000.000.000 dan realisasinya sebesar Rp10.746.707.079.352 atau sebesar 106,58 persen dibandingkan dengan target. Realisasi sebagian besar pajak dapat melampaui target, kecuali Pajak Reklame hanya tercapai sebesar 93,83 persen dan Pajak Parkir tercapai sebesar 86,18 persen. Pencapaian pajak berdasarkan jenisnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.2
Realisasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2010

NO	URAIAN	RENCANA (RP)	REALISASI	
			Rp	%
1	2	3	4	5 (4:3)
1.	Pajak Kendaraan Bermotor	3.100.000.000.000	3.107.744.107.420	100,25
2.	BBN Kendaraan Bermotor	3.600.000.000.000	3.997.470.274.150	111,04
3.	Pajak Bahan Bakar Kend. Bermotor	700.000.000.000	727.327.812.376	103,90
4.	Pajak Pengambilan Pemanfaatan Air Bawah Tanah	150.000.000.000	156.686.949.102	104,46
5.	Pajak Hotel	650.000.000.000	741.920.141.445	114,14
6.	Pajak Restoran	770.000.000.000	879.006.791.180	114,16
7.	Pajak Hiburan	270.000.000.000	292.835.639.661	108,46
8.	Pajak Reklame	275.000.000.000	258.040.485.785	93,83
9.	Pajak Penerangan Jalan	418.000.000.000	456.404.649.471	109,19
10.	Pajak Parkir	150.000.000.000	129.270.228.762	86,18
JUMLAH		10.083.000.000.000	10.746.707.079.352	106,58

Sumber : BPKD Provinsi DKI Jakarta per 21 Maret 2011

2) Retribusi Daerah

Retribusi daerah dimaksudkan untuk menampung jenis penerimaan yang dikelola oleh SKPD, dan diperoleh karena pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, antara lain berupa retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perijinan tertentu. Secara keseluruhan pendapatan dari retribusi daerah direncanakan sebesar Rp407.910.000.000. Realisasi pendapatan retribusi sebesar Rp441.174.739.145 atau sebesar 108,15 persen, melampaui target yang direncanakan. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3
Realisasi Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2010

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2010 (Rp.)		%
		Rencana	Realisasi	
1	2	3	4	5(4:3)
I	Retribusi Jasa Umum	71.320.057.000	78.246.366.191	109,71
II	Retribusi Jasa Usaha	63.085.742.500	70.716.952.587	112,10
III	Retribusi Perizinan Tertentu	273.504.200.500	292.211.420.367	106,84
Jumlah		407.910.000.000	441.174.739.145	108,15

Sumber : BPKD Provinsi DKI Jakarta per 21 Maret 2011

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan direncanakan sebesar Rp 212.840.000.000, terdiri atas :

- Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah
- Penyertaan Modal Daerah kepada Pihak Ketiga
- Badan Pengelola
- Royalti
- Hasil Sewa Aset Daerah
- Hasil Kerjasama Aset Daerah

Hingga akhir tahun 2010, dapat direalisasikan Rp222.331.525.402 atau sebesar 104,46 persen. Pendapatan yang tidak mencapai target adalah dari Badan Pengelola dan Hasil Sewa Asset Daerah, sedangkan selebihnya dapat melampaui target, sebagaimana disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.4
Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Tahun Anggaran 2010

No	Uraian	Rencana (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5 (4:3)
1	Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah	37.902.371.399	39.268.262.730	103,60
2	Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga	168.137.628.601	6.500.000.000	3,87
3	Badan Pengelola	3.123.587.000	340.136.131	10,89
4	Royalty	143.788.000	153.410.000	106,69
5	Hasil Sewa Asset Daerah	1.050.000.000	81.000.000	7,71
6	Hasil Kerja sama Asset Daerah	2.482.625.000	160.000.000	6,44
Jumlah		212.840.000.000	222.331.525.402	104,46

Sumber : BPKD Provinsi DKI Jakarta per 21 Maret 2011

- 4) Pengelolaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
- Pengelolaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah direncanakan sebesar Rp1.611.648.272.250. Hingga akhir tahun 2010, realisasinya sebesar Rp1.508.863.981.296,91 atau sebesar 95,62 persen, yang secara keseluruhan dari masing-masing jenisnya belum mencapai target, sebagaimana dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel 3.5
Realisasi pengelolaan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Tahun Anggaran 2010

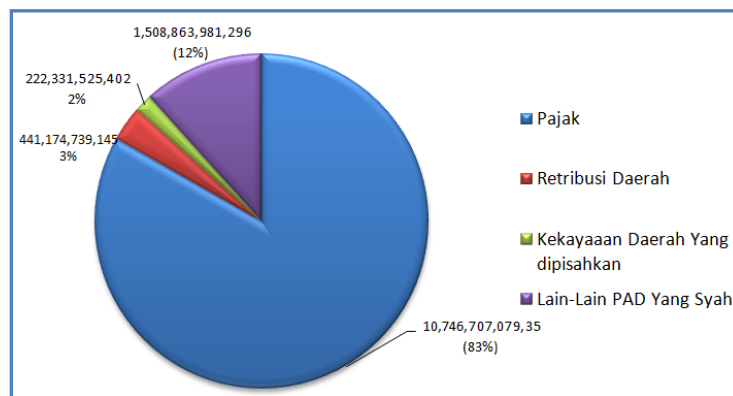
No	Uraian	Tahun Anggaran 2010		%
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi (Rp.)	
1	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	61.310.000.000	13.656.159.973	22,27
2	Hasil Penerimaan Pihak Ketiga	10.000.000.000	6.396.399.781	63,96
3	Sewa	7.800.000.000	6.132.339.977	78,62
4	Hasil Lelang Titik Reklame	55.000.000.000	48.764.115.188	88,66
5	Jasa Giro	130.000.000.000	176.552.892.158	135,81
6	Pendapatan Bunga	293.148.811.250	241.654.839.261	82,43

No	Uraian	Tahun Anggaran 2010		%
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi (Rp.)	
7	Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	15.000.000.000	22.284.123.145	148,56
8	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	1.200.000.000	186.098.241.796	15.508,19
9	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	10.000.000.000	2.496.157.481	24,96
10	Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjual	5.000.000.000	3.235.252.089	64,71
11	Pendapatan dari Badan Layanan Usaha Daerah	883.457.823.350	731.130.567.655	82,76
12	Sumbangan Jaminan Keselamatan di luar ja	4.500.000.000	5.442.600.498	120,95
13	Perjanjian Kerjasama Taman Marga Satwa Ragunan	1.500.000.000	142.334.400	9,49
14	Sumbangan dari Perum Jasa Raharja	8.500.000.000	7.810.478.000	91,89
15	Pemakaian rusun sederhana Marunda	250.000.000	762.979.000	305,19
16	Pemakaian rusun sederhana Kapuk	1.250.000.000	1.324.922.300	105,99
17	Pendapatan dari Pengembalian Setoran Gaji dan Tunjangan	61.589.767.650	0	-
18	Hasil Tagih Eks BPPN	-	4.640.430.685	
19	Pembayaran PDAM dan Listrik Rusun	1.600.000.000	2.738.220.564	171,14
20	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	500.000.000	487.526.109	97,51
21	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pela	-	489.306.300	-
22	Pendapatan Denda Pajak	50.841.870.000	84.175.091.873	165,56
23	Pendapatan Denda Retribusi	9.200.000.000	13.589.575.909	147,71
Jumlah		1.611.648.272.250	1.508.863.981.296	95,62

Sumber : BPKD Provinsi DKI Jakarta per 21 Maret 2011

Secara garis besar proporsi realisasi pendapatan daerah adalah sebagai berikut.

Gambar 3.1
Proporsi realisasi pendapatan daerah



Sumber : BPKD Provinsi DKI Jakarta per 21 Maret 2011

b. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat yang terdiri atas Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam.

Secara keseluruhan pendapatan dari Dana Perimbangan direncanakan sebesar Rp10.006.090.000.000 dengan realisasi Rp9.540.485.770.387 atau sebesar 95,35 persen, sebagaimana disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.6
Realisasi Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2010

No.	Uraian	Setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
I.	Bagi Hasil Pajak	9.906.090.000.000	9.401.489.956.192	94,91
a	Pajak Bumi dan Bangunan	2.250.000.000.000	2.466.979.548.319	109,64
b	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	1.800.000.000.000	2.023.214.911.427	112,40
c	Pajak Penghasilan	5.856.090.000.000	4.911.295.496.446	83,87
II.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	100.000.000.000	138.995.814.195	139,00
a	Iuran Hak Pengusahaan Hutan	-	731.427.038	
b	Pungutan Hasil Perikanan	1.448.692.228	800.007.986	55,22
c	Pertambangan Minyak Bumi	88.092.862.772	98.063.012.071	111,32
d	Pertambangan Gas Bumi	10.458.445.000	39.401.367.100	376,74
	Jumlah	10.006.090.000.000	9.540.485.770.387	95,35

Sumber : BPKD Provinsi DKI Jakarta per 21 Maret 2011

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berasal dari Bantuan Dana, Hibah untuk MRT dari Kementerian Keuangan, serta Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus (transfer untuk Guru Sertifikasi dan Non Sertifikasi). Secara keseluruhan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah direncanakan sebesar Rp641.862.803.000 dengan realisasi Rp515.460.978.000 atau sebesar 80,31 persen, sebagaimana dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.7
Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Tahun Anggaran 2010

No	Uraian	Tahun Anggaran 2010		%
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	
1	2	3	4	5 (4:3)
1	Pendapatan Hibah	41.000.000.000	0	0
2	Pendapatan Dana Darurat	0	0	0
3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	0	0	0
4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	600.862.803.000	515.460.978.000	85,79
Jumlah		641.862.803.000	515.460.978.000	80,31

Sumber : BPKD Provinsi DKI Jakarta per 21 Maret 2011

Berikut diuraikan rekap keseluruhan realisasi Pendapatan Daerah pada tabel berikut .

Tabel 3.8
Rekapitulasi Target dan Realisasi Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran 2010

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi	
			Rp	%
1	2	3	4	5 (4:3)
1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			
	-Pendapatan Pajak Daerah	10.083.000.000.000	10.746.707.079.352	106,58
	-Pendapatan Retribusi Daerah	407.910.000.000	441.174.739.145	108,15
	-Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg dipisahkan	212.840.000.000	222.331.525.402	104,46
	-Lain-lain PAD yang Sah	1.611.648.272.250	1.560.863.981.296	95,62
	Jumlah PAD	12.315.398.272.250	12.969.114.969.129	105,31
2.	Dana Perimbangan			
	a. Bagi Hasil Pajak	9.906.090.000.000	9.401.489.956.192	94,91
	- Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	2.250.000.000.000	2.466.979.548.319	109,64
	- Bea Peroleh Hak atas Tanah & Bangunan (BPHTB)	1.800.000.000.000	2.013.214.911.427	112,40
	- Pajak Penghasilan	5.856.090.000.000	4.911.295.496.446	83,87
	b. Bagi Hasil Bukan Pajak	100.000.000.000	138.995.814.195	139,00
	Hak Pengusahaan Hutan	0	731.427.038	
	Pungutan Hasil Perikanan	1.448.692.228	800.007.986	55,22
	Pertambangan Minyak Bumi	88.092.862.772	98.063.012.071	111,32
	Pertambangan Gas Bumi	10.458.445.000	39.401.367.100	376,74
	Jumlah Dana Perimbangan	10.006.090.000.000	9.540.485.770.387	95,35
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah			
	Pendapatan Hibah	41.000.000.000	0	0
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	600.862.803.000	515.460.978.000	85,79
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	641.862.803.000	515.460.978.000	80,31
	JUMLAH PENDAPATAN	22.963.351.075.250	23.025.061.717.516	100,27

Sumber : BPKD Provinsi DKI Jakarta per 21 Maret 2011

3. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan yang Dihadapi

Secara umum realisasasi pendapatan daerah pada tahun anggaran 2010 melebihi target yang direncanakan. Namun demikian masih terdapat beberapa hambatan dan kendala dalam merealisasikan target penerimaan pajak daerah, antara lain sebagai berikut :

1) Pajak Reklame

Tidak tercapainya target pajak reklame disebabkan antara lain :

- Diberlakukannya kebijakan pembatasan penyelenggaraan reklame pada wilayah kendali ketat dan penghentian sementara proses perizinan reklame pada prasarana kota
- Berkembang pesatnya alternatif media promosi sehingga terjadi peralihan penggunaan media luar ruang ke penggunaan media elektronik dan media massa
- Adanya peralihan domisili pool bus dari Jakarta ke wilayah Tangerang, Bekasi dan Bogor sehingga pajak reklame bus dipungut oleh wilayah setempat

2) Pajak Parkir

Realisasi pajak parkir yang tidak mencapai target antara lain disebabkan oleh masih rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak Parkir. Hal ini dapat terlihat dari kecenderungan untuk memilih parkir di tepi atau bahu jalan (*on street*) di sekitar gedung parkir daripada di dalam gedung (*off street*) yang tarifnya lebih mahal

b. Solusi

1) Solusi untuk meningkatkan pajak reklame

- Mengupayakan proses perizinan reklame pada prasarana kota dapat diselenggarakan kembali
- Melakukan penataan media promosi luar ruang dengan memperhatikan estetika kota agar lebih menarik dan diminati oleh investor

- 2) Solusi untuk meningkatkan pajak parkir
 - Melakukan penertiban parkir on street
 - Peningkatan pengawasan terhadap objek pajak parkir baru dan yang tutup
 - Pelaksanaan pemeriksaan terhadap objek pajak parkir yang setoran pajaknya tidak mencapai target
 - Pengawasan On-Line terhadap pajak parkir, sekaligus untuk mengatasi kendala kekurangan SDM untuk pemeriksaan Pajak Parkir.

B. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH

1. Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah

a. Kebijakan Umum Belanja Daerah

- 1) Belanja daerah disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD termasuk di dalamnya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang harus dicapai setiap tahunnya (*Performance-Based Budgeting*);
- 2) Memenuhi belanja wajib, antara lain TALI, Rekening Listrik PJU, *Tipping Fee*, Belanja Bantuan dan hibah, Belanja Utang Pokok Bunga, Belanja Pemungutan Pajak serta Belanja Tak Terduga;
- 3) Menjamin alokasi belanja *dedicated program* dan *multiyears* yang telah disetujui oleh DPRD;
- 4) Memfungsikan Walikota/Bupati sebagai koordinator penyusunan belanja langsung UKPD Wilayah di luar *dedicated*, TALI Kelurahan dan Kecamatan;
- 5) Mempertahankan alokasi anggaran urusan pendidikan lebih dari 20 persen dari belanja daerah;
- 6) Mengupayakan secara bertahap proporsi alokasi anggaran urusan kesehatan mencapai 15 persen dari belanja daerah;
- 7) Memenuhi alokasi anggaran untuk JPK Gakin sesuai dengan Perda Kesehatan;

- 8) Melakukan efisiensi belanja non fisik, dengan :
 - Meminimalkan belanja yang tidak langsung dirasakan pada masyarakat;
 - Melakukan penganggaran yang tepat (*proper budgeting*) melalui analisis rasio antara biaya dan manfaat (*cost benefit ratio*) dan tingkat efektivitas setiap program;
 - Melakukan kehati-hatian dalam pengeluaran (*prudent spending*) melalui pemetaan profil resiko atas setiap belanja kegiatan beserta perencanaan langkah antisipasinya.
- 9) Meningkatkan proporsi alokasi belanja pada tingkat Kota/Kabupaten, penguatan Kecamatan dan Kelurahan yang pelaksanaannya harus transparan sampai pada tingkat RW;
- 10) Semaksimal mungkin mengakomodir usulan kegiatan dari hasil Musrenbang Kelurahan sampai Provinsi;

b. Kebijakan Belanja Pegawai

Kebijakan Belanja Pegawai tahun 2010 antara lain :

- 1) Meningkatkan gaji PNS sebesar 5 persen, dan kenaikan untuk *acress* sebesar 2,5 persen;
- 2) Seluruh tunjangan yang bersifat lokal seperti TPP, Kesra, Tunjangan Khusus, dan lain-lain, dihapuskan dan diganti dengan remunerasi (Tunjangan Daerah), kecuali tunjangan yang tidak bisa dihindari;
- 3) Koordinasi Pamdal di 5 Wilayah Kota dan Kepulauan Seribu, berkoordinasi dengan BKD berkaitan dengan status kepegawaiannya dipindahkan dari Biro Umum ke Satpol PP

2. Target dan Realisasi Belanja

Dari rencana Belanja Daerah sebesar Rp 26.230.179.402.534 sampai akhir Tahun Anggaran 2010 telah dapat direalisasikan sebesar Rp 21.555.472.581.063 atau 82,18 persen.

Realisasi tersebut berasal dari Belanja Tidak Langsung (BTL) yang terealisasikan Rp 7.936.696.343.652 atau 91,45 persen dari rencana

sebesar Rp 8.678.446.480.519 dan dari Belanja Langsung (BL) yang terealisasi Rp 13.618.776.237.411 atau 77,59 persen dari rencana sebesar Rp 17.551.732.922.015.

Secara lebih rinci, realisasi Belanja Daerah pada tahun 2010 tersebut dapat di lihat pada Tabel 3.9.

Tabel 3.9
Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010

No	Kelompok/Jenis	Tahun Anggaran 2010		%
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2010	
1	2	4	5	6(5:4)
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	8.678.446.480.519	7.936.696.343.652	91,45
I	BELANJA PEGAWAI	8.084.568.190.330	7.476.950.353.976	92,48
	1. Gaji dan Tunjangan	3.373.373.480.775	3.161.758.566.698	93,73
	2. Tambahan Penghasilan PNS	3.869.390.286.744	3.485.676.096.675	90,08
	3. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD	26.073.260.720	25.071.418.105	96,16
	4. Belanja Pemungutan Pajak Daerah	161.432.359.091	161.432.359.091	100
	5. Biaya Kematian Pegawai	15.000.000.000	14.974.786.062	99,83
	6. Biaya Cuti Bersama Pegawai	0	0	0
	7. Biaya Guru NIP 15	38.436.000.000	37.676.000.000	98,02
	8. Belanja Penghasilan Lainnya	600.862.803.000	590.361.127.345	98,25
II	BELANJA BUNGA	9.946.000.000	7.421.194.046	74,61
	Bunga Utang Pinjaman	9.946.000.000	7.421.194.046	74,61
III	BELANJA HIBAH	433.653.000.000	423.468.762.400	97,65
	1. Belanja Hibah Kepada 2. Pemerintah Daerah			
	3. Belanja Hibah Kepada 4. Badan/Lembaga/Organisasi Swasta	411.803.000.000	404.438.909.900	98,21
	5. Belanja Hibah Kepada 6. Kelompok/Anggota 7. Masyarakat	21.850.000.000	19.029.852.500	87,09
IV	BELANJA BANTUAN SOSIAL	46.691.101.559	27.517.450.000	58,94
	1. Belanja Bantuan Sosial 2. Kepada Organisasi Sosial 3. Kemasyarakatan	46.691.101.559	27.517.450.000	58,94
	4. Belanja Bantuan Sosial 5. Kepada Partai Politik			
V	BELANJA BANTUAN KEUANGAN	1.350.000.000	1.338.583.230	99,15
	Belanja Bantuan Keuangan Kepada	1.350.000.000	1.338.583.230	99,15
VI	BELANJA TIDAK TERDUGA	102.238.188.630	0	0
	Belanja Tidak Terduga	102.238.188.630	0	0
	BELANJA LANGSUNG	17.551.732.922.015	13.618.776.237.411	77,59
I	BELANJA PEGAWAI	1.383.027.295.074	1.063.534.078.846	76,90
	Honorarium PNS	436.628.594.935	260.646.546.906	59,70
	Honorarium Non PNS	945.054.420.139	802.704.151.940	84,94
	Uang Lembur	1.344.280.000	183.380.000	13,64
II	BELANJA BARANG DAN JASA	8.536.652.896.366	7.312.130.149.267	85,66
III	BELANJA MODAL	7.632.052.730.574	5.243.112.009.298	68,70
	Jumlah	26.230.179.402.534	21.555.472.581.063	82,18

Sumber : BPKD Provinsi DKI Jakarta per 21 Maret 2011

Berkaitan dengan Belanja Modal. secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Belanja Tanah

Realisasi Belanja Tanah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp 789.628.585.455 atau 41,45 persen dari rencana sebesar Rp 1.905.115.920.706 sehingga terdapat sisa Rp 1.115.487.335.251.

b. Belanja Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp 1.814.555.325.146 atau 80,55 persen dari rencana sebesar Rp 2.252.789.380.616 sehingga terdapat sisa Rp 436.713.052.648.

c. Belanja Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp 1.272.971.144.201 atau 82,48 persen dari rencana sebesar Rp 1.543.309.467.706 sehingga terdapat sisa Rp 270.332.823.505.

d. Belanja Jalan. Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Jalan. Irigasi dan Jaringan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp 1.162.424.531.636 atau 70,35 persen dari rencana sebesar Rp 1.652.235.965.685 sehingga terdapat sisa Rp 489.776.746.549.

e. Belanja Aset Tetap Lainnya

Realisasi Belanja Aset tetap lainnya sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp 203.532.422.860 atau 73,05 persen dari rencana sebesar Rp 278.601.995.861 sehingga terdapat sisa Rp 76.590.575.823.

Tabel 3.10
Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2010

No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp.)	Realisasi 2010	%
1	2	3	4	5 (4:3)
	BELANJA MODAL			
1	Belanja Tanah	1.905.115.920.706	789.628.585.455	41,45
2	Belanja Peralatan dan Mesin	2.252.789.380.616	1.814.555.325.146	80,55
3	Belanja Gedung dan Bangunan	1.543.309.467.706	1.272.971.144.201	82,48
4	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.652.235.965.685	1.162.424.531.636	70,35
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	278.601.995.861	203.532.422.860	73,05
	Jumlah	7.632.052.730.574	5.243.112.009.298	68,70

Sumber : BPKD Provinsi DKI Jakarta per 21 Maret 2011

3. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Penyerapan Belanja Langsung yang relatif rendah terkendala antara lain oleh hal-hal sebagai berikut :

- Tidak cukup waktu untuk proses pelelangan dan pelaksanaan terhadap kegiatan yang baru diusulkan pada perubahan APBD namun belum didukung dengan perencanaan dan administrasi yang diperlukan.
- Terjadinya gagal lelang dalam pengadaan barang dan jasa sehingga perlu dilakukan lelang ulang yang menyebabkan kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena kendala sisa waktu yang tidak mencukupi.
- Beberapa belanja untuk pembebasan lahan tidak bisa dilaksanakan karena menghadapi kendala seperti bukti kepemilikan yang tidak lengkap, status pemanfaatan yang belum jelas, lahan dikuasai pihak lain atau sengketa, kesepakatan

harga yang tidak tercapai, ketidak sesuaian dengan rencana teknis, adanya kesalahan administrasi serta belum diterbitkannya SK Penguasaan Lahan karena memerlukan waktu untuk meneliti kesesuaiannya dengan rencana tata ruang.

- Keterlambatan pengadaan barang karena memerlukan komponen impor.

Adapun penjelasan secara lengkap kegiatan yang tidak terserap dapat dilihat pada lampiran buku LKPJ ini.

b. Solusi :

- Pemantauan yang ketat terhadap realisasi penyerapan anggaran dan kinerja output secara berkala dengan menggunakan *e-Monev*.
- Upaya advokasi kepada Pemerintah Pusat untuk percepatan Undang-undang tentang pengadaan lahan untuk pembangunan
- Melaksanakan pembebasan lahan dengan proses konsinyasi
- Berkoordinasi dengan BPKP untuk menetapkan status tanah
- Dalam hal pembebasan tanah akan diupayakan untuk memprogramkan pembebasan hanya terhadap lahan-lahan yang memiliki data-data yang lengkap.

C. PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAERAH

1. Kebijakan Pembiayaan

Untuk komponen penerimaan daerah direncanakan diperoleh dari Sisa Lebih Perhitungan APBD (SiLPA) Tahun 2010 dan tidak menggunakan Dana Cadangan Daerah (DCD). Untuk memproyeksikan SiLPA Tahun 2010. diasumsikan tidak terjadi pelampauan target pendapatan Tahun 2010 dan penyerapan belanja diperkirakan sekitar 82,19 persen. Dengan asumsi tersebut. maka SiLPA Tahun 2009 yang dapat digunakan untuk penerimaan Tahun 2010 diperkirakan sebesar Rp 3.748.512.147.298.

Sementara itu untuk komponen Pengeluaran Daerah. terdiri dari Penyertaan Modal Pemerintah kepada PT. Dharma Jaya sebesar Rp 15.000.000.000 ; PT. MRT Jakarta sebesar Rp 25.000.000.000 ; Pembayaran Utang Pokok Yang Telah Jatuh Tempo sebesar Rp 24.683.619.364 ; PD. PAL JAYA sebesar Rp 20.000.000.000 dan PT. Bank DKI sebesar Rp 20.000.000.000.

2. Target dan Realisasi Pembiayaan

a. Penerimaan Daerah

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah hanya berasal dari Sisa Lebih Perhitungan APBD (SiLPA) tahun 2009 dan tidak menggunakan Dana Cadangan Daerah (DCD). Adapun SiLPA yang digunakan mencapai Rp 3.748.512.147.298 dengan realisasi sesuai rencana.

b. Sumber Pengeluaran Daerah.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah dilakukan untuk pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo dan Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) pada Perusahaan Daerah.

Pembayaran pokok hutang yang jatuh tempo sebesar Rp 24.712.546.000 untuk :

- (1) Pembayaran Hutang IBRD 3219 SLA 529 sebesar Rp 2.823.851.000.
- (2) Pembayaran Hutang IBRD 3246 SLA 538 sebesar Rp 10.650.000.000.
- (3) Pembayaran Hutang OECF IP 346 SLA 614 sebesar Rp 2.002.672.000.
- (4) Pembayaran Hutang OECF IP 365 SLA 650 sebesar Rp 1.056.023.000.
- (5) Pembayaran Hutang OECF IP 414 SLA 876 sebesar Rp 8.180.000.000.

Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) direncanakan sebesar Rp 290.000.000.000 namun sampai akhir tahun 2010 hanya terealisasi sebesar Rp 80.000.000.000. Sisa dana sebesar Rp 210.000.000.000 yang dialokasikan untuk PT. KBN tidak teralisasi karena hingga batas akhir tahun 2010 belum ada Perdanya.

3. Permasalahan dan Solusi

Rendahnya realisasi pengeluaran pembiayaan disebabkan karena keterlambatan proses legal di Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). sehingga penerbitan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) yang telah dianggarkan sebesar Rp 210.000.000.000 tidak dapat ditetapkan.

Kedepan diperlukan upaya untuk meningkatkan koordinasi antara para pemangku kepentingan dan para pemangku kebijakan dalam rangka mencari solusi terbaik

D. DANA CADANGAN DAERAH

Posisi Dana Cadangan Daerah (DCD) sampai dengan bulan Desember 2010 sebesar Rp 736.458.938.290. di tambah dengan bunga deposito periode bulan Januari 2011 sebesar Rp 4.378.399.669 maka posisi DCD sampai dengan Januari 2011 menjadi sebesar Rp 740.837.337.959. DCD tersebut di depositokan pada Rekening Bank BRI sebesar Rp 446.116.628.545 dan Rekening Bank DKI sebesar Rp 294.720.709.414.

E. IKHTISAR APBD PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2010

Tabel 3.11
Ringkasan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2010

URAIAN	PENETAPAN 2010	PERUBAHAN 2010	Realisasi	%
Pendapatan Asli Daerah	11.824.970.000.000	12.315.398.272.250	12.969.114.969.129	105,31
A. Pajak Daerah	9.855.150.000.000	10.083.000.000.000	10.746.707.079.352	106,58
B. Retribusi Daerah	436.820.000.000	407.910.000.000	441.174.739.145	108,15
C. Laba Usaha Daerah	212.840.000.000	212.840.000.000	222.331.525.402	104,46
D. Lain-Lain PAD Yang Sah	1.320.160.000.000	1.611.648.272.250	1.508.863.981.296	95,62
Dana Perimbangan	10.306.090.000.000	10.006.090.000.000	9.540.485.770.387	95,35
A. Bagi Hasil Pajak	10.086.310.000.000	9.906.090.000.000	9.401.489.956.192	94,91
B. Bagi Hasil Bukan Pajak	219.780.000.000	100.000.000.000	138.995.814.195	139
C. DAU	0	0	0	0
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	41.000.000.000	641.862.803.000	515.460.978.000	80,31
PENDAPATAN	22.172.060.000.000	22.963.351.075.250	23.025.061.717.516	100,27
BELANJA	24.285.347.454.000	26.230.179.402.534	21.555.472.581.063	82,18
Surplus/(Defisit)	(2.113.287.454.000)	(3.266.828.327.284)	1.469.589.136.453	
PEMBIAYAAN	2.113.287.454.000	3.266.828.327.284	3.439.017.828.936	105,27
Penerimaan Pembiayaan	2.500.000.000.000	3.748.512.147.298	3.748.512.147.298	100
SiLPA	2.500.000.000.000	3.748.512.147.298	3.748.512.147.298	100
Pengeluaran Pembiayaan	386.712.546.000	481.683.820.014	309.494.318.362	64,25
A. Penyertaan Modal Pemerintah	235.000.000.000	290.000.000.000	80.000.000.000	27,59
B. Pemberian Pinjaman Daerah	127.000.000.000	127.000.000.000	127.000.000.000	100
C. Pembayaran Utang Pokok	24.712.546.000	24.712.546.000	24.683.619.364	99,88
APBD	24.672.060.000.000	26.711.863.222.548		

Sumber : BPKD Provinsi DKI Jakarta per 21 Maret 2011

F. PERHITUNGAN SiLPA TAHUN 2010

Tabel 3.12
Perhitungan SiLPA Tahun Anggaran 2010

No	Deskripsi	Rp	Rp
1.	Realisasi Pendapatan	23.025.061.717.516	
2.	Realisasi Penerimaan Pembiayaan	3.748.512.147.298	
A			26.773.573.864.814
3.	Realisasi Belanja	21.555.472.581.063	
4.	Realisasi Pengeluaran Pembiayaan	309.494.318.362	
B			21.864.966.899.425
SiLPA (A-B)			4.908.606.965.389

BAB IV

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2007-2012 dan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Ibukota Jakarta Nomor 83 Tahun 2009 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2010, yang meliputi Program *Dedicated* dan Program-Program Urusan Pemerintahan. Adapun hasil-hasilnya antara lain:

A. PROGRAM *DEDICATED*

Program *Dedicated* merupakan program prioritas yang bersifat menyentuh langsung kepentingan publik, bersifat monumental, lintas urusan, berskala besar dan memiliki urgensi yang tinggi serta memberikan dampak luas pada masyarakat.

Untuk Program *Dedicated* tahun 2010, *output* yang dihasilkan antara lain:

1. Pengendalian Banjir

a. Program Pembebasan Tanah Kanal Banjir Timur (KBT)

Bertambahnya luas tanah KBT yang dibebaskan seluas 106.179 m² (koridor basah 15.496 m² dan koridor kering 90.683 m²), sehingga pada tahun 2010 total tanah yang telah dibebaskan menjadi 2.744.875,1 m² yang terdiri dari koridor basah seluas 2.136.385,5 m² dan koridor kering seluas 608.489,6 m².

b. Program Normalisasi Sungai dan Saluran

- Terlaksananya Peningkatan Sistem Tata Air Kawasan Kampung Bandan untuk saluran drainase sepanjang 1.104 m, kurasan saluran sepanjang 462 m, dan Pintu Air sebanyak 1 buah
- Terlaksananya Penyelesaian Sistem pompa Air Cideng dengan rincian pelaksanaan diantaranya pengadaan Pompa 4 set beserta

fasilitasnya, Pengadaan Saringan Sampah 4 unit, dan pengadaan generator set 1 unit.

- Terlaksananya Peningkatan Kapasitas *Sheet Pile Long Storage* Kali Siantar dan Kali Cideng sepanjang 1.100 m

c. Program Penataan dan Pembangunan Situ, Waduk dan Polder

- Terbangunnya Polder Kampung Bandan meliputi pengadaan pompa 3 set beserta fasilitasnya, pengadaan saringan sampah 3 set, pengadaan generator set 1 unit, dan pembangunan rumah pompa 1 buah.
- Terlaksananya Perluasan dan pembangunan turap Situ Babakan dengan rincian pelaksanaan yaitu perluasan situ sebesar 13,29 Ha, pembuatan pulau didalam situ 2,26 Ha, turap sekeliling situ sepanjang 567 m, jalan inspeksi sekeliling situ sepanjang 1.943 m, saluran drainase sekeliling situ sepanjang 1.053 m, dan turap sekeliling pulau 1351 m
- Terlaksananya Pembangunan Pump Gate Kapuk Poglar dengan rincian pelaksanaan diantaranya fasilitas pompa 3 set, fasilitas saringan sampah 3 set, dan pembangunan Pump Gate 1 unit
- Terbangunnya Pintu Air Jembatan Merah dengan rincian pelaksanaan diantaranya pemasangan 4 unit pintu air utama, dan pengadaan serta pemasangan 2 unit pintu air pelimpah
- Terlaksananya Penyelesaian Pompa Kapuk I dan II Lanjutan berupa pemasangan 7 unit pompa, 3 unit pintu air, 2 unit generator dan pembangunan 2 unit rumah pompa
- Terlaksananya Pembangunan *Sheet Pile Long Storage* Kapuk Poglar sepanjang 1.152 m dan Turap Batu Kali sepanjang 123 m
- Terbangunnya pompa Tomang dengan berupa 1 unit rumah pompa, 3 unit pompa beserta fasilitasnya, 1 unit saringan sampah dan 1 unit generator

2. Pembangunan Perhubungan dan Transportasi

a. Pembangunan Terminal Bus Pulo Gebang

Telah dimulainya persiapan Pembangunan Terminal Pulo Gebang yang meliputi redesign Pembangunan Terminal Pulo Gebang, pelaksanaan lelang, dan penanda tanganan kontrak dengan pihak ketiga

b. Peningkatan Angkutan Umum Penyeberangan dari dan ke Kepulauan Seribu

- Terlaksananya pembangunan *breakwater* di Muara Angke sepanjang 650 m pada tahun 2010, sehingga total panjang pembangunan *breakwater* menjadi 2.040 m
- Terlaksananya pematangan lahan terminal pelabuhan Muara Angke dengan luas 6.750 m²
- Terlaksananya Pembangunan Dermaga Muara Angke sepanjang 182,5 m
- Pembangunan fasilitas penunjang Pelabuhan Muara Angke Tahap I (60 %) yang meliputi kantor dan ruang tunggu, lapangan parkir, jalan lingkungan, pedestrian, selasar, taman, pagar, gerbang, pos jaga, pengolahan limbah, jaringan air bersih, pengadaan *meubelair*, peralatan kantor dan alat komunikasi
- Terlaksananya pengerukan kolam pelabuhan 163.394,62 m³
- Terlaksananya pemeliharaan *docking* kapal penyebrangan sebanyak 6 kapal kerapu dan 2 kapal lumba-lumba

c. Peningkatan Pengelolaan Busway

- Terlaksananya pengoperasian 2 koridor baru busway (Koridor IX Pinang Ranti – Pluit dan Koridor X Cililitan – Tanjung Priuk), sehingga total berjumlah 10 koridor
- Bertambahnya armada busway sejumlah 94 unit (*articulated bus* = 25 unit dan *single bus* = 69) pada tahun 2010, sehingga total menjadi 524 bus

- Terlaksananya sterilisasi jalur busway pada 4 koridor yaitu Koridor I (Blok M-Kota), Koridor III (Terminal Kalideres-Harmoni), Koridor V (Kampung Melayu-Ancol), dan Koridor VI (Ragunan-Laturharhari)
- Terlaksananya perluasan halte busway sebanyak 6 (enam) halte di koridor I
- Terlaksananya perawatan fasilitas pendukung busway pada 3 koridor
- Terlaksananya Pembangunan 25 unit portal yang ditempatkan pada Koridor IV sebanyak 4 unit, Koridor V sebanyak 6 unit dan Koridor VI sebanyak 15 unit
- Terlaksananya perbaikan/penyempurnaan fasilitas keselamatan busway koridor I – X, meliputi pagar median jalan, dan *traffic light*
- Terlaksananya penyempurnaan marka dan tanda jalan dikawasan koridor I – VII
- Terlaksananya penyempurnaan/perbaikan lampu lalu lintas pada koridor I – X
- Terlaksananya perbaikan/pemeliharaan halte busway koridor I - X
- Terlaksananya penyempurnaan JPO busway sebanyak 2 koridor (JPO busway Pramuka LIA dan JPO Busway Pulo Mas)
- Terlaksananya perbaikan/pemeliharaan selasar busway Koridor I – X

d. Program pembangunan *fly-over* dan *underpass* (FO/UP).

- Terlaksananya pembangunan FO Bandengan Utara/Selatan dan FO Tubagus Angke (Rel KA) dalam rangka mendukung rencana pengembangan jalur kereta api lingkaran (*loop line*)

e. Program Optimalisasi, Perluasan dan Penambahan Jaringan Jalan

- Terlaksananya Pembebasan Tanah untuk Koridor MRT seluas 2.815 m² pada tahun 2010 dari total kebutuhan 11,23 Ha

- Terlaksananya Pembebasan Tanah Jalan Tembus & *Missing Link* (Jl. Asia Afrika, Teuku Nyak Arief, Tembus Kelapa Gading Menuju Terminal Pulo Gadung, Boulevard Timur Kelapa Gading, Bekasi Raya, Jl. Joglo Raya), seluas 9.207 m².
- Terlaksananya Inventarisasi & Pembebasan Tanah Jalan Boulevard Timur-Kelapa Gading seluas 4.573 m²
- Terlaksananya Pembebasan Tanah Jembatan Kalibata seluas 104 m²
- Terlaksananya Pembebasan Tanah FO Pramuka Kuadran Selatan Timur seluas 4.762 m²
- Terlaksananya Penyelesaian Pembangunan Jln Pintu Kecil, Jln. Pintu Besar Selatan, Jln. Pancoran dan Jln. Tembus Kemukus (Kawasan Kota Tua) , seluas 27.869 m².
- Terlaksananya Pematangan Tanah Pembangunan Jalan dan Saluran Pengaman sejajar KBT (Segmen Marunda-Rorotan), seluas 21.523 m²
- Terlaksananya Pematangan Tanah Pembangunan Jalan dan Saluran Pengaman sejajar KBT (Segmen Marunda – Rorotan - Cakung Timur), seluas 20.552 m²
- Terlaksananya Pematangan Tanah Pembangunan Jalan dan Saluran Pengaman sejajar KBT (Segmen Cakung Timur-Raya Bekasi), seluas 29.885 m²
- Terlaksananya Pembangunan Jalan Tembus Kelapa Gading/Boulevard Timur - Terminal Pulo Gadung seluas 13.959 m²

f. Program pembangunan Mass Rapid Transit (MRT)

- Tersusunnya *Basic Engineering Design* MRT
- Selesaiannya persiapan tender internasional untuk *technical assistance* yang dilaksanakan oleh PT. MRT Jakarta
- Selesaiannya *management consulting service* yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

- Terlaksananya pembangunan marka dan rambu lalu lintas di kawasan penunjang MRT
- Penataan *traffic light* di Kawasan Penunjang MRT
- Penataan halte di Kawasan Penunjang MRT

3. Penanggulangan Polusi dan Perubahan Iklim

a. Program pembangunan dan pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

- Terlaksananya pembangunan 2 taman interaktif (Jagakarsa dan Cililitan) dan 2 taman kota (Penjaringan dan Melawai)
- Tersusunnya DED pengembangan Taman Kebon Pisang di bawah Jalan Tol Bandara / Penjaringan
- Terbangunnya Taman Kota Kebon Pisang di Penjaringan

b. Polusi Udara

Tersedianya alat pemantau pencemaran udara sebanyak 4 unit

4. Peningkatan Kualitas Kebutuhan Dasar Masyarakat

a. Pelayanan Kesehatan Untuk Gakin dan KLB

- Meningkatnya pelayanan jaminan pemeliharaan kesehatan (JPK) dengan kartu Gakin pada Puskesmas sebanyak 1.890.248 kasus (2009) dan 2.109.367 (2010)
- Meningkatnya pelayanan JPK dengan kartu Gakin pada Rumah Sakit sebanyak 154.377 kasus (2009) dan 213.490 (2010)
- Meningkatnya pelayanan JPK dengan surat Keterangan Tidak mampu (SKTM) pada Rumah Sakit sebanyak 191.751 kasus (2009) dan 246.624 (2010)
- Menurunnya jumlah pelayanan JPK kasus bencana atau KLB pada Rumah Sakit sebanyak 21.868 kasus (2009) dan 15.957 (2010)

- Penyerapan anggaran JPK Gakin tahun (2009) 94.45% tahun (2010) 99,99 %, hal ini menunjukkan semakin baiknya proses administrasi *reimbursement claim* pelayanan kesehatan

b. Pelayanan Pendidikan

- Pada tahun 2009 pemberian BOP untuk siswa SDN/MIN sebanyak 695.894 siswa, dengan unit cost sebesar Rp. 60.000 /siswa/bulan dengan total Rp.501.043.680.000, sedangkan untuk tahun 2010 meningkat menjadi 700.564 siswa dengan unit cost tetap Rp. 60.000 /siswa/bulan dengan total Rp. 507.787.600.000
- Pada tahun 2009 pemberian BOP untuk siswa SMPN/MTsN sebanyak 247.556 siswa, dengan unit cost sebesar Rp. 110.000 /siswa/bulan dengan total Rp. 326.773.920.000 sedangkan untuk tahun 2010 meningkat menjadi 249.853 siswa dengan unit cost tetap sebesar Rp. 110.000 /siswa/bulan dengan total Rp. 330.438.930.000
- Pada tahun 2009 pemberian BOP untuk siswa SMAN/MAN sebanyak 92.226 siswa dengan unit cost sebesar Rp.25.000 /siswa/bulan dengan total Rp.27.667.800.000 sedangkan untuk tahun 2010 diberikan kepada 98.845 siswa dengan unit cost meningkat menjadi sebesar Rp.75.000 /siswa/bulan dengan total Rp. 88.960.500.000
- Pada tahun 2009 pemberian BOP untuk siswa SMKN sebanyak 42.745 siswa dengan unit cost Rp 150.000 /siswa/bulan dengan total Rp. 76.941.000.000 sedangkan untuk tahun 2010 untuk 43.314 siswa dengan *unit cost* tetap sebesar Rp. 150.000 /siswa/bulan dengan total Rp. 77.965.200.000

c. Peningkatan kualitas Permukiman dan Perbaikan Kampung

- Terlaksananya pembangunan Rusun Dinas Kebakaran Pegadungan dan Rusun Dinas Kebakaran Boker
- terselesaikannya pembangunan Rusun Pulogebang

- Terbangunnya Struktur 4 lantai (2 Blok) dan Struktur 1 Lantai (2 Blok) Rusun Waduk Pluit Jakarta Utara
- Terlaksananya pembebasan tanah lokasi rusun Jatinegara Kaum, Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur
- Terlaksananya program perbaikan kampung sebanyak 523 RW, yang terdiri dari 447 RW melalui program peningkatan kualitas permukiman dan 76 RW melalui program MHT Plus

5. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

a. Dana Bergulir

- Jumlah Dana bergulir yang telah tersedia dan berada pada rekening Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan (UPDB PEMK) total Rp 271.577.125.000 dengan rincian Tahun 2008 Rp.83.827.125.000, Tahun 2009 Rp.60.750.000.000 dan Tahun 2010 Rp.127.000.000.000 (bina ekonomi)
- Dana Bergulir yang telah disalurkan pada tahun 2010 sebesar Rp 139.434.000.000 untuk 57.954 Pemanfaat yang tersebar di 267 Kelurahan.

b. Bina Fisik dan Sosial

- Tersalurkannya dana bina sosial untuk 2.994 Kegiatan senilai Rp 44 Milyar di 267 Kelurahan
- Tersalurkannya dana bina fisik untuk 6.097 kegiatan senilai Rp 44 Milyar di 267 Kelurahan

6. Pengembangan Budaya Keragaman

a. Kota Tua

- Bertambahnya Konservasi fisik gedung museum sebanyak 3 gedung pada tahun 2009 dan 3 gedung museum pada tahun 2010, sehingga total menjadi 6 gedung museum

- Tertatanya ruang pameran museum sebanyak 2 museum pada tahun 2010
- Terlaksananya Festival atau *event* di Kota Tua sebanyak 2 kali pada tahun 2010
- Terlaksananya Festival Museum Sejarah pada tahun 2010
- Terlaksananya Pekan Museum Wayang pada tahun 2010
- Terlaksananya Konservasi koleksi museum pada tahun 2009 sebanyak 500 koleksi dan pada tahun 2010 sebanyak 3.000 koleksi

b. Perkampungan Budaya Betawi

- Terlaksananya pembebasan tanah Perkampungan Budaya Betawi seluas 2,5 Ha pada tahun 2010 dan 0,2 Ha pada tahun 2002 sehingga total 2,7 Ha
- Terlaksananya atraksi budaya Betawi pada tahun 2010 sebanyak 20 kali
- Terlaksananya konservasi fisik Gedung Induk dan Gedung Sayap Kiri dan Sayap kanan eks Kodim 0505 Jakarta Timur termasuk pemagaran dan perbaikan halaman
- Terlaksananya Penyelesaian Pembangunan Gedung Teater Jakarta dengan kapasitas 1.440 kursi penonton

7. Penerapan Kaidah Good Governance

a. e-Government

- Meningkatnya penerapan *e-announcement* dari 487 SKPD / UKPD (2009) menjadi 587 SKPD/UKPD (2010) pada 11.644 kegiatan
- Meningkatnya penerapan *e-regular tender* dari 100 SKPD (2009) menjadi 193 SKPD/UKPD (2010) pada 3.409 kegiatan

b. Komunikasi masyarakat melalui elektronik

- Berkurangnya SMS pengaduan warga dari 2.500 SMS menjadi 1.123 SMS
- Meningkatnya kunjungan *website* <http://jakarta.go.id> dari 1.000.000 pengunjung menjadi 2.005.706 pengunjung
- Meningkatnya kunjungan media online warta DKI “*beritajakarta.com*” dari 837.000 pengunjung menjadi 2.311.040 pengunjung

c. Integrasi Sistem Informasi

- Terintegrasinya sistem informasi perencanaan dan keuangan berbasis internet
- Berfungsinya sistem monitoring pelaksanaan APBD berbasis internet (*e-monev*) dan dapat diakses melalui *mobile device* (M-Gov)

8. Antisipasi Perubahan Iklim

Terlaksananya pembangunan tanggul pengaman pantai tahun 2010 untuk beberapa lokasi, diantaranya pembangunan tanggul di Cilincing sepanjang 1.050,05 m, pemecah gelombang di Cilincing sepanjang 546 m, pemecah gelombang Pantai Marunda sepanjang 290 m, pengaman pantai Pulau Harapan sepanjang 252 m, pengaman pantai Pasar Ikan Muara Baru sepanjang 386 m, dan pengaman pantai RE Martadinata sepanjang 180 m

B. PROGRAM PRIORITAS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN

1. Urusan Pendidikan

Untuk Urusan Pendidikan, pada tahun 2010 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.7.466.623.826.450 dan telah direalisasikan sebesar Rp 6.926.570.313.728 atau 92,77%.

Adapun *output* yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

a. Program wajib belajar 12 tahun,

- Terlaksananya program Kartu Gratis Sekolah/ Bantuan Rawan Putus Sekolah untuk 7.041 siswa miskin.
- Terlaksananya pemberian BOP untuk 1.123.178 siswa baik untuk TK Negeri, TKLB, SDLB, SMPLB, SMALB, SDN, SMPN, SMKN dan SMAN
- Terlaksananya Penerimaan Peserta Didik Baru secara *online* tingkat SMPN, SMAN dan SMKN

b. Program peningkatan mutu pendidikan,

- Terlaksananya pemberian Biaya Operasional Buku (BOB) untuk Sekolah Negeri yaitu di lingkungan SMAN sebanyak 91.886 siswa, SMKN sebanyak 41.848 siswa, dan MAN sebanyak 8.379 siswa
- Terlaksananya pembinaan dan pelaksanaan Olimpiade Sains (Matematika dan IPA) Nasional tingkat SD dan SDLB
- Terlaksananya UASBN (Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional) tingkat SD dan SMP
- Terlaksananya UN (Ujian Nasional) tingkat SMA dan SMK
- Terlaksananya pembinaan manajemen bagi 365 orang pengawas sekolah TK, SD, SMP, dan SLB
- Terlaksananya tes kemampuan bagi 480 orang calon Kepala Sekolah
- Terlaksananya program S1 dan sertifikasi bagi 799 orang guru SD dan SMP

c. Program pendidikan non formal dan informal,

- Terlaksananya pembinaan pendidikan kesetaraan yaitu paket A sebanyak 1.580 orang, paket B sebanyak 10.005 orang, dan paket C sebanyak 2.280 orang
- Terlatihnya keterampilan 350 orang di PKBM tingkat dasar/terampil

- Terlaksananya pemberantasan buta aksara sebanyak 5.400 orang

d. Program pendidikan luar biasa

- Terbinanya kompetensi keterampilan siswa SLB sebanyak 100 siswa
- Terselenggaranya lomba seni, olah raga dan science guru dan siswa SLB sebanyak 750 orang
- Pemberian subsidi bagi sekolah penyelenggara pendidikan inklusi sebanyak 5 sekolah Pusat Sumber Inklusi
- Terlaksananya biaya operasional pendidikan inklusi (berkebutuhan khusus) sebanyak 20 sekolah
- Terselenggaranya pusat kegiatan pendidikan inklusi (berkebutuhan khusus) sebanyak 20 sekolah

e. Program peningkatan sarana dan prasarana pendidikan

- Terlaksananya pembangunan Tahap I, terdiri dari 1 gedung baru SDN dan 1 gedung baru SMPN
- Terlaksananya penyelesaian rehab total, terdiri dari 2 gedung SDN, 4 gedung SMPN, dan 2 gedung SMAN
- Terlaksananya rehab total 1 gedung SDN
- Terlaksananya rehab total Tahap I untuk 21 gedung SDN dan 20 gedung SMPN
- Terlaksananya rehab berat 318 gedung sekolah untuk tingkat SDN hingga SMAN
- Pengadaan *meubelair* UGB/RKBSMA/SMAN sebanyak 68.032 unit

Adapun *outcome* yang dihasilkan dari pelaksanaan program pada urusan pendidikan antara lain:

- a. Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK dari 81,44% pada tahun 2009 menjadi 82,65% pada tahun 2010, serta

dipertahankannya APK pendidikan dasar di atas 100%, yaitu APK SD 110,92% dan APK SMP 105,91%

b. Menurunnya Angka Putus Sekolah

- Tingkat SD yang semula sejumlah 612 siswa pada tahun 2009 menjadi 584 siswa pada tahun 2010
- Tingkat SMA yang semula 943 siswa pada tahun 2009 menjadi 618 siswa pada tahun 2010

c. Meningkatnya angka kelulusan tingkat SD dari 99,7% (2009) menjadi 99,98% (2010), tingkat SMA dari 96,5% (2009) menjadi 99,11% (2010), dan untuk tingkat SMK dari 97,65% (2009) menjadi 99,77 % (2010), namun untuk tingkat SMP dipertahankan pada 99,8% (2010)

d. Tercapainya rata-rata nilai UAN di atas standar nasional, yaitu untuk tingkat SD 7.15, tingkat SMP 6.59, SMA 7.58, dan SMK 7.10

e. Dipertahankannya rata-rata lama sekolah 11,56 tahun

f. Meningkatnya dan dipertahankannya jumlah sekolah yang mendapat sertifikasi ISO 9001:2000

- SD tetap bertahan sebanyak 3 sekolah (2010)
- SMP dari 10 (2009) menjadi 11 (2010)
- SMA dari 22 (2009) menjadi 23 (2010)
- SMK dari 18 (2009) menjadi 31 (2010)

g. Prestasi yang diraih pada Olimpiade Sains Nasional, yaitu :

- Pada Tahun 2009 tingkat SD memperoleh Juara Umum/Juara I tingkat nasional (mendapatkan 1 medali emas dan *best overall*, 4 medali perak dan 1 perunggu) dan pada tahun 2010 kontingen DKI Jakarta dapat mempertahankan juara umum (Juara I) tingkat nasional dengan memperoleh 3 medali emas *best theory* dan *absolute winner* (matematika) serta 1 medali emas *experiment* (IPA), 1 medali perak (IPA), 1 medali perunggu (IPA)
- Pada Tahun 2009 tingkat SMP memperoleh 7 medali emas dan *best theory*, 10 medali perak dan 3 perunggu dan pada tahun 2010 kontingen DKI Jakarta 3 medali emas (Fisika), 1 medali emas (Matematika) dan 2 medali emas (IPS), 3 medali perak (Fisika), 3

medali perak (matematika), 1 medali perak (IPS), 2 medali perunggu (Fisika), 3 medali perunggu (Biologi), 1 medali perunggu (Matematika)

- Pada Tahun 2009 tingkat SMA memperoleh Juara Umum/Juara I tingkat nasional (mendapatkan 14 medali emas, 22 medali perak dan 20 perunggu) dan pada tahun 2010 kontingen DKI Jakarta memperoleh 1 medali emas *best theory* dan *absolute winner* (Fisika), 2 medali emas praktikum terbaik (Biologi), 1 medali emas *best theory* (Kimia), 1 medali emas *best theory* dan *best women contestant*, 1 medali emas (Astronomi), 1 medali emas (Ekonomi), 1 medali emas *best geosphere science* (Kebumian), 1 medali perak (Fisika), 4 medali perak (Biologi), 2 medali perak (Matematika), 3 medali perak (Kimia), 2 medali perak (Komputer/Informatika), 1 medali perak (Astronomi), 3 medali perunggu (Fisika), 4 medali perunggu (Biologi), 4 medali perunggu (Matematika), 3 medali perunggu (Kimia), 3 medali perunggu (Komputer), 4 medali perunggu (Astronomi), 7 medali perunggu (Ekonomi), 4 medali perunggu (Kebumian)
- Pada Tahun 2009 tingkat Pendidikan Luar Biasa (PLB) meraih medali emas dan *best theory* serta *overall*, serta medali emas bidang matematika dan bidang IPA dan pada tahun 2010 kontingen DKI Jakarta untuk jenjang SMPLB memperoleh 1 medali emas *best exploration* dan *absolute winner* (matematika), jenjang SDLB memperoleh 1 medali perak *best theory* (matematika), jenjang SDLB memperoleh 1 medali perunggu (IPA)
- Lomba Keterampilan Siswa (LKS) pada tahun 2009 kontingen DKI Jakarta meraih juara II dan pada tahun 2010 kontingen DKI Jakarta meraih juara I (juara umum) dengan perolehan 18 medali emas, 10 medali perak dan 3 medali perunggu
- Lomba Kelompok Belajar Mandiri (LOMOJARI) SMP Terbuka pada tahun 2009 meraih juara I dan tahun 2010 meraih juara I tingkat nasional

2. Urusan Kesehatan

Untuk urusan kesehatan pada tahun 2010 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 2.277.412.268.043 dan telah direalisasikan sebesar Rp 2.046.841.557.770 atau 89,88%.

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan kesehatan antara lain:

a. Program pencapaian dan penanggulangan penyakit menular

- Terlaksananya antisipasi dan penanggulangan KLB penyakit menular di Provinsi DKI Jakarta
- Terpantaunya penderita malaria import, *renew* dan *neglected disease* dan dapat ditangani 100%
- Terlaksananya *surveillance* penyakit menular berbasis puskesmas, rumah sakit dan laboratorium
- Terlaksananya pengendalian penyakit menular bersumber binatang
- Terlaksananya penanganan penyakit *Tuberculosis*
- Tersedianya obat penyakit menular
- Terpantaunya situasi penyakit potensial KLB di Provinsi DKI Jakarta selama 12 bulan
- Terlaksananya pengendalian dan pemantauan *cold chain*
- Terlaksananya manajemen pengelolaan vaksin
- Terlaksananya pencegahan dan penanggulangan faktor resiko DBD
- Terlaksananya pengobatan, dukungan dan perawatan bagi orang yang hidup dengan HIV dan AIDS (ODHA)

b. Program penurunan angka kematian ibu dan bayi

- Terselenggaranya peningkatan manajemen program KIA/KIBBLA sebanyak 60 Puskesmas dan Sudin Kesehatan
- Terlaksananya bimbingan, pengawasan dan pengendalian manajemen program kesehatan ibu dalam upaya penurunan angka

kematian ibu dan bayi sebanyak 28 kali yang dilakukan oleh Dinas dan Suku Dinas Kesehatan

- Terlaksananya monitoring dan evaluasi program KIBBLA pada 44 Puskesmas Kecamatan
- Terlaksananya supervise puskesmas PONED
- Terlaksananya pelatihan kelompok pendukung Ibu sebanyak 90 peserta
- Cakupan pertolongan persalinan oleh Bidan/Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan mencapai 91%

c. Program peningkatan kesehatan anak balita

- Terlaksananya perawatan terhadap seluruh balita gizi buruk sebanyak 170 kasus (100% dapat dirawat)
- Terlaksananya perawatan pemulihan balita gizi buruk melalui *Therapeutic Feeding Centre* (TFC) / Panti Pemulihan Gizi di Puskesmas Kecamatan Kalideres dan Puskesmas Kecamatan Jagakarsa
- Terlaksananya 2 kali pemberian kapsul vitamin A untuk anak balita di seluruh DKI Jakarta dengan total cakupan 62,83%
- Terlaksananya Universal Child Immunization (UCI) pada seluruh kelurahan
- Terlaksananya imunisasi dasar bayi lengkap 100%
- Tersedianya *buffer stock* MPASI tingkat Prov. DKI Jakarta untuk 50 bayi dan 175 anak
- Terlaksananya peningkatan kapasitas petugas dalam konseling menyusui untuk mendukung KP Ibu sebanyak 25 orang petugas
- Tersusunnya strategi peningkatan cakupan pemberian ASI Eksklusif, MPASI dan Vitamin A

d. Program pengembangan lingkungan sehat

- Terlaksananya pengendalian vektor penyakit

- Terlaksananya evaluasi pelaksanaan kesehatan lingkungan dan kesehatan kerja
- Terlaksananya pembinaan kota sehat pada tingkat kelurahan
- Terlaksananya pemantauan kualitas air bersih pada 5 wilayah kota

e. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

- Terlaksananya promosi kesehatan melalui berbagai media melalui:
 - Pameran kesehatan pada event PRJ
 - Media massa, cetak leaflet, spanduk, poster, banner
 - Media elektronik berupa *talk show* dan *radio spot*
- Terlaksananya pembinaan posyandu melalui penilaian kinerja tingkat Provinsi terhadap 4.185 posyandu
- Terlaksananya pembinaan UKBM melalui seminar bagi 100 orang Pembina UKBM dan pemberian ID Card bagi 10.000 kader
- Penambahan cakupan RW siaga aktif sebanyak 8%

f. Program pencegahan penyakit tidak menular

- Tersedianya pelayanan jantung di 44 Puskesmas dan 5 RSUD
- Terlaksananya pengendalian penyakit tidak menular
- Terselenggaranya pengembangan kelompok peduli penyakit tidak menular dan Posbindu di Masyarakat

g. Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan

- Terlaksananya peningkatan mutu dan layanan RSUD, AGD, Balai Kesehatan Karyawan, Laboratorium Kesehatan Daerah dan Akademi Keperawatan Jakarta
- Capaian pelayanan kesehatan yang telah mendapat Sertifikat ISO 9001:2008 yaitu:
 - RSUD dan UPT sebanyak 95,16%
 - Puskesmas Kecamatan sebanyak 100%
 - Puskesmas Kelurahan sebanyak 12,5%

h. Program pengawasan obat dan makanan,

- Tingkat pelaksanaan penyuluhan keamanan pangan dan sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga yang diproses sesuai ketentuan telah mencapai 100%
- Tingkat monitoring ketersediaan obat publik dan perbekalan kesehatan di wilayah mencapai 96%
- Terlaksananya fasilitasi farmasi pada 100 sarana farmasi.

i. Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM)

Terlaksananya pelayanan JPK Gakin lebih dari 2,5 juta kasus pada 44 puskesmas kecamatan, 295 puskesmas kelurahan dan 85 RS di Jakarta

j. Program peningkatan gizi masyarakat

- Terselenggaranya pembentukan dan pengembangan keluarga sadar gizi (KADARZI) melalui RW Siaga di 2 lokasi percontohan
- Pemberian makanan pendamping ASI dan vitamin pada balita terlaksana 100%.

k. Program kesehatan jiwa masyarakat

- Tersedianya pelayanan kesehatan jiwa di 44 Puskesmas Kecamatan
- Terlaksananya advokasi dan koordinasi pelayanan jarum suntik steril dan metadon bagi pengguna napza suntik
- Terselenggaranya pelayanan pertukaran jarum suntik steril (PJSS) di 8 Puskesmas Kecamatan dan pelayanan metadon di 12 Puskesmas Kecamatan

l. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit

- Terpeliharanya sarana dan prasarana RSUD Pasar Rebo, RSUD Tarakan, RSUD Budhi Asih, RSUD Duren Sawit, RSUD Cengkareng dan RSUD Koja
- Adanya peningkatan kapasitas tempat tidur di RSUD dari 1235 tempat tidur menjadi 1566 tempat tidur

m. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya

- Terlaksananya peningkatan kapasitas pelayanan rawat inap dan rawat jalan di Puskesmas
- Bertambahnya layanan rawat inap selain RB di Puskesmas Kecamatan Kebon Jeruk, Cengkareng, Tambora dan Jagakarsa
- Tingkat pelaksanaan *Quality Assurance* (QA) untuk memperoleh sertifikat ISO 9001:2000 pada Puskesmas Kecamatan mencapai 100%, sedangkan untuk tingkat Puskesmas Kelurahan 35%

Adapun *outcome* yang dihasilkan dari pelaksanaan program pada urusan kesehatan antara lain:

- a. Meningkatnya jumlah Puskesmas yang mendapatkan sertifikasi manajemen pelayanan ISO 9001:2008 dari 42 Puskesmas Kecamatan dan Kelurahan pada tahun 2009 menjadi 81 Puskesmas pada tahun 2010
- b. Angka kesakitan DBD meningkat dari 214,2/100.000 penduduk pada tahun 2009 menjadi 216,55/100.000 penduduk pada tahun 2010. Hal tersebut disebabkan karena kondisi iklim yang tidak menentu dan belum optimalnya kegiatan PSN
- c. Menurunnya angka prevalensi kurang gizi pada balita dari 12,9% (Riskesdas 2007) menjadi 11,3% (Riskesdas 2010)
- d. Menurunnya jumlah kematian ibu melahirkan dari 24 kasus (2009) menjadi 22 (2010)

- e. Mempertahankan pencapaian *case detection rate* TB sebesar 82%
- f. Meningkatnya jumlah kasus HIV/AIDS yang ditangani dari 79% tahun 2009 menjadi 81% pada tahun 2010. Hal ini disebabkan karena meningkatnya kesadaran masyarakat penderita untuk melapor diri
- g. Meningkatnya respon time kurang dari 24 jam penanganan kasus penyakit menular dan KLB dari 87% (2009) menjadi 90% tahun 2010
- h. Capaian Cakupan *Universal Child Immunization* (UCI) Kelurahan pada tahun 2010 sebesar 99,20% (tidak mencapai target 100%) lebih rendah dari tahun 2009 yang berhasil mencapai 100%, disebabkan adanya perbedaan perhitungan jumlah bayi pada dua kelurahan (Kel. Duri Utara Jakarta Barat dan Kel. Kuningan Jakarta Selatan) yg ditetapkan BPS dengan data real yang digunakan Dinas Kesehatan
- i. Meningkatnya jumlah RW siaga aktif dari 68% (2009) menjadi 76% pada tahun 2010

3. Urusan Pekerjaan Umum

Untuk urusan pekerjaan umum pada tahun 2010 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 5.163.747.570.179 dan telah direalisasikan sebesar Rp 3.850.935.038.210 atau 74,58%.

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan pekerjaan umum antara lain:

a. Program pengendalian banjir

- Terlaksananya Penyelesaian Sistem pompa Air Cideng dengan rincian pelaksanaan diantaranya pengadaan Pompa 4 set beserta fasilitasnya, Pengadaan Saringan Sampah 4 unit, dan pengadaan generator set 1 unit
- Terlaksananya pembangunan *Pump Gate* pada Saluran Penghubung dengan rincian pelaksanaan yaitu *Pump Gate* 8 unit, *Sumersible Pump* 2 unit, 1 unit rumah pompa, 1 unit rumah jaga, 3 unit rumah genset, 1 unit untuk rumah oktuator, 1 unit saringan sampah mekanis dan 3 unit saringan sampah manual.

b. Program Pengembangan Sistem Drainase

Terlaksananya Pembangunan Saluran Pembuang Komplek PU Pasar Jumat sepanjang 572 m.

c. Program Pemeliharaan dan Operasional Infrastruktur Pengendali Banjir, Drainase dan Irigasi

- Terlaksanakannya pembersihan saluran/kali sebanyak 144 lokasi di Provinsi DKI Jakarta
- Terlaksananya pemeliharaan 150 pompa, 7 saringan sampah dan 198 pintu air di 5 Kota Administrasi Jakarta
- Terlaksananya Pembuatan dan Pembersihan saluran di Jl. Thamrin, Jl. Wahid Hasyim, Jl. Sunda dan sekitarnya dengan rincian pelaksanaan yaitu 1 unit saringan sampah manual, *crossing saluran box culvert* sepanjang 801 m, 2 unit *pump gate* kapasitas 80 m³/menit, saluran koker sepanjang 225 m, saluran kantong lumpur 31,3 m dan kolam olakan sebesar 76,06 m²
- Terbangunnya Penanggulangan Sampah di Kali Angke Pesing sebanyak 1 buah.

d. Program Pengerukan dan Pemeliharaan Sungai

- Terlaksananya pengerukan sungai sepanjang 200.004 m³
- Terlaksananya pengerukan Waduk Setiabudi sepanjang 24.860 m³

e. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan,

- Terlaksananya pelebaran jembatan Jl. Jatinegara Timur 2 untuk mendukung penyempurnaan rute busway Koridor V
- Terbangunnya jembatan Akses Marunda dan jembatan Tanjung Duren
- Terlaksananya pembangunan jembatan Kalibata
- Terlaksananya pembangunan jalan layang non tol Kp. Melayu-Tanah Abang ruas Mas Mansyur - Dr. Satrio – Casablanca (Tahap

l) dan pembangunan jalan layang non tol Antasari - Blok M ruas Pasar Cipete - Wijaya I (Tahap I)

- Terlaksananya pelebaran jalan Perintis Kemerdekaan Bermis - Pulo Gadung seluas 846 m²
- Terlaksananya pelebaran jalan Kembangan Raya seluas 8.340 m²
- Terlaksananya pembangunan jalan TPnA dan TPA Cakung seluas 7.857 m²
- Terlaksananya peningkatan jalan menuju waduk pluit seluas 3.266 m²
- Terlaksananya pembebasan tanah jalan Kembangan Raya seluas 5.892 m²
- Terlaksananya pemeliharaan berkala wilayah DKI Jakarta dengan perincian Jakarta Pusat seluas 324.184 m², Jakarta Utara seluas 200.240 m², Jakarta Barat seluas 453.478 m², Jakarta Selatan seluas 393.461 m² dan Jakarta Timur seluas 424.640 m²
- Terlaksananya pemeliharaan rutin jalan Arteri/Kolektor di wilayah DKI Jakarta 377.088 m²
- Terlaksananya penanganan perbaikan sarana prasarana untuk penanggulangan kerusakan infrastruktur Jalan di DKI Jakarta seluas 34.104 m²
- Terlaksananya perbaikan jalan pada koridor busway seluas 260.611 m²
- Terlaksananya perbaikan 45 jembatan
- Terlaksananya perbaikan 1 *flyover* dan 13 *underpass*

- f. **Program pembangunan dan penataan bangunan gedung Pemda,**
Terselenggaranya pembangunan gedung DPRD (Blok G') Tahap I sebagai *green building* sesuai standart Indonesia dan perbaikan Gedung Blok G Balaikota Tahap II

g. Program penyediaan gedung untuk layanan publik dan pemerintahan

- Terlaksananya pembangunan Diklat Sarana Sosbud Islamic Center yang dapat diakses oleh penyandang cacat.
- Terlaksananya renovasi blok G sebagai *green building* standar Indonesia

h. Program peningkatan kinerja pengelolaan persampahan

- Terlaksananya pengelolaan sampah organik menjadi kompos sebesar 60 ton/hari di TPST Bantar Gebang
- Terolahnya sampah menjadi listrik (PLTSa) sebesar 8 MW dengan menggunakan teknologi GALFAD di TPST Bantar Gebang
- Diraihnya penghargaan Dharma Karya Energi dari Menteri ESDM untuk TPST Bantar Gebang
- Terlaksananya pengolahan sampah menjadi kompos sebesar 50 ton/hari di PDUK Cacing
- Terlaksananya pengepresan sampah sebesar 400 ton/hari yang mengakibatkan ritasi pengangkutan ke TPST sebesar 150 rit/hari
- Terlaksananya pengadaan bak container sampah 6 m³ dan 10 m³
- Terlaksananya pengelolaan sampah untuk 151 Pasar milik PD Pasar Jaya
- Terlaksananya jasa pengolahan sampah di TPST Bantar Gebang
- Terlaksananya swastanisasi kebersihan melayani 27 kelurahan di 5 wilayah kota
- Terlaksananya pembayaran *tipping fee* TPA Bantar Gebang untuk 1.847.675,25 ton sampah

i. Program peningkatan kebersihan kota

- Terlaksananya pengelolaan kebersihan menggunakan container tertutup yang dilengkapi dengan pipa dan bak penampungan air sehingga sampah tidak berceceran dan air sampah tertampung dengan baik

- Terlaksananya penanganan sampah pasar pada 151 pasar
- Terlaksananya pengelolaan kebersihan di lima wilayah kota melalui kerjasama dengan swasta meliputi swastanisasi kebersihan, penyewaan kendaraan angkutan sampah typer, sewa kendaraan angkutan sampah compactor dan pengangkutan sampah

j. Program penerapan 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*)

- Terlaksananya penerapan dan pembinaan 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*) di 13 lokasi percontohan
- terlaksananya sosialisasi kebersihan di lima wilayah kota
- terlaksananya lomba lingkungan bersih dan sehat

k. Program Pengembangan Penerangan Jalan dan Sarana Umum

- Terpenuhinya pengadaan armatur lengkap sebanyak 2.705 set dan komponen lepas 26.443 set
- Terlaksananya normalisasi jaringan untuk meterisasi di wilayah DKI Jakarta sebesar 868 Kwh
- Terlaksananya peningkatan kualitas penerangan pada Jalan Arteri 84% dari 262.000 yaitu 220.080 titik
- Bertambahnya pencahayaan kota pada jalan lingkungan di wilayah DKI Jakarta sebanyak 262.000 titik
- Terlaksananya penyempurnaan sarana PJU di koridor Busway
- Terlaksananya penataan pencahayaan kota pada sarana umum
- Terlaksananya pembangunan pencahayaan kota pada jalan MHT di wilayah DKI Jakarta sebanyak 4 paket dan tercapai 84%
- Terlaksananya pengadaan armatur dan komponen untuk penerangan jalan jalur MRT 1 paket
- Terlaksananya penyempurnaan sarana PJU di koridor busway

I. Program Pemeliharaan dan Operasional Penerangan Jalan dan Sarana Umum Kota

- Terlaksananya pemeliharaan perawatan penerangan jalan dan sarana umum serta penyediaan komponen untuk pemeliharaan di 5 wilayah kota
- Terlaksananya operasional sarana kelogistikan pada gudang pencahayaan kota
- Terlaksananya pencocokan dan penelitian tagihan rekening listrik
- Tersedianya data klarifikasi pembayaran rekening sesuai idepel peruntukannya
- Terlaksananya evaluasi program implementasi program meterisasi dengan pihak PLN sesuai MOU dan PKS yang disepakati
- Terlaksananya pembiayaan asuransi Gudang Sunter
- Terlaksananya pembayaran rekening listrik Penerangan Jalan Umum
- Terlaksananya pengadaan komponen lepas untuk pemeliharaan jalan kolektor di 5 wilayah kota.
- Terlaksananya pembiayaan asuransi Gudang Sunter
- Terlaksananya evaluasi program meterisasi untuk penghematan energi dan efisiensi pembiayaan rekening PJU

m. Program peningkatan regulasi energi dan sumber daya mineral

- Terlaksananya Forum Energi Daerah sebanyak 1 kali
- Terbitnya ijin perusahaan bidang energi
- Terlaksananya kegiatan penyusunan RAPERDA di bidang energi, listrik dan migas
- Terlaksananya pemanfaatan mineral zeolit untuk limbah industri
- Terlaksananya penerapan teknologi bahan galian batubara untuk bahan bakar industri
- Terlaksananya penyempurnaan peraturan di bidang energi, listrik dan migas

- Terlaksananya pengawasan pembangunan dan renovasi instalansi usaha hilir migas
- Terlaksananya sosialisasi pengamanan instalasi listrik pada rumah di lingkungan kumuh

n. Program peningkatan energi

- Terlaksananya evaluasi dan koordinasi pemanfaatan BBG
- Terlaksananya audit instalasi SPBU, SPBG dan sejenisnya serta SPBLPG yang telah beroperasi sebanyak 1 kegiatan
- Tersedianya kebijakan pengelolaan energi Jakarta
- Terlaksananya implementasi penggunaan *solar cell* untuk Penerangan Jalan Umum di 39 titik atau 60 lampu
- Terlaksananya pembangunan kabel bawah laut di Kepulauan Seribu Utara sebanyak 1 kegiatan

o. Program pengendalian air bawah tanah

- Terlaksananya pembangunan sumur resapan di wilayah DKI Jakarta
- Berfungsinya alat pemantauan amblesan tanah dengan ekstensometer sistem di stasiun jalan Tongkol dan jalan Perintis Kemerdekaan

p. Program penelitian tentang geologi, geofisik dan geokimia

- Terdapatnya data lokasi yang mengalami penurunan tanah
- Terbangunnya instalasi pengolahan air bersih dengan sistem *Reverse Osmosis* (RO)
- Terlaksananya pengukuran dan evaluasi penurunan tanah di Wilayah DKI Jakarta
- Terlaksananya pembangunan sistem pizometer di stasiun pemantau penurunan tanah di sekitar jalan Perintis Kemerdekaan

Adapun *outcome* yang dihasilkan dari pelaksanaan program pada urusan pekerjaan umum antara lain:

- a. Meningkatnya kecepatan volume air yang dipindahkan sebesar 30 m³/detik
- b. Berfungsinya kembali dan beroperasinya sarana prasarana pengendali banjir sesuai rencana
- c. Berfungsinya kembali pompa, pintu air dan saringan sampah sesuai rencana
- d. Tertanganinya sebagian pantai utara Jakarta dari rob setinggi \pm 2.5 m PP untuk dilokasi Cilincing, Pasar Ikan Muara Baru, Pantai Marunda, Pulau Harapan, dan RE. Martadinata
- e. Meningkatnya daya tampung saluran/kali sebesar 200.004 m³
- f. Meningkatnya aksesibilitas yang menghubungkan 2 tempat/titik sebanyak 5 lokasi
- g. Berfungsinya kembali jembatan sesuai rencana/standar
- h. Tercapainya tingkat kecepatan standar pada koridor busway sebesar 40 km/jam
- i. Jaringan jalan di DKI Jakarta yang kembali ke kondisi mantap menjadi 100%
- j. Tersedianya lahan untuk pembangunan/11 peningkatan jalan dan jembatan sebesar 27.503 m²
- k. Terlaksananya proses pengadaan barang dan jasa kegiatan Pembangunan kabel bawah laut di Kepulauan Seribu Utara (Kegiatan *Multiyears*, SK Gub No 1788 Tahun 2009)
- l. Terkendalinya Aquifer Dangkal di Wilayah DKI Jakarta
- m. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur sistem penerangan jalan lingkungan sebanyak 1043 titik lampu di lima wilayah kota administrasi DKI Jakarta

4. Urusan Perumahan Rakyat

Untuk urusan Perumahan Rakyat pada tahun 2010 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 568.248.994.976 dan telah direalisasikan sebesar Rp 401.700.052.437 atau 70,69%.

Adapun *output* yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan Perumahan Rakyat antara lain :

Program penyediaan perumahan rakyat

- Terlaksananya pembangunan Rusun Dinas Kebakaran Pegadungan dan Rusun Dinas Kebakaran Boker
- Terselesaikannya pembangunan Rusun Pulogebang
- Pembangunan Rusun Waduk Pluit Jakarta Utara dari 4 Blok terbangun 2 Blok Struktur 4 lantai, dan 2 Blok Struktur 1 Lantai

Adapun *outcome* yang dihasilkan dari pelaksanaan program pada urusan perumahan rakyat antara lain:

- a. Berfungsinya rusun Pulogebang sebanyak 100 unit
- b. Bertambahnya Rusunawa di DKI Jakarta sesuai dengan RPJMD 2012

5. Urusan Penataan Ruang

Untuk urusan Penataan Ruang pada tahun 2010 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 184.807.452.605 dan telah direalisasikan sebesar Rp 144.753.780.438 atau 78,33%.

Adapun *output* yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan Penataan Ruang antara lain:

a. Program sinkronisasi kebijakan pembiayaan, kelembagaan dan regulasi penataan ruang

- Tersusunnya UDGL Sentra Primer Baru Timur
- Tersusunnya UDGL koridor KBT
- Tersusunnya Panduan Rancang Kota Pengembangan Kawasan Koridor MRT
- Tersusunnya UDGL kawasan Cikini

- Terevaluasinya standar kebutuhan fasos/fasum

b. Program peningkatan pelayanan ketatakotaan

- Terencananya *trace* jalur MRT dari Lebak Bulus sampai dengan Dukuh Atas
- Terencananya *trace* jalur MRT dari Dukuh Atas sampai dengan Kota / Kampung Bandan
- Sertifikasi ISO 9001:2008 di 5 Seksi DTR Kecamatan
- Tersedianya Peta Topografi Skala 1 : 1000
- Terencananya Jalan Tembus (*Missing Link*) di Wilayah DKI Jakarta
- Terencananya *trace* Infrastruktur

c. Penataan dan pengawasan bangunan

- Terlaksananya 1141 kegiatan penertiban pembongkaran bangunan yang melanggar ketentuan
- Diterbitkannya IMB sejumlah 15.925 berkas, IPB sejumlah 388 berkas, dan KMB sejumlah 483 berkas

d. Peningkatan sarana dan prasarana penataan ruang

- Tersedianya peralatan bongkar 1 set
- Tersedianya 3 jenis alat ukur pengawasan penyelenggaraan bangunan gedung
- Tersedianya sistem database fasilitas pendidikan
- Tersedianya sistem database menara seluler

e. Program Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW),

- Tersedianya analisa dukungan kebijakan perencanaan tata ruang dan lingkungan hidup (Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI Jakarta 2030).
- Terlaksananya koordinasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Provinsi DKI Jakarta
- Terlaksananya diseminasi RTRW DKI Jakarta 2030

Adapun *outcome* yang dihasilkan dari pelaksanaan program pada urusan penataan ruang antara lain:

- a. Terlaksananya pelayanan publik yang efektif dan efisien serta yang memenuhi standar baku di 5 Suku Dinas Tata Ruang dan 20 Seksi Kecamatan Dinas Tata Ruang
- b. Tersusunnya kebijakan-kebijakan perkotaan yang memperhatikan daya dukung kota
- c. Tersedianya sarana dan prasarana perencanaan yang memadai dan mendayagunakan perkembangan teknologi terkini di 7 Kelurahan
- d. Tersertifikasinya pelayanan perizinan bangunan di Dinas P2B, Suku Dinas dan Kecamatan
- e. Terdaftarinya Dinas P2B sebagai Lembaga Inspeksi sesuai ISO 17020

6. Urusan Perencanaan Pembangunan

Untuk urusan Perencanaan Pembangunan pada tahun 2010 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 117.315.752.769 dan telah direalisasikan sebesar Rp 65.375.376.491 atau 55,73%.

Adapun *output* yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan Perencanaan Pembangunan antara lain:

a. Program perencanaan pembangunan perekonomian

- Terlaksananya monitoring dan evaluasi kinerja SKPD/UKPD di bawah koordinasi bidang Perekonomian
- Tersusunnya Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah (RKED) tahun 2010
- Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan bidang Ekonomi

b. Perencanaan pembangunan kesejahteraan rakyat

- Terlaksananya monitoring dan evaluasi kinerja SKPD/UKPD di bawah koordinasi bidang Kesmas

- Tersusunnya kajian evaluasi penyelenggaraan pendidikan dasar pada sekolah berstandar nasional dan RSBI
- Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan bidang Kesejahteraan Masyarakat (Kesmas)

c. Perencanaan pembangunan sarana prasarana kota

- Terlaksananya monitoring dan evaluasi kinerja SKPD/UKPD di bawah koordinasi bidang pembangunan sarana prasarana kota
- Tersusunnya kajian kebutuhan pembangunan dan pemeliharaan jalan serta kelengkapannya
- Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan bidang sarana prasarana kota

d. Perencanaan pembangunan lingkungan hidup

- Terlaksananya monitoring dan evaluasi kinerja SKPD/UKPD di bawah koordinasi bidang pembangunan lingkungan hidup
- Tersusunnya kajian analisa dukungan kebijakan perencanaan tata ruang dan lingkungan hidup serta kajian lingkungan hidup strategis Teluk Jakarta
- Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan bidang lingkungan hidup

e. Perencanaan pembangunan tata praja

- Terlaksananya monitoring dan evaluasi kinerja SKPD/UKPD di bawah koordinasi bidang tata praja
- Tersusunnya kajian dan evaluasi pelaksanaan program peningkatan kapasitas kecamatan dan kelurahan
- Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan bidang tata praja

f. Perencanaan pembangunan aparatur

- Terlaksananya monitoring dan evaluasi kinerja SKPD/UKPD di bawah koordinasi bidang aparatur
- Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan bidang aparatur

g. Pengelolaan perencanaan pembangunan daerah

- Tersusunnya draft Raperda tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah
- Tersusunnya LKPJ tahun 2009
- Tersusunnya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi DKI Jakarta tahun 2011
- Terlaksananya Musrenbang
- Tersusunnya Nota Kesepakatan KUA 2011 antara Gubernur dengan pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta
- Tersusunnya Nota Kesepakatan PPA 2011 antara Gubernur dengan pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta
- Tersusunnya RAPBD 2011
- Tersusunnya Nota Kesepakatan KUA Perubahan 2010 antara Gubernur dengan pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta
- Tersusunnya Nota Kesepakatan PPA Perubahan 2010 antara Gubernur dengan pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta
- Tersusunnya RAPBD-P 2010

Adapun *outcome* yang dihasilkan dari pelaksanaan program pada urusan perencanaan pembangunan, antara lain:

- a. Disampaikannya LKPJ sesuai ketentuan
- b. Ditetapkannya RKPD 2011 sesuai ketentuan
- c. Disampaikannya RAPBD-P 2010 sesuai ketentuan
- d. Disampaikannya RAPBD 2011 sesuai ketentuan

7. Urusan Perhubungan

Untuk urusan Perhubungan pada tahun 2010 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.245.371.728.033 dan telah direalisasikan sebesar Rp 1.060.457.234.734 atau 85,15%.

Adapun *output* yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan Perhubungan antara lain:

a. Program peningkatan pengelolaan terminal bis antar kota

- Terlaksananya pemeliharaan emplasemen terminal bus Pulo Gadung
- Terlaksananya pemeliharaan bangunan terminal bus di 10 lokasi terminal

b. Program pembangunan fasilitas perhubungan

- Berfungsinya lampu lalu lintas di 320 simpangpada 3 Zona
- Berfungsinya 41 *controller* unit lampu lalulintas
- Terlaksananya penggantian kabel tanah lampu lalulintas sepanjang 75.337 m
- Terlaksananya Pemeliharaan dan perawatan lampu lalu lintas pada zona 1, 2 dan 3

c. Program peningkatan pelayanan angkutan umum

- Beroperasinya 44 bis sekolah yang melayani 6 Rute (Kemayoran-Lapangan Banteng, Pulo Gadung - Tj. Priok, TMII – Kp. Melayu, Ps.Minggu – CSW/Keb. Baru, Cawang – Grogol, Cawang – Plumpang
- Terlaksananya survey asal tujuan angkutan bus sekolah untuk mengidentifikasi potensi lokasi asal tujuan perjalanan angkutan bus sekolah untuk pengembangan rute berikutnya

d. Program peningkatan kinerja jaringan lampu lalu lintas

Terlaksananya perbaikan lampu lalulintas di 10 Koridor Busway

e. Program peningkatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor dan sertifikasi perangkat telekomunikasi

- Berfungsinya 1 unit alat uji statis, 8 unit alat uji emisi kendaraan bermotor, dan 3 unit mobil pengujian kendaraan bermotor keliling
- Tersedianya buku uji sebanyak 83.500 buku dan tanda sampung untuk 206.024 kendaraan

f. Program pemberdayaan komunitas perhubungan

Operasional Dewan Transportasi Kota Jakarta

g. Pelaksanaan SPM lain urusan Perhubungan

Turut sertanya Dinas Perhubungan Prov. DKI Jakarta dalam Forum Transportasi Internasional

Adapun *outcome* yang dihasilkan dari pelaksanaan program pada urusan perhubungan antara lain:

- a. Meningkatnya jumlah masyarakat yang terlayani oleh angkutan umum busway dari 83,2 juta penumpang (2009) menjadi 86,9 juta penumpang (2010)
- b. Tersedianya betonisasi emplasemen Terminal Bus Senen yang dapat dimanfaatkan untuk kelancaran sirkulasi arus lalu lintas di dalam terminal seluas 3.750 m²
- c. Meningkatnya jumlah pelajar yang terlayani oleh angkutan Bus Sekolah dari 6.237 pelajar/hari (2009) menjadi 7.738 (2010) pelajar/hari
- d. Meningkatnya kemampuan pelayanan uji semula 80-100 kendaraan/hari (2008) menjadi 130-150 kendaraan/hari (2009) dan 150-250 kendaraan/hari (2010) untuk Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) di Cilincing dan data khusus tahun 2009 untuk PKB di Ujung Menteng 400-500 kendaraan/hari, Pulogadung 200-300 kendaraan/hari, Kedaung Angke 400-500 kendaraan/hari, Jagakarsa 200-300/hari

- e. Turut berperan aktifnya Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta pada Forum Transportasi Internasional di Tokyo (ANMC 21 Sektor Perhubungan)
- f. Tersedianya wilayah perairan yang aman untuk kegiatan sandar kapal di Pelabuhan Muara Angke, bertambahnya dermaga yang siap digunakan untuk sandar kapal, dan tersedianya ruang tunggu yang layak bagi penumpang di pelabuhan muara angke
- g. Bertambahnya fasilitas penunjang keselamatan busway dalam rangka mencegah atau mengurangi kejadian kecelakaan di jalur busway
- h. Berfungsinya dengan baik sistem lampu lalu lintas di 10 koridor busway
- i. Tersedianya marka dan rambu lalu lintas di kawasan penunjang MRT untuk memudahkan pengguna jalan dalam berlalu lintas di kawasan penunjang MRT

8. Urusan Lingkungan Hidup

Untuk urusan Lingkungan Hidup pada tahun 2010 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. Rp. 1.273.308.717.162 dan telah direalisasikan sebesar Rp 815.805.360.920 atau 64,07%.

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan Lingkungan Hidup antara lain:

a. Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup

- Terlaksananya pemantauan kualitas perairan dan muara Teluk Jakarta dan Kepulauan Seribu
- Terlaksananya penilaian 254 dokumen AMDAL
- Terlaksananya uji emisi terhadap 19.856 kendaraan

b. Program rehabilitasi dan pemulihan lingkungan hidup dan sumber daya alam

- Terlaksananya pengawasan dan penertiban pengawasan dan penertiban pemanfaatan air bawah tanah sebanyak 85 lokasi kegiatan usaha
- Terlaksananya pengawasan kegiatan Dewatering sebanyak 24 lokasi
- Terlaksananya pengawasan kegiatan pemboran air tanah dan monitoring AWLR untuk 159 pelanggan
- Terlaksananya kampanye kolam resapan, sumur resapan dan lubang resapan biopori di 5 (lima) wilayah Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta dengan jumlah peserta sebanyak 232 orang
- Terlaksananya pengadaan telemetri air dan meter air sebanyak 149 unit
- Terlaksananya Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) pada Minggu ke-2 dan minggu terakhir di ruas jalan Sudirman – Thamrin dan 2 kali setahun di 5 Kota Administrasi, yaitu di :
 - Jakarta Selatan : Jl. Rasuna Said
 - Jakarta Pusat : Jl. Letjen Suprpto
 - Jakarta Barat : Kawasan Kota Tua
 - Jakarta Utara : Jl. Boulevard Artha Gading
 - Jakarta Timur : Jl. Pemuda

c. Program peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup

- Bertambahnya teknisi uji emisi dari 568 pada tahun 2009 menjadi 610 pada tahun 2010 di 238 bengkel uji emisi yang disertifikasi
- Terlaksananya gerakan hemat air di provinsi DKI Jakarta dalam rangka Hari Air Dunia

d. Program Pembangunan dan Pemeliharaan Taman Kota

- Terpeliharanya areal taman seluas 1.487.415 m²

- Terpeliharanya areal jalur hijau seluas 1.274.030 m
- Terbangunnya sarana estetika kota 3 lokasi
- Terpeliharanya sarana estetika kota 61 lokasi
- Tertatanya lokasi-lokasi Ex-SPBU sebagai jalur hijau di 14 lokasi di 5 wilayah DKI Jakarta
- Terlaksananya kegiatan pengadaan lahan RTH sebanyak 23 lokasi yaitu di :
 - Jl. Simatupang (Lanjutan) (2.708 m²)
 - Jl. Pagelarang RT 06/01 Cipayung Jakarta Timur (29.330 m²)
 - Jl. Asafiyah/Swadaya II Kelurahan Cilangkap, Jakarta Timur (13.484 m²)
 - Jl. Arteri KBT Kelurahan Cakung Timur Jakarta Timur (9.969 m²)
 - Jl. Sepat I RT 010 RW 007, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan (7.154 m²)
 - Jl. Manunggal II RW 01 Kelurahan Ceger Kecamatan Cipayung, Jaktim (14.516 m²)
 - Jl. Bangau IV RT 001/03 Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan (16.832 m²)
 - Jl. Lebak Bulus 3 RT 017 RW 007, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan (3.429 m²)
 - Jl. Kumis Kucing Kelurahan Cibubur, Kecamatan Jakarta Timur (11.279 m²)
 - Kp. Karang Kendal RT 001/08 Kel. Rorotan, Kecamatan Cilincing (6.445 m²)
 - Jl. Poncol II Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak (891 m²)
 - Jl. Cilangkap RT 03/RW 04 Jakarta Timur (30.066 m²)
 - Kecamatan Makasar Jakarta Timur (5.095 m²)
 - Jl. Swakarsa II RT. 012/ RW 003, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur (268 m²)

- RT 006/RW 004 Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur (1.632 m²)
- Jl. Salemba Bluntas Gg. III RT. 008/RW 005 Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat (199 m²)
- Gg. Majelis Kebon Pala, Jakarta Timur (528 m²)
- Jl. Lampiri RT 007/05 Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur 2.126 m²)
- Jl. Raya PKP RT 008 RW 09 Kelurahan Kelapa Dua Wetan Kecamatan Ciracas Jakarta Timur (4.576 m²)
- Jl. Gerbang Sari Dalam RT 002 RW 05 Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur (4.648 m²)
- Jl. Ketapang RT 007 RW 002 Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan (1.966 m²)
- Jl. Kebagusan Dalam I RT 001/02 Kel. Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa , Jakarta Selatan (16.212 m²)
- Jl. Moch Kafi I RT 001/RW 02 Kel. Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan (942 m²)

e. Program peningkatan kualitas ruang terbuka hijau

- Terlaksananya pembebasan lahan untuk RTH Kehutanan di wilayah Jakarta Barat seluas 1,8 Ha
- Tersedianya pohon pelindung sebanyak 2.635 pohon dan tanaman hias sebanyak 5.370 pot
- Tertatanya taman seluas 64.763,12 m²
- Tertatanya areal jalur hijau seluas 14.716,04 m²

f. Program konservasi flora fauna

Terlaksananya pembangunan sarana arboretum mangrove berupa jalan kontrol dengan tiang pancang sepanjang 100 m

g. Program peningkatan pengelolaan pemakaman,

Tertatanya sarana dan prasarana TPU di 10 Lokasi, yaitu di TPU Kampung Kandang, TPU Tegal Alur, TPU Pondok Rangun, TPU Petamburan, TPU Karet Bivak, TPU Menteng Pulo, TPU Pondok Kelapa, TPU Tanah Kusir, TPU Jeruk Purut, TPU Karet Pasar Baru

h. Program peningkatan sarana dan prasarana lingkungan hidup,

Tersedianya peralatan uji laboratorium dan sarana penunjang laboratorium 21 jenis pada tahun 2010

i. Program Strategi Pembangunan Daerah terhadap Perubahan Iklim.

Tersusunnya rencana strategi tentang mitigasi dan adaptasi perubahan iklim

Adapun *outcome* yang dihasilkan dari pelaksanaan program pada urusan lingkungan hidup antara lain:

- a. Menurunnya tingkat pencemaran udara sebesar 6 % untuk parameter PM10; 9 % untuk parameter CO; 9 % untuk parameter NO2; dan 48 % untuk parameter SO2 dari tahun 2009 ke tahun 2010
- b. Bertambahnya kegiatan/usaha yang mendapatkan surat kelayakan lingkungan hidup sebanyak 184 kegiatan usaha pada tahun 2010
- c. Bertambahnya kegiatan/usaha yang memenuhi BMLC dari 160 tahun 2009 menjadi 300 pada tahun 2010
- d. Bertambahnya kawasan permukiman yang bersih, asri dan hijau dari 500 RW (2009) menjadi 750 RW (2010)
- e. Bertambahnya prosentase jumlah kendaraan yang lulus uji emisi dari 95 % (2009) menjadi 97% (2010)
- f. Bertambahnya lokasi penerapan Kawasan Dilarang Merokok (KDM) dari 82 lokasi (2009) menjadi 98 lokasi pada tahun (2010)
- g. Bertambahnya periode pemantauan kualitas udara roadside dari 22 periode menjadi continue sepanjang tahun di lokasi Bundaran HI

- h. Menurunnya tingkat pencemaran udara untuk parameter debu (PM10) 40%, Carbonmonoksida 68%, Nitrogen oksida 78%, dan Total Hidrokarbon 25% di kawasan HBKB
- i. Meningkatnya konservasi air tanah melalui berfungsinya sumur resapan sebanyak 83.064 buah, lubang resapan biopori sebanyak 3.120.000 titik dan sumur injeksi sebanyak 5 titik
- j. Bertambahnya kegiatan/usaha yang memenuhi BMLC (Baku Mutu Limbah Cair) dari 160 tahun 2009 menjadi 300 pada tahun 2010
- k. Meningkatnya penegakan hukum meliputi penyegelan terhadap 14 titik sumur dan pengecoran 63 titik sumur serta sanksi perdata terhadap 4 lokasi kegiatan usaha, proses penyidikan terhadap 4 kegiatan usaha/*laundry* dan penutupan saluran pada 26 kegiatan usaha
- l. Meningkatnya kualitas udara di dalam ruang di 98 lokasi di 5 wilayah administrasi
- m. Bertambahnya masyarakat yang memahami pengelolaan limbah padat (sampah) dari 500 orang tahun 2009 menjadi 750 pada tahun 2010
- n. Bertambahnya luas lahan taman yang dikuasai dari 10.33 Ha (2009) menjadi 18.43 Ha (2010)
- o. Bertambahnya luas taman yang dibangun dari 0.52 Ha (2009) menjadi 5.40 Ha (2010)
- p. Bertambahnya luas area jalur hijau kota yang terpelihara dari 76.46 Ha (2009) menjadi 127.4 Ha (2010)

9. Urusan Pertanahan

Untuk urusan Pertanahan pada tahun 2010 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 4.366.500.000 dan telah direalisasikan sebesar Rp 2.253.376.726 atau 51,61%.

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan Pertanahan antara lain:

Program pendataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T)

- Tersedianya otomasi data P 4 T untuk 7 Kelurahan
- Tersedianya data P4T tahun 2003/2004 untuk 1 wilayah
- Terintegrasinya Data P4T Tahun 2003 - 2004

Adapun *outcome* yang dihasilkan dari pelaksanaan program pada urusan pertanahan antara lain:

Terselenggaranya kegiatan observasi, pemetaan dan evaluasi terhadap perkembangan pembangunan di lapangan.

10. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

Untuk urusan Kependudukan dan Catatan Sipil pada tahun 2010 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 114.047.183.113 dan telah direalisasikan sebesar Rp 84.683.204.400 atau 74,25%.

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan Kependudukan dan Catatan Sipil antara lain:

a. Pengawasan dan penegakan peraturan kependudukan

- Tersedianya buku register penghuni rumah kost dalam pelaksanaan pembinaan dan pendataan penghuni dan pengelolaan rumah kost dan apartemen
- Terlaksananya Operasi Yustisi Kependudukan di 24 lokasi, menjaring 3.976 orang, disidangkan 2.922 orang serta 496 orang dibebaskan
- Terlaksananya pendataan arus mudik/balik Idul Fitri 1431 H terhadap 3.291.492 orang mudik, serta 3.350.707 orang balik
- Terlaksananya penertiban dokumen adminduk terhadap 414 orang asing dan pemantauan mobilitas serta persebaran orang asing pada 22 perusahaan
- Terlaksananya pendataan penduduk rentan adminduk bagi 1.243 orang

- Terlaksananya pelaksanaan kegiatan terpadu Penanganan Urbanisasi dalam Wadah Tim Koordinasi Penanganan Urbanisasi (Tim Kopur)
- Terlaksananya pencatatan perkawinan luar balai sebanyak 5.764 pasang

b. Peningkatan mutu layanan kependudukan dan catatan sipil,

- Terlaksananya *workshop* pencatatan sipil dan *vital statistic*
- Terlaksananya verifikasi dan validasi pelayanan administrasi kependudukan secara *mobile*
- Terlaksananya pengembangan dan integrasi pelayanan pencatatan kelahiran dengan kesehatan melalui penerapan e-akta
- Terlaksananya pembangunan aplikasi monitoring hasil data pelayanan kependudukan berbasis web pada 267 Kelurahan
- Terlaksananya pembuatan aplikasi pelaporan perkawinan dan perceraian catatan sipil dan KUA berbasis web
- Terlaksananya pengadaan lisensi *software* dan *Several Development Kit* (SDK) sebanyak 45 unit
- Terlaksananya pengadaan sarana sosialisasi dan informasi kependudukan dalam bentuk leaflet sebanyak 10.000 eksemplar dan spanduk sebanyak 275 buah

c. Program peningkatan pengelolaan administrasi kependudukan,

- Terlaksananya dialog interaktif dalam rangka Renstra Anak 2011
- Terlaksananya sosialisasi peraturan pencatatan sipil bagi pemuka agama
- Terlaksananya bimbingan teknis pelaksanaan peraturan kependudukan dan pencatatan sipil bagi Kepala Satuan Pelayanan Registrasi Kependudukan Kelurahan seprovinsi DKI Jakarta
- Terlaksananya pendataan orang asing pemegang ITAS sebanyak 38.992 orang

d. Program Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)

- Tersedianya perangkat *router* dan HUB sebanyak 5 (lima) unit
- Terlaksananya pengembangan Infrastruktur dan aplikasi pemanfaatan NIK Nasional
- Terlaksananya kostumisasi layanan SIAK untuk mencegah penerbitan NIK Nasional ganda di Jabodetabek
- Terlaksananya pengembangan aplikasi logistik SIAK untuk mengadministrasikan sarana dan prasarana pelayanan kependudukan

Adapun *outcome* yang dihasilkan dari pelaksanaan program pada urusan kependudukan dan catatan sipil, antara lain :

- a. Meningkatnya pelayanan KTP dari 25.658 KTP (2009) menjadi 1.607.536 KTP (2010) dan 22.854 KK (2009) menjadi 781.221 KK (2010) melalui penerapan SIAK/NIKNAS
- b. Meningkatnya pelayanan penerbitan KTP dari 270 KTP (2009) menjadi 31.141 KTP (2010) melalui mobil keliling
- c. Meningkatnya kepemilikan KTP dari 96,50% (2009) menjadi 97,5% (2010)
- d. Meningkatnya database KK dari 85% (2009) menjadi 90% (2010)
- e. Terlaksananya penerbitan 498 akta melalui e-akta kelahiran di 5 (lima) puskesmas
- f. Terlaksananya penerbitan NIKNAS bagi 8.527.288 jiwa

11. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Untuk urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2010 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 4.110.095.000 dan telah direalisasikan sebesar Rp 3.137.113.171 atau 76,33%.

Adapun *output* yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak antara lain:

a. Program prinsip good governance dalam penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- Terlaksananya Penyusunan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan Surat Keputusan Gubernur .Provinsi DKI Jakarta terhadap Perempuan dan Perlindungan Anak
- Terlaksananya sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

b. Program kebijakan tentang keserasian peningkatan kualitas anak dan perempuan

- Terlaksananya Rakor Teknis Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Tingkat Provinsi dan 6 Kota/Kabupaten
- Terfasilitasinya Penanganan Korban Kekerasan terhadap anak dan kekerasan terhadap perempuan (KiA dan KiP)
- Terlaksananya Sosialisasi tentang Perlindungan Anak
- Terlaksananya orientasi Pedoman Pelaksanaan tentang Pencegahan *Trafficking*

c. Program peningkatan kualitas perlindungan perempuan

- Terlaksananya Koordinasi Kerjasama Program Mitra Praja Utama (MPU) dalam penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dan perdagangan orang dengan 10 Provinsi di Indonesia
- Terlaksananya Evaluasi Gerakan Sayang Ibu (GSI) di 6 Kota/Kabupaten
- Terlaksananya Pelatihan Pemberdayaan Perempuan dalam mengatasi *Global Warning* sebanyak 140 orang

d. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

- Terlaksananya Pelatihan Pengarusutamaan Gender Sejak Dini sebanyak 30 Orang
- Terlaksananya pelatihan Kepemimpinan Perempuan pada Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan sebanyak 30 orang
- Terlaksananya Potensi Diri bagi Lembaga sebanyak 130 orang
- Terlaksananya pelatihan Administrasi Kader Organisasi Perempuan sebanyak 150 orang

e. Program pemberdayaan perempuan dalam ekonomi keluarga dan masyarakat,

- Terselenggaranya Lomba dan Pembinaan P2WKSS tingkat Provinsi DKI Jakarta dan 6 Kota/Kabupaten
- Terselenggaranya Pelatihan Keterampilan Perempuan sebanyak 290 orang

Adapun *outcome* yang dihasilkan dari pelaksanaan program pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak antara lain:

- a. Dipertahankannya jumlah organisasi perempuan yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebanyak 63 organisasi pada Tahun 2009 dan 2010
- b. Berkembangnya kelompok ekonomi perempuan yang produktif dan mandiri dari 662 kelompok (2009) menjadi 734 kelompok (2010)
- c. Diterimanya Penghargaan bagi Provinsi DKI Jakarta dalam bentuk Anugerah Parahita Ekapraya (APE) yang diterima oleh Gubernur DKI Jakarta dari Presiden RI saat Perayaan Hari Ibu ke-83 pada 22 Desember 2010
- d. Tersedianya 2 (dua) Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan 1 (satu) Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta dalam Perlindungan Perempuan dan Anak yaitu :

- Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 176 Tahun 2010 tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender
- Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 218 Tahun 2010 tentang Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 630 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Aksi Daerah Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak

12. Urusan Keluarga Berencana (KB) dan Keluarga Sejahtera (KS)

Untuk urusan Keluarga Berencana (KB) dan Keluarga Sejahtera (KS) pada tahun 2010 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 31.243.323.263 dan telah direalisasikan sebesar Rp 12.001.278.347 atau 38,41%.

Adapun *output* yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan Keluarga Berencana (KB) dan Keluarga Sejahtera (KS) antara lain:

a. Program Keluarga Berencana,

- Terselenggaranya penggalangan TNI Manunggal KB Kesehatan / Bhayangkara Tingkat Provinsi dengan 7 Sektor terkait
- Terselenggaranya pelayanan KB melalui mobil unit KB keliling dengan jumlah akseptor sebanyak 6.953 PUS
- Terselenggaranya pemantapan komitmen teknis medis pelayanan KB kepada 300 *provider*
- Terselenggaranya Peningkatan Partisipasi Pria dalam Program KB kepada 250 orang
- Terselenggaranya penggalangan komitmen dan Lomba Kesatuan Gerak KB-Kesehatan yang diikuti 44 Kecamatan dengan jumlah peserta sebanyak 440 orang
- Terselenggaranya Peningkatan Pelayanan KB di DKI Jakarta melalui pelayanan KB di Puskesmas Kecamatan/Kelurahan, RSUD dan Rumah Sakit yang ditunjuk sesuai Peraturan Gubernur

Provinsi DKI Jakarta Nomor 162 Tahun 2010, yang pelayanannya bersifat gratis mulai tanggal 1 Oktober sampai dengan 15 Desember 2010 yang hasilnya sebanyak 4.719 Akseptor

b. Program kesehatan reproduksi remaja

- Terselenggaranya gebyar kreativitas kesehatan reproduksi remaja yang diikuti oleh 510 peserta
- Terselenggaranya kemah bhakti Saka Kencana Tingkat Provinsi yang diikuti oleh 60 Saka Kencana
- Terselenggaranya peningkatan wawasan dan pemahaman Kesehatan Reproduksi Remaja kepada 660 remaja

c. Program pelayanan kontrasepsi

- Terlaksananya distribusi alat kontrasepsi (alkon) dan non alkon di 5 wilayah kota administrasi
- Terlaksananya pelayanan bagi Peserta KB Baru sebanyak 439.723 peserta yang terdiri dari peserta KB untuk pria sebanyak 29.283 meliputi peserta KB Metode Operasi Pria (MOP) sebanyak 784 peserta dan Kondom sebanyak 28.499 peserta serta untuk Peserta KB Wanita sebanyak 410.440 peserta meliputi Metode Operasi Wanita (MOW) sebanyak 3.113 peserta, IUD sebanyak 47.497 peserta, Implant sebanyak 14.313 peserta, Suntik sebanyak 221.387 peserta dan Pil sebanyak 124.130 peserta yang dilayani 6 kota/kab. administrasi
- Terbinanya Peserta KB Aktif di 6 kota/kab. Administrasi sebanyak 1.009.579 peserta terdiri dari IUD sebanyak 215.333 peserta, Implant 73.590 peserta, MOP sebanyak 11.598 peserta, MOW sebanyak 36.179 peserta, Suntik sebanyak 381.360 peserta, Pil sebanyak 261.735 peserta dan Kondom sebanyak 29.784 peserta.

d. Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling remaja

Terselenggaranya pengembangan sebanyak 40 PIK melalui Jalur Sekolah, Masyarakat dan Perguruan Tinggi

e. Program peningkatan pengetahuan keluarga tentang penyakit menular seksual

- Terselenggaranya penggalangan kesepakatan *Preventing Mother To Child Transmission* (PMTCT) kepada 15 organisasi kemasyarakatan
- Terselenggaranya dialog interaktif HIV/AIDS dan narkoba melalui radio sebanyak 2 kali

f. Pengembangan model operasional BKB - Posyandu - PAUD

- Terselenggaranya kemitraan Bina Keluarga Balita (BKB) dan posyandu 136 BKB - Posyandu
- Beroperasinya BKB - Posyandu di 6 Kota/Kabupaten Administrasi
- Terpilihnya pengelola kelompok BKB terbaik sebanyak 6 Kader
- Terlatihnya tenaga pendamping kelompok bina keluarga bagi petugas dan kader sebanyak 120 Petugas dan Kader

g. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri

- Terselenggaranya pemilihan Penyuluh KB (PKB) dan Institusi Masyarakat Perkotaan (IMP/PPKB RW) terbaik sebanyak 6 PKB/PPKB RW
- Terselenggaranya Pembinaan kepada Petugas Pembantu Pembina KB (PPKB) RW sebanyak 2.685 Petugas
- Terselenggaranya penggalangan Kesepakatan Kelangsungan Hidup Ibu Bayi dan Anak (KHIBA) dengan organisasi kemasyarakatan/wanita/keagamaan yang diikuti oleh 650 orang

h. Program pelaksanaan SPM lain urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera

- Terselenggaranya pembinaan kepada 734 kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)
- Terselenggaranya penggalangan kemitraan dan gelar produk kelompok UPPKS bagi 104 Kelompok
- Terpilihnya pengelola kelompok UPPKS terbaik sebanyak 6 pengelola

Adapun *outcome* yang dihasilkan dari pelaksanaan program pada urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera antara lain :

- a. Meningkatnya kelangsungan pemakaian alat dan obat kontrasepsi pasangan usia subur dari 82.03% (2009) menjadi 82,36% (2010)
- b. Meningkatnya jumlah peserta KB Aktif yang menggunakan metode kontrasepsi jangka pendek (pil, suntik, kondom) dari 670.309 peserta (2009) menjadi 672.879 peserta (2010)
- c. Meningkatnya jumlah peserta KB aktif yang menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang (IUD, MOW, MOP, Implan) dari 324.146 peserta (2009) menjadi 336.700 peserta (2010)
- d. Meningkatnya jumlah keluarga yang aktif dalam kegiatan BKB dan Posyandu dari 35.535 Keluarga (2009) menjadi 37.510 Keluarga (2010)
- e. Meningkatnya angka peran serta Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKB) RW dalam pelayanan KB/KR yang mandiri dari 55.73% (2009) menjadi 58,37% (2010)
- f. Meningkatnya jumlah Pengembangan Pusat Informasi dan Konsultasi (PIK) Remaja dalam pelaksanaan KIE bagi Siswa Sekolah dari 157 PIK Remaja (2009) menjadi 197 PIK Remaja (2010)
- g. Meraih Juara III Tingkat Nasional lomba Kelompok BKB Tahun 2010 untuk Kelompok BKB Mawar, Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan

- h. Meraih penghargaan sebagai Pengelola BKB Terbaik Tingkat Nasional Tahun 2010 untuk Ny. Devi Indrianai, SH, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan.

13. Urusan Sosial

Untuk urusan sosial pada tahun 2010 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 244.513.098.635 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 223.785.285.603 atau 91,52%.

Adapun *output* yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan social antara lain:

a. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial

- Terlaksananya Pemberdayaan sosial keluarga miskin kepada 835 orang
- Terlaksananya Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin melalui KUBE, LKMS sebanyak 500 orang
- Terlaksananya penertiban sosial PMKS jalanan sebanyak 10.088 orang
- Terlaksananya pelayanan sosial orang terlantar dan korban tindak kekerasan sebanyak 5.367 Orang
- Terlaksananya pengadaan sarana prasarana penanggulangan bencana berupa peralatan dapur umum mandiri sebanyak 70 set
- Terlaksananya pemberian makanan siap saji bagi korban bencana sebanyak 2.004.870 box
- Terlaksananya pelatihan taruna siaga bencana sebanyak 605 orang
- Terlaksananya perlindungan sosial kepada Lanjut Usia (Lansia) sebanyak 975 orang
- Terlaksananya pemenuhan kebutuhan dasar bagi lanjut usia sebanyak 1.500 orang
- Terlaksananya penguatan kemandirian lansia sebanyak 100 orang

- Terlaksananya kegiatan apresiasi kompetisi penyandang cacat Tingkat provinsi sebanyak 400 orang
- Terlaksananya penyaluran sosial PMKS jalanan hasil penertiban ke daerah asalnya sebanyak 1.000 orang
- Terlaksananya kegiatan silaturahmi gubernur dengan para perintis kemerdekaan, keluarga pahlawan dan pejuang lainnya sebanyak 527 orang
- Terlaksananya pemenuhan kebutuhan dasar Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA)/Non Panti Sosial Asuhan Anak (NPSAA) sebanyak 1.500 orang
- Terlaksananya kegiatan pemberian santunan sosial bagi penyandang cacat sebanyak 1.540 orang
- Terlaksananya kegiatan Pembinaan dan perawatan WBS psikotik di Yayasan Sinar Jati Lampung sebanyak 50 orang
- Terlaksananya Pembinaan dan perawatan WBS cacat ganda di Yayasan Bhakti Luhur Malang sebanyak 50 orang
- Terlaksananya Pembinaan dan perawatan WBS cacat psikotik di Yayasan Nurusalam Sayung Demak sebanyak 40 orang
- Terlaksananya pelayanan dan rehabilitasi sosial WBS di 27 panti
- Terlaksananya perlindungan sosial kepada anak terlantar dan anak jalanan sebanyak 1.500 orang
- Terlaksananya penguatan kemandirian sosial dan pengembangan KUBE bekas hukuman sebanyak 25 orang
- Terlaksananya pemberian bantuan dan perlindungan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial sebanyak 12.517 orang
- Terlaksananya pembinaan keterampilan dan bantuan modal bagi PMKS sebanyak 1.835 orang
- Terlaksananya penertiban PMKS sebanyak 10.088 orang
- Terselenggaranya pelayanan dan rehabilitasi sosial WBS di Panti Sosial pada Dinas Sosial sebanyak 27 Panti

b. Program pembinaan peran serta lembaga kesejahteraan sosial

- Terselenggaranya pembinaan kelembagaan karang taruna, pokja kesuma dan orsos dalam peningkatan pelayanan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) sebanyak 887 lembaga
- Terlaksananya pemberian operasional karang taruna kepada 317 karang taruna
- Terlaksananya pembuatan dan penayangan tentang kesejahteraan sosial sebanyak 3 tayangan melalui TV (filler, dialog dan talkshow) dan 1 tayangan melalui radio
- Terlaksananya penguatan kinerja tenaga pendamping penyelenggara pelayanan Kesos anak, remaja, keluarga dan lansia sebanyak 100 orang
- Terlaksananya pelatihan pekerja sosial bagi tenaga kesejahteraan sosial sebanyak 1.323 orang

c. Program pembinaan lembaga mental spiritual

Terlaksananya pelayanan jamaah haji provinsi DKI Jakarta di Tanah Suci sebanyak 7652 orang

d. Program peningkatan sarana dan prasarana sosial

- Terlaksananya perencanaan pembuatan STP (*Sewage Treatment Plant*) di 6 panti, perencanaan pemanfaatan PSTW Kampung Dukuh dan perencanaan rehab panti sosial sebanyak 7 panti sosial
- Terlaksananya Pengadaan Sarana Pendukung Pelayanan Sosial Pemerintah bagi 8 panti sosial berupa alat musik tradisional
- Terlaksananya pengadaan tanah untuk perluasan Panti Sosial Bina Grahita Belaian Kasih Pegadungan seluas 2437 m2

Adapun *outcome* yang dihasilkan dari pelaksanaan program pada urusan sosial antara lain :

- a. Meningkatnya Jumlah penyandang cacat yang dapat beraktivitas dengan lancar sebanyak 229 orang (2009) dan 300 orang (2010)
- b. Meningkatnya Jumlah anak terlantar yang dapat dipenuhi kebutuhan dasarnya dari 1.500 orang (2009) dan 1.500 orang (2010) dan yang dapat ditampung di panti sosial dari 850 orang (2009) menjadi 866 orang (2010)
- c. Meningkatnya Jumlah keluarga miskin yang dapat hidup mandiri sebanyak 600 keluarga (2009) menjadi 835 keluarga (2010)
- d. Meningkatnya Jumlah lanjut usia yg dapat dilayani sebanyak sebanyak 1.112 orang (2009) dan 1.500 orang (2010)
- e. Meningkatnya Jumlah korban bencana yang dapat dilayani kebutuhan makannya selama di pengungsian sebanyak 135.000 orang (2009) menjadi 133.658 orang (2010)
- f. Respon time penanganan bencana di DKI Jakarta oleh Dinas Sosial 6 jam (2009) menjadi 3 jam (2010).
- g. Berkurangnya populasi PMKS jalanan sebanyak 11.338 orang (2009) dan 10.088 orang (2010).
- h. Meningkatnya Jumlah WBS panti sosial yang dapat hidup mandiri setelah mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi sosial di panti sosial sebanyak 467 orang (2009) dan 534 orang (2010)
- i. Meningkatnya Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat yang mendapatkan pelatihan dalam memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat sebanyak 1.285 orang (2009) dan 1.323 orang (2010)
- j. Meningkatnya Jumlah Lembaga Kesos yang mendapatkan pelatihan manajemen pengelolaan lembaga kesos dalam memberikan pelayanan kesos kepada masyarakat sebanyak 730 lembaga (2009) dan 887 lembaga (2010)

14. Urusan Ketenagakerjaan

Untuk urusan ketenagakerjaan pada tahun 2010 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 262.132.361.424 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 226.015.288.038 atau 86,22%.

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ketenagakerjaan antara lain:

a. Program peningkatan kesempatan kerja

- Program peningkatan kesempatan kerja adalah program yang berupaya untuk mengatasi pengangguran melalui kegiatan yang langsung menyentuh kepada masyarakat.
- Terlaksananya pengisian lowongan kerja pada sektor formal, dengan memberikan pembekalan kepada pencari kerja sebanyak 600 orang. Penyerapan Tenaga Kerja pada sektor formal merupakan penempatan tenaga kerja pada perusahaan-perusahaan yang terjalin hubungan kerja
- Terlaksananya penyerapan Tenaga Kerja pada sektor informal melalui pembekalan keterampilan kepada pencari kerja sebanyak 300 Orang. Penyerapan Tenaga Kerja pada sektor informal merupakan penempatan tenaga kerja melalui perluasan kerja dengan menciptakan kesempatan kerja melalui kegiatan usaha mandiri, teknologi tepat guna dan wirausaha baru dengan rincian pembentukan Tenaga Kerja Mandiri sebanyak 100 orang, Wira Usaha Baru 100 orang, penerapan Teknologi Tepat Guna 100 orang
- Terlaksananya pembangunan sistem informasi Bursa Kerja Online (BKOL) sebagai sarana pelayanan antar kerja untuk mempertemukan antara pencari kerja dengan pemberi kerja melalui sistem *online* (*website.bkol-dki.com*), untuk mempermudah para pencari kerja dalam mencari lowongan kerja dan pemberi kerja dalam mendapatkan tenaga kerja sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan

- Terlaksananya monitoring terhadap kelompok kerja WUB (Wira Usaha Baru), TKM (Tenaga Kerja Mandiri) dan TTG (Teknologi Tepat Guna) yang menyerap pencari kerja sebanyak 2.354 orang
- Terlaksananya Pameran Bursa Kerja / *Job Fair* di Dhanapala yang menyerap pencari kerja sebanyak 327 Orang pada 78 Perusahaan. *Event* ini juga dinilai sangat efektif dalam mempertemukan pencari kerja dengan pemberi kerja secara langsung dengan dilakukan seleksi psikotest dan wawancara langsung oleh perusahaan saat itu juga.
- Terlaksananya Pameran Bursa Kerja / *Job Fair* di 5 Wilayah Kota administrasi DKI Jakarta yang menyerap para pencari kerja sebanyak 2398 orang pada 159 Perusahaan
- Terlaksananya Pameran Ketenagakerjaan pada Pekan Raya Jakarta yang isinya menginformasikan program-program, peraturan-peraturan ketenagakerjaan dan pelayanan bursa kerja Online kepada 2250 pengunjung, juga dilakukan pemberian Kartu Pendaftaran Pencari kerja (AK1) sebanyak 1300 orang, diikuti oleh 60 Perusahaan yang menyerap 562 pencari kerja
- Terlaksananya penempatan tenaga kerja Antar Kerja Antar daerah (AKAD) melalui pembekalan orientasi pra penempatan sebanyak 50 orang pada 9 Perusahaan
- Terlaksananya penyerapan tenaga kerja melalui pendayagunaan tenaga kerja pemuda, wanita dan penyandang cacat di bidang komputer, otomotif, *service* HP, pembuatan pupuk kompos sebanyak 300 orang
- Terlaksananya pembekalan dan penempatan tenaga kerja asal DKI ke luar negeri sebanyak 191 orang (Hongkong 4 orang, Singapura 38 orang, Malaysia 41 orang, Taiwan 8 orang, Qatar 100 orang) pada 12 perusahaan.

b. Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan

- Terlaksananya pembinaan perusahaan untuk mengantisipasi penanganan mogok kerja kepada 37 perusahaan
- Terlaksananya penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebanyak 49 kasus
- Terlaksananya pembinaan perlindungan kerja kepada 369 perusahaan
- Terlaksananya pembinaan norma kerja kepada 833 perusahaan
- Terlaksananya pembinaan Keselamatan Kecelakaan Kerja (K3) pada 544 perusahaan
- Terlaksananya penetapan dan sosialisasi UMP kepada pekerja, perusahaan dan serikat pekerja sebanyak 325 orang
- Terlaksananya survey Kehidupan Hidup Layak (KHL) ke pasar-pasar tradisional sebanyak 100 pasar di 5 wilayah kota

c. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja

- Terselenggaranya pelatihan keterampilan kerja dengan 20 kejuruan (di antaranya pelatihan las pipa, las plat, las bawah air, otomotif roda 2, otomotif roda 4, pelatihan teknik informatika) kepada 5100 orang
- Terselenggaranya uji sertifikasi kompetensi lulusan BLK, di antaranya kejuruan las plat, otomotif, mesin logam, teknik pendingin, sebanyak 504 orang
- Terlaksananya pelatihan pra pemberangkatan bagi peserta (lulusan Teknik) program magang IMM (*association International Manpower Development of Medium and Small Enterprises Japan*) ke Jepang sebanyak 200 orang
- Terlaksananya pemasaran dalam rangka penempatan lulusan BLK sebanyak 5.100 orang dan dapat ditempatkan sebanyak 3.568 orang

- Terlaksananya pemagangan *sister city* Jakarta-Seoul sebanyak 14 orang (jurusan otomotif, web program, *web master*, *jewelry design*, *interior design*, *cooking*, *cosmetic*)

d. Program Pengembangan Transmigrasi

- Terlaksananya pembekalan /pelatihan dasar umum (PDU) kepada calon transmigran (kepala keluarga dan isteri) sebanyak 304 KK
- Terlaksananya penempatan dan perpindahan transmigran asal DKI Jakarta sebanyak 152 KK, sehingga total yang sudah ditempatkan sebanyak 322 KK, 602 jiwa

Adapun outcome yang dihasilkan dari pelaksanaan program pada urusan ketenagakerjaan antara lain:

- a. Terlaksananya pembekalan dan penempatan tenaga kerja asal DKI ke luar negeri sebanyak 191 orang (Hongkong 4 orang, Singapura 38 orang, Malaysia 41 orang, Taiwan 8 orang, Qatar 100 orang) pada 12 perusahaan
- b. Tingkat penganggur terbuka mengalami penurunan pada tahun 2009 mencapai 12,15 % menjadi 12,05 % pada tahun 2010
- c. Meningkatnya standar Upah Minimum Provinsi (UMP) dari Rp. 1.118.009,- pada tahun 2010 menjadi Rp 1.290.000,- pada tahun 2011
- d. Meningkatnya jumlah tenaga kerja terampil (lulusan BLK) yang siap memasuki dunia kerja sebanyak 4.145 orang pada tahun 2009 menjadi 5.100 orang pada tahun 2010
- e. Meningkatnya jumlah transmigran asal DKI Jakarta ke Daerah tujuan transmigrasi pada tahun 2009 sebanyak 100 KK dan pada Tahun 2010 sebanyak 152 KK, sehingga total transmigran dari tahun 2007 sebanyak 322 KK.

15. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Untuk urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada tahun 2010 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 86.458.563.028 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 75.773.060.534 atau 87,64%.

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah antara lain:

a. Program Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

- Terlaksananya pemeringkatan terhadap 250 Koperasi di lima wilayah kota administrasi.
- Terlaksananya revitalisasi kelembagaan koperasi terhadap 20 koperasi

b. Program Peningkatan Dukungan Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

- Terselenggaranya gelar pasar rakyat sebanyak 1 kali yang diikuti oleh 100 UKM
- Terselenggaranya Pasar Lelang *Forward* Kebutuhan Masyarakat untuk 15 jenis komoditi bahan pokok

c. Program pembinaan kewirausahaan dan keunggulan UKM

- Terlaksananya Pendidikan dan Latihan Manajemen Keuangan, Akuntansi dan Pemasaran Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Koperasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan masing-masing sebanyak 267 orang
- Terlaksananya Pendidikan dan Latihan Pengelolaan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Koperasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 410 orang
- Terlaksananya Pendidikan dan Latihan Manajemen Koperasi bagi Pengurus Koperasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 801 orang

Adapun outcome yang dihasilkan dari pelaksanaan program pada urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah antara lain:

- a. Meningkatnya pemeringkatan Koperasi dari 136 pada tahun 2009 menjadi 250 Koperasi pada tahun 2010
- b. Meningkatnya jumlah koperasi yang direvitalisasi dari 16 koperasi (2009) menjadi 20 koperasi (2010)
- c. Meningkatnya jaringan pemasaran UKM dalam dan luar negeri dari 75 UKM (2009) menjadi 100 UKM (2010)
- d. Meningkatnya tenaga trampil dan professional pada Pengurus, pengelola dan pengawas Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Koperasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di 267 Kelurahan.

16. Urusan Penanaman Modal

Untuk urusan Penanaman Modal pada tahun 2010 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 35.365.224.971 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 28.079.184.605 atau 79,40%.

Adapun *output* yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan Penanaman Modal antara lain:

a. Program peningkatan investasi

- Terlaksananya pengawasan dan pengendalian persetujuan penanaman modal
- Terlaksananya implementasi lingkungan dalam pelaksanaan penanaman modal
- Terlaksananya koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal antar wilayah Provinsi DKI Jakarta
- Terfasilitasinya penyelesaian permasalahan penanaman modal di Provinsi DKI Jakarta melalui *task force*
- Terlaksananya penahapan operasional pelayanan terpadu satu pintu

b. Program peningkatan promosi investasi

- Terinformasikannya peluang investasi dan kondisi perekonomian Jakarta dan Indonesia melalui promosi dalam dan luar negeri serta business forum maupun Pekan Raya Jakarta
- Terlaksananya kerjasama investasi dengan daerah sekitar terutama dalam perencanaan dan promosi
- Terlaksananya promosi investasi di 4 negara, yaitu :
 - *Foir International D' Alger, Aljazair*
 - The 18th China Kunming, , China
 - *APEC Ease of Doing Business Workshop*, Singapura
 - *Int'l Trade Fair*, Vietnam
- Terlaksananya promosi investasi di 7 daerah Indonesia, yaitu:
 - *Eco Product International Fair 2010*, Jakarta
 - *Indonesia Trade & Tourism Expo*, Yogyakarta
 - *KTI Expo 2010*, Makasar
 - *2nd TTI Expo 2010*, Batam
 - *Invesda Expo*, di Yogyakarta
 - *Pekan Batik Nusantara*, Pekalongan
 - *Padang Fair*, Padang
 - *Kemilau Seni Budaya*, Samarinda
- Terlaksananya forum bisnis di 3 negara, yaitu:
 - Madrid, Spanyol : diikuti dengan 3 Perusahaan Dalam Negeri
 - Tokyo, Jepang : diikuti dengan 3 Perusahaan Dalam Negeri
 - Singapura : diikuti dengan 4 Perusahaan Dalam Negeri
- Terlaksananya informasi kepada masyarakat tentang peluang investasi melalui media bahan promosi dan media elektronik

c. Program peningkatan sarana dan prasarana penanaman modal

- Tersedianya sarana dan prasarana penunjang pelayanan kantor BPMP Provinsi DKI Jakarta.
- Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana yang telah ada.

d. Program peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah,

- Tersedianya hasil evaluasi RKAP BUMD.
- Tersedianya calon pengurus BUMD yang diseleksi melalui *fit and proper test*.
- Terlaksananya monitoring, pembinaan, pengendalian dan pengembangan BUMD serta pembinaan terhadap pengurus BUMD.
- Meningkatnya pengetahuan pengurus BUMD sehingga akan terjadi ketepatan dalam pengelolaan BUMD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Adapun *outcome* yang dihasilkan dari pelaksanaan program pada urusan penanaman modal antara lain:

- a. Meningkatnya PMA dari tahun 2009 sebesar US\$ 5,51 milyar (Rp.50,69 triliun, kurs Rp.9.200,-) menjadi US\$ 7,6 milyar (Rp.70,64 triliun, kurs Rp.9.200,-) pada tahun 2010
- b. Terealisasinya PMDN sebesar Rp.9,6 triliun (2009) dan Rp.8,21 triliun (2010) (berdasarkan data BPMP Provinsi DKI Jakarta hingga triwulan III/2010).
- c. Meningkatnya PAD yang bersumber dari BUMD dari Rp178,53 milyar (2009) menjadi Rp.218 milyar (2010)
- d. Tercapainya penyelesaian waktu perizinan penanaman modal paling lama 38 hari kerja.
- e. Meningkatnya hubungan kemitraan bisnis dengan 10 pengusaha di 3 negara (Spanyol, Jepang, Singapura)

17. Urusan Kebudayaan

Untuk urusan Kebudayaan pada tahun 2010 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 308.047.493.030 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 261.447.987.062 atau 84,87%.

Adapun *output* yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan Kebudayaan antara lain:

a. Program pengelolaan keragaman budaya,

- Terlaksananya pertunjukan Kesenian Terpilih sebanyak 120 kali
- Terlaksananya partisipasi Pawai Lintas Budaya Nusantara sebanyak 1 kali dengan pendukung/seniman sebanyak 250 Orang
- Terlaksananya partisipasi pada Internasional Dance Festival 1 kali dengan 12 negara peserta
- Terlaksananya partisipasi pada Duta Seni Pelajar (DSP) se Jawa Bali ke XI, dengan pendukung/ pelaku seni sebanyak 60 orang
- Terlaksananya Pesta Seni Pelajar (PSP) Tingkat Provinsi DKI Jakarta sebanyak 240 siswa
- Terlaksananya partisipasi pada Festival Seni Pertunjukan Tingkat Nasional sebanyak 12 karya seni dan didukung oleh 144 seniman seniwati
- Terlaksananya Audisi dan Pengiriman Tim Gita Bahana Nusantara Provinsi DKI Jakarta didukung oleh 60 orang pelajar
- Terlaksananya partisipasi pada Festival Kesenian Tradisional Mitra Praja Utama dengan pendukung sebanyak 30 orang
- Terlaksananya Lomba Nasyid dan Marawis Tingkat Provinsi DKI Jakarta sebanyak 360 peserta
- Terlaksananya Jakarnaval sebanyak 1200 peserta
- Terlaksananya Jakarta – Berlin Cultural Festival sebanyak 1 kali
- Terlaksananya Festival Lenong Keliling sebanyak 8 kali
- Terlaksananya Festival Museum 2 kali
- Terlaksananya Pertunjukan Seni di Ruang Publik sebanyak 60 kali
- Terlaksananya Pengiriman Sastrawan MPU ke Lampung sebanyak 16 orang
- Terlaksananya Festival Teater Tingkat SLTA se DKI Jakarta sebanyak 15 grup

- Terlaksananya Festival Kesenian Wadah-Wadah/Organisasi Seni Budaya DKI Jakarta sebanyak 44 organisasi

b. Program pengelolaan kekayaan budaya

- Terlaksananya Pengawasan Pelestarian Bangunan Cagar Budaya Kelas A di Provinsi DKI Jakarta, Lingkungan Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya Hasil Konservasi Fisik, Pengawasan Pengendalian Benda Cagar Budaya Bergerak (BCBB)
- Terlaksananya Pelayanan Pelestarian dan Lingkungan Cagar Budaya seperti konservasi bangunan Museum Seni Rupa, Museum Wayang, pembuatan Tata Pamer Museum Wayang (kegiatan tahunan)
- Terlaksananya Penataan Kawasan PKJ-TIM sesuai dengan master plan. Diantaranya Rehabilitasi Gedung Rektorat IKJ, Rehabilitasi Masjid di Kawasan IKJ
- Terlaksananya Review/ Penyempurnaan Masterplan Kawasan PKJ-TIM

c. Program pengembangan nilai budaya

- Terlaksananya Seminar dan Lokakarya Kebudayaan Betawi sebanyak 250 orang, di tahun 2009 tidak ada
- Terlaksananya Pembuatan Direktori Lembaga Kesenian Betawi, naskah yang sangat bermanfaat untuk pengembangan seni budaya betawi
- Terlaksananya Temu Wicara Seni Budaya dan Arsitektur Betawi sebanyak 60 orang, di tahun 2009 tidak ada

d. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya

- Terlaksananya Pemberdayaan lembaga-lembaga kesenian sebanyak 40 lembaga/ organisasi budaya (tahun lalu tidak ada)

- Terlaksananya Pengelolaan Perkampungan Budaya Betawi selama 12 bulan (kegiatan tahunan)
- Terlaksananya Pengiriman Delegasi BCB Mitra Praja Utama sebanyak 12 orang, Satu kali yang diikuti oleh 10 Provinsi anggota MPU (Jakarta, Lampung, Jabar, Banten, Jateng, Jatim, DIY, Bali, NTB, NTT), lokasi pertemuan di Jawa Barat (tukar informasi dalam hal tata kelola BCB)

e. Program Peningkatan Sarana Prasarana Kebudayaan

- Terlaksananya Konservasi Bangunan eks Kodim 0505 Jakarta Timur
- Terlaksananya Pembebasan Lahan 2.2 ha di Perkampungan Budaya Betawi/PBB
- Terlaksananya Rehab Gedung Balai Latihan Kesenian Jakarta Barat, yang berlokasi di Cengkareng, dimana Tahap I berupa peninggian bangunan untuk mengatasi banjir, Tahap 2 rencananya akan dilaksanakan di 2011, berupa pembangunan fisik Gedung
- Terlaksananya Konservasi gedung Museum Bahari (Blok A dan B)
- Terlaksananya Konservasi gedung Museum Senirupa dan Keramik
- Terlaksananya Perencanaan Konservasi gedung Kesenian Jakarta
- Terlaksananya Perencanaan Konservasi Bangunan MAPOMDAM JAYA di dekat Pasar Rumput, Manggarai untuk dapat dilaksanakan konservasi fisik di 2011
- Terlaksananya Perencanaan Konservasi Masjid Cut Mutiah untuk dapat dilaksanakan konservasi fisik
- Terlaksananya Pembuatan Masterplan dan DED Gedung Pusat Kebudayaan Betawi (Komplek Bangunan eks Kodim 0505 Jakarta Timur)

- Terlaksananya Rehab Gedung Kesenian Miss Tjitjih (perbaikan Atap)
- Terlaksananya Rehab Atap Bangunan Pangeran Jayakarta
- Terlaksananya Pengadaan Lighting Gedung Kesenian Jakarta
- Terlaksananya Pengadaan Lighting Graha Bhakti Budaya
- Terlaksananya Pengadaan Sound System Gedung Kesenian Jakarta
- Terlaksananya Pengadaan Sound System Graha Bhakti Budaya

Adapun *outcome* yang dihasilkan dari pelaksanaan program pada urusan Kebudayaan antara lain:

- a. Meningkatnya kualitas pelayanan dan fasilitasi terhadap masyarakat/pelaku seni budaya dalam partisipasi pentas seni di ruang publik, dari 98.520 orang pelaku seni (2009) menjadi 105.000 orang pelaku seni (2010).
- b. Meningkatnya kualitas pelayanan dan pengunjung museum dari 1.976.025 orang (2009) menjadi 2.150.000 orang (2010)
- c. Meningkatnya kualitas pelayanan dan penonton dari 2.259.450 orang pada tahun 2009 menjadi 2.550.000 orang pada tahun 2010 atau meningkat sebesar 12,86%
- d. Meningkatnya pembinaan terhadap sanggar-sanggar seni budaya dari 120 sanggar (2009) menjadi 160 sanggar (2010).
- e. Meningkatnya standar kompetensi para pelaku seni budaya tingkat dasar dan madya dari 1.800 (2009) menjadi 2.250 orang (2010).

18. Urusan Olahraga dan Pemuda

Untuk urusan Olahraga dan Pemuda pada tahun 2010 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 489.825.092.849 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 341.633.038.468 atau 69,75%.

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan Olahraga dan Pemuda antara lain:

a. Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga

- Terselenggaranya pembinaan prestasi 43 cabang olahraga pada tahun 2010
- Terselenggaranya pemassalan 14 cabang olahraga pada tahun 2010
- Terselenggaranya pengiriman atlet pada 4 *event* olahraga tingkat Internasional dan 4 *event* olahraga tingkat nasional pada tahun 2010
- Terselenggaranya pelaksanaan 5 *event* olahraga tingkat Internasional di Jakarta pada tahun 2010
- Terlaksananya layanan fasilitas lepas olahraga dengan kunjungan sebanyak 337.150 orang pada tahun 2010
- Terlaksananya layanan 5 gelanggang olahraga untuk 1.232.613 orang pada tahun 2010
- Terlaksananya layanan 5 gelanggang remaja kota administrasi dan 35 gelanggang remaja kecamatan di Provinsi DKI Jakarta dengan kunjungan sebanyak 2.183.545 pada tahun 2010.

b. Program pembinaan kepemudaan

- Terbinanya 105 organisasi kepemudaan di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2010
- Terpilihnya 2 orang putra putri utusan DKI Jakarta sebagai paskibraka tingkat nasional pada tahun 2010
- Terpilihnya pemuda DKI Jakarta sebagai juara III bidang Pendidikan dan harapan I Bidang kelautan pada pemilihan Pemuda Pelopor tingkat Nasional tahun 2010
- Terpilihnya Sarjana Penggerak Pembangunan di Pedesaan (SP3) Provinsi DKI Jakarta sebagai juara II Bidang Perikanan

c. Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga

- Terselenggaranya rehabilitasi 3 prasarana olahraga dan pemuda milik Pemda DKI pada tahun 2010

- Terselesaikannya pembangunan/rehabilitasi total 3 prasarana olahraga dan pemuda milik Pemda DKI pada tahun 2010
- Terselesaikannya DED Stadion BMW dan Gedung KONI DKI Jakarta

Adapun *outcome* yang dihasilkan dari pelaksanaan program pada urusan olah raga dan pemuda antara lain:

- a. Meningkatnya jumlah pengguna layanan gelanggang olahraga dari 1.173.918 orang (2009) menjadi 1.232.613 orang (2010), layanan gelanggang remaja kota administrasi & kecamatan dari 2.079.567 orang (2009) menjadi 2.183.545 orang (2010)
- b. Tercapainya prestasi pada event olahraga dan pemuda:
 - Juara II Enjoy Jakarta Basket Ball Tournament 2010
 - Juara I Tunggal Putra kelompok 12 tahun Tenis Piala Thamrin
 - Juara I Ganda Putri kelompok 16 tahun Tenis Piala Thamrin
 - Juara II putra usia dibawah 20 tahun Polo Air Betawi Cup
 - Juara III Putri Terbuka Polo Air Betawi Cup
 - Peringkat ke 2 pada Pekan Olahraga Nasional (PORNAS) SOIna ke 6th 2010 di Jakarta
 - Memperoleh medali perak dan perunggu pada kejuaraan Bulutangkis se ASIA Pacific ke 3 (*The 3rd Asia Pacific Deaf Badminton Championship 2010*) di Samarinda Kaltim

19. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Untuk urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri pada tahun 2010 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 43.849.295.025 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 36.786.102.945 atau 83,89%.

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri antara lain:

a. Program pengembangan wawasan kebangsaan

- Terlaksananya sarasehan wawasan kebangsaan bagi 120 pengurus dan anggota serikat pekerja
- Terlaksananya aktualisasi ketahanan nasional organisasi kepemudaan bagi 120 orang
- Terlaksananya sarasehan peningkatan peran tokoh agama dalam memperkuat kerukunan hidup umat beragama bagi 120 tokoh agama
- Terlaksananya koordinasi pemberian izin rekomendasi dan pengawasan lapangan terhadap artis asing
- Terlaksananya aktualisasi nilai bela negara dalam rangka meningkatkan semangat kebangsaan bagi anggota pramuka Provinsi DKI Jakarta
- Terlaksananya peningkatan pembauran bangsa bagi siswa SLTA
- Terlaksananya peningkatan peran pengurus tempat ibadah dalam rangka memantapkan kerukunan hidup umat beragama
- Terlaksananya aktualisasi nilai pembauran bagi pengurus dan anggota organisasi suku/etnis
- Terlaksananya peningkatan peran tokoh suku/etnis dalam rangka memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa
- Terlaksananya sarasehan pemahaman integrasi bangsa bagi warga komunitas
- Terlaksananya dialog interaktif tentang wawasan kebangsaan
- Terlaksananya dialog pembinaan kerukunan umat beragama sejak usia dini
- Terlaksananya workshop peran pemuda dalam memperkokoh NKRI
- Terlaksananya peningkatan peranan pengurus dan anggota organisasi keagamaan dalam rangka membangun kerukunan hidup umat beragama di Provinsi DKI Jakarta

b. Program pencegahan dan penanggulangan konflik

- Terlaksananya 3 (tiga) kali sarasehan kerawanan ideologi yang berdampak terhadap stabilitas politik di DKI Jakarta
- Terlaksananya 2 (dua) kali orientasi kewaspadaan nasional bagi generasi muda di DKI Jakarta
- Terlaksananya 2 (dua) kali sarasehan isu-isu politik yang berpotensi konflik horizontal
- Terlaksananya monitoring dan pengawasan terhadap pelaku kerawanan stabilitas di Provinsi DKI Jakarta
- Terlaksananya 2 (dua) kali sarasehan peran generasi muda dalam menciptakan situasi kondusif di DKI Jakarta
- Terlaksananya pemantauan Ipoleksosbud
- Berfungsinya Komunitas Intelegen Daerah (Kominda) DKI Jakarta
- Terlaksananya operasional forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM)
- Terlaksananya 3 (tiga) sarasehan pemantapan deteksi dini bagi tokoh masyarakat
- Terlaksananya pelaksanaan koordinasi pemberian izin rekomendasi terhadap riset/penelitian di DKI Jakarta
- Terlaksananya 3 (tiga) kali sarasehan potensi konflik dan kerawanan sosial di DKI Jakarta
- Terlaksananya pengkajian mengenai dampak perubahan iklim global terhadap kehidupan masyarakat DKI Jakarta
- Terlaksananya peningkatan kapasitas organisasi pemuda dalam menangkal bahaya terorisme
- Terlaksananya penguatan kewaspadaan dini bagi tokoh masyarakat dan organisasi kemasyarakatan
- Terlaksananya peningkatan pemahaman deteksi dan pencegahan dini bagi pengurus RT, RW dan Lembaga Kemasyarakatan

c. Program pendidikan politik masyarakat

- Terlaksananya 11 kali forum silaturahmi antara ormas dan partai politik di Provinsi DKI Jakarta
- Terlaksananya 2 (dua) kali temu ramah pemerintah, muspida dan pengurus partai politik
- Terlaksananya 3 (tiga) kali sarasehan peningkatan wawasan politik perempuan
- Terlaksananya 3 (tiga) kali sarasehan sadar politik dalam menumbuhkan partisipasi politik bagi Orsospol
- Terlaksananya 2 (dua) kali silaturahmi dalam rangka membangun komunikasi antara Pemerintah, DPRD dengan kelompok masyarakat
- Terlaksananya pendidikan politik di bidang hubungan legislatif dan eksekutif dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan
- Terlaksananya 2 (dua) kali sarasehan kebijakan eksekutif dan legislatif dalam membangun dinamika hubungan sosial di masyarakat
- Terlaksananya 2 (dua) kali sarasehan kemitraan pimpinan Ormas/LSM
- Terlaksananya 2 (dua) kali sarasehan manajemen organisasi bagi ormas dan LSM
- Terlaksananya 2 (dua) kali sarasehan peran ormas/LSM dalam meningkatkan hubungan antar lembaga di Provinsi DKI Jakarta
- Terlaksananya 3 (tiga) kali dialog implementasi nilai-nilai Pancasila
- Terlaksananya 5 (lima) kali workshop pengurustamaan gender bagi organisasi perempuan
- Terlaksananya 2 (dua) kali temu wicara HAM warga komunitas
- Terlaksananya peningkatan nilai-nilai demokrasi dan etika politik bagi kalangan ormas
- Terlaksananya 3 (tiga) kali forum dialogis dalam rangka penyampaian aspirasi masyarakat

- Terlaksananya 3 (tiga) kali dialog implementasi nilai-nilai budaya bangsa dalam pembangunan etika politik bagi kalangan parpol, ormas dan generasi muda
- Terlaksananya sosialisasi UU bidang politik (Pemilu)
- Terlaksananya pendidikan politik bagi generasi muda, dialog interaktif peningkatan pendidikan politik bagi ormas dan LSM, dan peningkatan pemahaman pendidikan politik bagi pengurus anggota ormas dan LSM
- Terlaksananya peningkatan komunikasi sosial pemerintah dengan organisasi kemasyarakatan di bidang hubungan eksekutif dan legislatif

Adapun *outcome* yang dihasilkan dari pelaksanaan program pada urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri antara lain:

- a. Menurunnya jumlah tindak kekerasan di masyarakat dari 5.206 kasus (2009) menjadi 3.570 kasus (2010)
- b. Berkurangnya tingkat ketergantungan 400 ormas/LSM yang terdaftar terhadap fasilitasi pemerintah dari 360 ormas/LSM (2009) menjadi 375 ormas/LSM (2010)

20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Untuk urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian pada tahun 2010 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 5.274.866.427.991 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 4.065.672.571.617 atau 77,08%.

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian antara lain:

a. Program peningkatan kinerja pemerintahan kota/kabupaten administrasi

- Terlaksananya pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (SIPTSP) dan penataan ruangan pelayanan terpadu Kota Administrasi Jakarta Pusat
- Terlaksananya Pekan panutan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota/Kabupaten Administrasi
- Pelayanan penerbitan Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) di wilayah Kota Administrasi
- Pelaksanaan pelayanan satu atap/terpadu (Pelayanan Prima) tingkat Kota Administrasi
- Koordinasi, monitoring dan evaluasi program bangun praja

b. Program peningkatan koordinasi pemerintahan kota/kabupaten administrasi

- Terlaksananya penyusunan Keputusan Gubernur tentang peraturan pelaksanaan operasional Lembaga Kemasyarakatan
- Terlaksananya penyusunan Keputusan Gubernur tentang petunjuk pelaksanaan (peraturan/keputusan Gubernur) pembentukan Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) di Provinsi DKI Jakarta

c. Program peningkatan pelayanan pemerintahan kecamatan

- Terlaksananya kegiatan operasional kecamatan
- Terlaksananya kegiatan Kecamatan terhadap 13 kewenangan yang dimiliki

d. Program peningkatan pelayanan pemerintahan kelurahan

- Terlaksananya kegiatan operasional kelurahan
- Terselenggaranya kegiatan dalam rangka implementasi 3 (tiga) kewenangan kelurahan yaitu kebersihan, kesehatan masyarakat serta ketentraman dan ketertiban umum.

- Terselenggaranya operasional kelembagaan masyarakat (RT, RW dan Dekel)
- e. Program pembinaan dan pengembangan aparatur**
- Terprosesnya pengadaan CPNS sesuai formasi sebanyak 1.724 orang melalui pelaksanaan *e-recruitment*
 - Terlaksananya ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dan ujian dinas sebanyak 1.300 orang
- f. Program peningkatan dan kesejahteraan pegawai**
- Diterbitkannya Pergub Nomor 41 Tahun 2010 sebagai perubahan dari Pergub Nomor 215 Tahun 2009 tentang Tunjangan Kinerja Daerah
- g. Program pendidikan dan pelatihan**
- Terselenggaranya Diklat Prajabatan bagi 4.440 orang CPNS
 - Terselenggaranya Diklatpim tingkat IV, III dan II bagi 158 orang pegawai
 - Terlaksananya program tugas belajar jenjang pendidikan D3, S1 dan S2 (dalam dan luar negeri) sebanyak 99 orang
 - Terlaksananya ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa
- h. Program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan**
- Tersusunnya Rapergub tentang Kelembagaan Unit Kerja Perangkat Daerah, Bentuk Kop Naskah Dinas dan Stempel serta Papan Nama Instansi Perangkat Daerah, Layout/tata ruang pada SKPD/UKPD di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Standar Pelayanan Minimal pada SKPD/UKPD di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Analisa Jabatan pada SKPD/UKPD di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Wilayah Kota Administrasi
 - terselesaikannya Raperda tentang Lembaga Lain

i. Program peningkatan kesadaran hukum dan HAM

Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada aparatur, anggota organisasi wanita dan karang taruna dan anggota JDIH

j. Program pelayanan dan bantuan hukum,

- Terlaksananya pengurusan 51 perkara perdata dan TUN
- terselesaikannya 46 masalah sengketa pertanahan dan aset pemda di DKI Jakarta

k. Program peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah,

- Tersusunnya 418 LHP tepat waktu
- Tersusunnya 20 laporan periodik hasil monitoring dan status penyelesaian TLHP BPK-RI dan satu laporan APIPP
- Tersusunnya laporan periodik hasil monitoring dan status penyelesaian TLHP APIP sebanyak 2 (dua) laporan.
- Tersusunnya laporan hasil review keuangan pemerintah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2010

l. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah,

- Terselesaikannya pembahasan 19 Peraturan Daerah
- Terlaksananya Rapat Paripurna DPRD sebanyak 35 kali
- Terlaksananya Rapat Pimpinan Gabungan sebanyak 16 kali
- Terlaksananya kegiatan Badan Kehormatan, Badan Anggaran, Badan Legislasi Daerah dan Badan Musyawarah.
- Terselesaikannya penerimaan delegasi masyarakat kali dan dialog dengan instansi luar DKI Jakarta, Organisasi Kemasyarakatan dan Instansi terkait sebanyak 33 kali audiensi
- Terlaksananya sosialisasi kegiatan Dewan kepada masyarakat

m. Program keprotokolan daerah

- Terlaksananya penerimaan/pelayanan tamu pimpinan dari dalam dan luar negeri serta jamuan resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 610 kali
- Terselenggaranya pencahangan apel dan malam resepsi HUT Kota Jakarta sebanyak 3 (tiga) kegiatan
- Terlaksananya pengurusan paspor dan visa pimpinan, pejabat/pegawai di lingkungan pemprov DKI Jakarta
- Terlaksananya fasilitasi dan peningkatan pelayanan bagi Kedubes Negara sahabat sebanyak 32 kali

n. Program peningkatan kerjasama antar daerah

- Tersusunya evaluasi pelaksanaan kerjasama teknik dan jasa ekonomi luar negeri Pemprov DKI Jakarta sebanyak 6 (enam) naskah kerjasama
- Terfasilitasinya kunjungan delegasi kota-kota sister city Jakarta dalam rangka menindaklanjuti MOU
- Keikutsertaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada event-event yang diselenggarakan oleh kota-kota sister city, ANMC 21 tahun 2010, forum organisasi internasional tahun 2010 sebanyak 14 kali
- Terlaksananya fasilitasi kegiatan kerjasama FKD-MPU sebanyak 3 (tiga) kali
- Terlaksananya Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pelaksana Kerjasama Antar Daerah
- Terlaksananya fasilitasi kerjasama perbatasan/Jabodetabekjur serta Kerjasama Lembaga/Badan
- Terlaksananya sosialisasi Kerjasama Lembaga/Badan

**o. Program pelayanan kerumahtanggaan dan persandian
Terlaksananya pelatihan MFD dan komunikasi bagi anggota
satpamdal**

- Terlaksananya pembangunan sistem penemuan kembali naskah Dinas in Aktif/ Arsip dengan menggunakan perangkat elektronik
- Terlaksananya penyusunan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Tata Naskah Dinas
- Terlaksananya renovasi lantai 5 Blok G Balaikota DKI Jakarta untuk Ruang Kerja Deputy dan Asisten Deputy Gubernur

p. Program peningkatan kinerja ketentraman dan ketertiban umum,

- Terlaksananya pelayanan perizinan UUG sebanyak 3.760 izin baru
- Terlaksananya pengawasan dan penertiban PMKS, PK-5 dan PSK di Jalan Protokol pada 6 (enam) titik sasaran
- Terlaksananya penertiban bangunan liar di bantaran kali, jalur saluran dan kawasan prioritas pada 1.257 bangunan liar
- Terlaksananya Diklat Polisi Pamong Praja tingkat dasar bagi 375 orang serta bimbingan teknis Pemolisian Masyarakat bagi 1.715 orang
- Terlaksananya pengamanan dan penertiban gangguan Tramtibum pada Jalur Busway pada 3 (tiga) koridor
- Terlaksananya PAM Lokasi Bencana Siaga 1 dan 2 dengan peserta sebanyak 16.650 orang
- Terlaksananya wasriktib Perda 10 tahun 2004 dan HO STBLD No. 26 tahun 1926.
- Terlaksananya penanganan penyelesaian pengaduan masyarakat dalam sengketa tanah/bangunan dan gangguan lainnya
- Terlaksananya penertiban kegiatan pembuatan dan penjualan minuman keras, pengawasan dan penertiban angkutan liar dan terminal bayangan

- Terlaksananya pemantauan unjuk rasa, bencana, kerusuhan, kebakaran dan masalah sosial lainnya
- Terlaksananya operasi dan sidang Yustisi Perda No.8 Tahun 2007
- Terlaksananya Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)
- Terlaksananya pelatihan patroli Keamanan Sekolah
- Terlaksananya pengendalian anggota Linmas RT/RW dan Matrik Obyek Vital

q. Program peningkatan pengelolaan bahaya kebakaran,

- Terlaksananya pembentukan binaan SKKL pada 1 kota administrasi
- Berfungsinya gedung laboratorium kebakaran
- Terlaksananya inspeksi proteksi kebakaran dan sarana evakuasi kejadian kebakaran pada 240 bangunan tinggi
- Terlaksananya sosialisasi dan orientasi tugas-tugas Pemerintah Bersama Masyarakat dalam penanggulangan bencana banjir di Provinsi DKI Jakarta

Adapun *outcome* yang dihasilkan dari pelaksanaan program pada urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian antara lain:

- a. Terlaksananya administrasi keuangan daerah, sehingga mendapatkan peringkat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK
- b. Tersusunnya konsep pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) di tingkat kota administrasi
- c. Dipertahankannya respon time pemadam kebakaran 15 menit.
- d. Terlaksananya e-recruitment pegawai Pemprov DKI Jakarta sebanyak 1.724 CPNS sesuai formasi jabatan
- e. Diterapkannya sistem remunerasi (TKD)

- f. Terbentuknya polisi komunitas pada 34 RW di wilayah Provinsi DKI Jakarta

21. Urusan Ketahanan Pangan

Untuk urusan Ketahanan Pangan pada tahun 2010 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 31.565.376.322 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 26.529.941.209 atau 84,05%.

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan Ketahanan Pangan antara lain:

a. Program pengamanan sembilan bahan pokok (sembako)

- Terlaksananya fasilitasi pasar murah produk peternakan menjelang hari raya Idul Fitri meningkat dari 38,5 ton daging di tahun 2009 menjadi 40 ton daging di lima wilayah kota administrasi.
- Terlaksananya pasar murah menjelang Hari Raya Idul Fitri
- Terlaksananya penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) dan Pola Pangan Harapan (PPH)

b. Program peningkatan sarana dan prasarana ketahanan pangan

Terlaksananya lanjutan pembangunan gedung *workshop / processing unit* pasca panen seluas 804 m²

c. Program pelaksanaan SPM lain urusan Ketahanan Pangan,

- Terlaksananya fasilitasi dan sertifikasi sayuran ramah lingkungan (organik) seluas 9 ha, dengan rincian berupa pemberian bantuan pupuk kandang sapi 20.000 kg pupuk kandang ayam 20.000 kg dan bibit sayuran untuk 4 kelompok tani
- Terlaksananya penerapan intensifikasi sawah seluas 80 ha, dengan rincian Jakarta Utara seluas 30 Ha, Jakarta Timur 20 Ha dan Jakarta Barat 30 Ha
- Terlaksananya pengembangan dan fasilitasi sertifikasi sayuran ramah lingkungan

- Terlaksananya intensifikasi padi sawah
- Terlaksananya penyusunan Road Map Komoditas Unggulan DKI Jakarta

Adapun *outcome* yang dihasilkan dari pelaksanaan program pada urusan ketahanan pangan antara lain:

- a. Terinformasinya harga kebutuhan pokok masyarakat
- b. Tersedianya kebutuhan pokok masyarakat berupa :
 - Pasokan beras meningkat dari 1.104.922 Ton (2009) menjadi 1.254.939 Ton (2010)
 - Sayur-mayur 361.958 ton
 - Buah-buahan 294.844 ton
 - Pasokan daging sapi meningkat dari 41.425 Ton (2009) menjadi 108.979 ton (2010)
 - Pasokan daging ayam 49.050 ton
 - Pasokan telur 157.924 ton
 - Pasokan ikan meningkat dari 238.250 ton (2009) menjadi 327.813 ton (2010)

22. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Untuk urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2010 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 230.794.600.324 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 218.027.506.337 atau 94,47%.

Adapun *output* yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa antara lain:

- a. **Program peningkatan keberdayaan masyarakat kelurahan,**
 - Terlaksananya Penyiapan Masyarakat dalam pengelolaan Sampah Rumah Tangga sebanyak 600 Rumah Tangga
 - Terlaksananya Asistensi Penyelesaian Permasalahan Keuangan PPMK kepada 267 Kelurahan

- Terlaksananya Fasilitasi Penyelesaian Piutang Dana Bina Ekonomi PPMK yang tidak tertagih kepada 50 Kelurahan dengan tingkat tunggakan kategori tinggi
- Terlaksananya Pembentukan Posyantek Percontohan sebanyak 16 Posyantek
- Terlaksananya bulan bakti gotong royong masyarakat di 267 kelurahan
- Terpilihnya 6 kelurahan terbaik di DKI Jakarta, sebagai predikat juara I (satu) terpilih Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing Kota Administrasi Jakarta Utara yang kemudian mendapatkan penghargaan sebagai juara II (dua) Tingkat Nasional
- Terfasilitasinya 267 kelurahan yang mendapatkan bantuan hibah bina fisik lingkungan dan bina sosial PPMK
- Terlaksananya Fasilitasi Pendampingan Pengembangan Balai Warga sebanyak 10 wilayah

b. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan

- Terlaksananya penyusunan Model Teknik Partisipasi Masyarakat
- Terlaksananya Rakor Penanggulangan Kemiskinan
- Terlaksananya Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat sebanyak 340 Kader

Adapun *outcome* yang dihasilkan dari pelaksanaan program pada urusan pemberdayaan masyarakat dan desa antara lain:

- a. Juara Harapan I Kelurahan Terbaik pada Tahun 2009 (Kelurahan Ulujami) dan Juara II Kelurahan terbaik Tingkat Nasional pada Tahun 2010 (Kelurahan Semper Barat)
- b. Bertambahnya jumlah Posyantek Percontohan dari 5 Posyantek pada Tahun 2009 menjadi 20 Posyantek pada Tahun 2010

- c. Bertambahnya lokasi Percontohan yang menggunakan dan memanfaatkan TTG dari 12 lokasi pada Tahun 2009 menjadi 27 lokasi pada Tahun 2010
- d. Bertambahnya Balai Warga yang terbina dari 10 Balai Warga pada Tahun 2009 menjadi 20 Balai Warga pada Tahun 2010
- e. Bertambahnya Kader Pemberdayaan Masyarakat dari 906 kader pada Tahun 2009 menjadi 1.006 kader pada Tahun 2010
- f. Tersedianya Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta dalam Pemberdayaan Masyarakat yaitu :
 - Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 84 Tahun 2010 tentang Pengalihan Pengelolaan Dana Bina Ekonomi Program Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dari Dewan Kelurahan kepada Unit Pengelola Dana bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan
 - Keputusan Gubernur nomor 869/Tahun 2010 tentang Alokasi Dana Bina Fisik Lingkungan dan Bina sosial Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) tahun anggaran 2010

23. Urusan Statistik

Untuk urusan Statistik pada tahun 2010 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 3.825.000.000 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 3.426.350.000 atau 89,58%.

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan Statistik antara lain:

a. Program pengembangan statistik daerah

- Tersusunnya Jakarta/Wilayah Dalam Angka
- Tersusunnya updating Rumah Tangga Sasaran Tahun 2010
- Tersusunnya indikator kota (*Global City Indicators*)
- Tersusunnya indikator ekonomi
- Tersusunnya indikator konstruksi tahun 2010
- Tersusunnya indikator kesejahteraan masyarakat

Adapun *outcome* yang dihasilkan dari pelaksanaan program pada urusan statistik antara lain:

- a. Tersediannya data statistik yang dapat dimanfaatkan untuk perencanaan program pembangunan.
- b. Tersusunnya indikator asumsi makro dalam rangka penyusunan APBD maupun APBDP.
- c. Tersediannya data rumah tangga sasaran yang digunakan untuk pelayanan JPK Gakin.

24. Urusan Kearsipan

Untuk urusan Kearsipan pada tahun 2010 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 10.042.198.517 sedangkan realisasinya sebesar Rp. 7.224.149.970 atau 71,94%.

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan Statistik antara lain:

a. Program peningkatan pelayanan arsip daerah

- Terlaksananya penyusutan arsip sebanyak 10 (sepuluh) SKPD yang terdiri dari 12.765 berkas/dokumen dan 450 boks
- Tercapainya penyelamatan dan penggunaan arsip/dokumen yang bernilai guna dari 15 SKPD
- Terakuisinya arsip penting daerah dari 15 SKPD yang terdiri dari 4.843 berkas (122 box)
- Terdigitalisasinya arsip penting daerah sebanyak 1.050 lembar arsip
- Terlaksananya liputan peristiwa daerah yang penting/fenomenal sebanyak 180 liputan/rekaman
- Terekamnya informasi peristiwa daerah yang penting/fenomenal yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta (Narasumber 2 orang Mantan Gubernur Provinsi DKI Jakarta)

- Tersusunnya Pergub No. 99 tahun 2010 tentang Prosedur Pelayanan Kearsipan

b. Program Penyelamatan Arsip Daerah

- Meningkatnya kualitas tenaga SDM dalam rangka penyelamatan arsip dengan Terpilihnya Arsiparis Berprestasi di Provinsi DKI Jakarta sebanyak 5 orang
- Meningkatnya kemampuan 22 orang SKPD dalam mengelola dan menyelematkan arsip yang dilaksanakan melalui Workshop dan Bimbingan Teknis Kearsipan

c. Program peningkatan sarana dan prasarana Kearsipan,

- Tersedianya 4 unit lemari simpan arsip
- 1 unit *leafcasting*
- 10 buah *thermohigrometer*

d. Program pelaksanaan SPM lain urusan Kearsipan,

- 100 set kursi diklat bermeja, 1 unit LCD Projector, 10 unit printer, 6 unit alat penetralisir udara dan 1 set *sound system*
- Tersedianya sarana penunjang layanan kearsipan yang terdiri dari 60.000 boks arsip, 31 jenis ATK dan 10 jenis cetakan khusus
- Meningkatnya kenyamanan Gedung Arsip Jayakarta dengan dilakukannya pemeliharaan gedung yang mencakup jasa kebersihan, pemeliharaan ME, dan jasa keamanan
- Terpeliharanya sarana kearsipan yang terdiri dari 12 unit mobil operasioal dan mobil operaisonal khusus, 2 unit kendaraan, 50 unit komputer PC, 25 unit printer, 15 buah notebook dan 18 unit lemari simpan arsip (Kardex) serta 1 set peralatan *microfilm*
- Tersedianya boks arsip untuk SKPD – SKPD

Adapun *outcome* yang dihasilkan dari pelaksanaan program pada urusan kearsipan antara lain:

Dokumen/arsip daerah yang didokumentasikan melalui media sebanyak 177.500 halaman, 22.342 lembar foto serta 931 roll mikrofilm pada tahun 2009, menjadi 187.645 halaman, 27.929 lembar foto, 1.035 roll mikrofilm pada tahun 2010

25. Urusan Komunikasi dan Informatika

Untuk urusan Komunikasi dan Informatika pada tahun 2010 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 144.557.745.967 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 103.348.436.116 atau 71,49%.

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan Komunikasi dan Informatika antara lain:

a. Program pengembangan komunikasi informasi dan media massa

- Terlaksananya pelayanan informasi kegiatan Pemprov DKI Jakarta melalui website www.beritajakarta.com yaitu dalam bahasa Indonesia sebanyak 20 berita/hari dan dalam bahasa Inggris 15 berita/hari
- Terpublikasinya kebijakan program Pemprov DKI Jakarta melalui pemberitaan di radio sebanyak 570 berita
- Tersedianya sarana informasi kepada masyarakat melalui situs resmi www.jakartapro.go.id

b. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

- Pelaksanaan aplikasi asset teknologi informasi dengan berbasis web
- Tersedianya aplikasi pajak kendaraan bermotor yang mensuport kebutuhan pembayaran secara on line melalui bank
- Terbangunnya aplikasi sistem informasi dalam rangka *e-procurement (e-announcement dan e-regular tender)* sesuai peraturan perundang-undangan

c. Peningkatan Citra Positif Pemerintah

- Terlaksananya penyebaran informasi melalui jingle spot di radio di bidang tertib sosial dalam 5 (lima) tema
- Terlaksananya penyebaran informasi melalui televisi di bidang tertib sosial dalam 3 (tiga) tema
- Terlaksananya penyebaran informasi tentang program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di rubrik khusus melalui media cetak sebanyak 94 tema
- Terselenggaranya TV *magazine* Jakarta Untuk Semua melalui 2 TV lokal dan 1 TV asing
- Terlaksananya 6 kali kegiatan tatap muka/dialog publik dengan kelompok masyarakat dan 6 kali kegiatan tatap muka/dialog publik dengan majlis taklim

Adapun *outcome* yang dihasilkan dari pelaksanaan program pada urusan komunikasi dan informatika, antara lain :

- a. Meningkatnya jumlah kegiatan pemantauan, pendataan pengawasan dan pengendalian jasa bidang postel dari 8 kali per bulan (2009) menjadi 12 kali per bulan (2010)
- b. Meningkatnya penerapan *e-announcement* dari 487 SKPD / UKPD (2009) menjadi 587 SKPD/UKPD (2010) pada 11.644 kegiatan
- c. Meningkatnya penerapan *e-regular tender* dari 100 SKPD (2009) menjadi 193 SKPD/UKPD (2010) pada 3.409 kegiatan
- d. Berkurangnya SMS pengaduan warga dari 2.500 SMS menjadi 1.123 SMS
- e. Meningkatnya kunjungan website jakarta.go.id dari 1.000.000 pengunjung menjadi 2.005.706 pengunjung
- f. Meningkatnya kunjungan media *online* warta DKI “beritajakarta.com” dari 837.000 pengunjung menjadi 2.311.040 pengunjung
- g. Terintegrasinya sistem informasi perencanaan dan keuangan berbasis internet

- h. Berfungsinya sistem monitoring pelaksanaan APBD berbasis internet (*e-monev*) dan dapat diakses melalui *mobile device* (M-Gov)

26. Urusan Perpustakaan

Untuk urusan Perpustakaan pada tahun 2010 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 75.641.965.563 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 60.819.819.036 atau 80,40%.

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan Perpustakaan antara lain:

a. Program pengembangan perpustakaan Jakarta

- Tersedianya layanan Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Administrasi Jakarta Utara yang baru dengan kelengkapan perabot, peralatan, Jaringan LAN dan komputer untuk layanan internet kepada masyarakat sebanyak 20 unit.
- Tersedianya Gedung Perpustakaan Umum Kota Administrasi Jakarta Barat yang baru sebagai upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan pelayanan perpustakaan kepada masyarakat.
- Tersusunnya Masterplan dan Kajian Gedung Perpustakaan Daerah Bertaraf Internasional

b. Program pemberdayaan komunitas perpustakaan dalam pengelolaan perpustakaan

- Bertambahnya bahan perpustakaan sebanyak 1.805 judul, 8.234 eksemplar
- Terlaksananya kegiatan bedah buku, talk show, dan layanan bercerita sebanyak 8 (delapan) kali
- Terlaksananya pameran sebanyak 6 (enam) kali
- Terselenggaranya Pemilihan Abang dan Nene Buku dan Hari Anak Jakarta Membaca yang diikuti oleh lebih dari 5.000 anak Jakarta

- Terjalinnya kerjasama dengan IKRW (Ikatan Ketua RT/RW Seluruh DKI Jakarta) dalam rangka pemasyarakatan Taman Bacaan Masyarakat

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan

- Meningkatnya sistem pengamanan layanan koleksi perpustakaan dengan pemasangan dan revitalisasi fungsi CCTV
- Meningkatnya sarana komputer sebanyak 5 unit untuk layanan penelusuran internet gratis di perpustakaan
- Bertambahnya 4 unit mobil layanan keliling untuk peningkatan jangkauan layanan perpustakaan di Jakarta Timur dan Jakarta Barat

d. Program pelaksanaan SPM lain urusan perpustakaan

- Terhimpunnya 11.633 judul dan 12.769 eksemplar sebagai hasil pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam di Provinsi DKI Jakarta.
- Terlaksananya layanan perpustakaan kepada masyarakat selama 7 Hari dalam seminggu selama 52 minggu (1 Tahun)
- Terselenggaranya layanan perpustakaan keliling di 36 Kecamatan di Provinsi DKI Jakarta
- Beroperasionalnya layanan perpustakaan di Kepulauan Seribu

Adapun *outcome* yang dihasilkan dari pelaksanaan program pada urusan perpustakaan antara lain:

- a. Terlaksananya pembangunan 1 Gedung Perpustakaan Daerah yang Berstandar Internasional di Jakarta Utara
- b. Terlaksananya pembangunan tahap I, 1 Gedung Perpustakaan Daerah yang Berstandar Internasional di Jakarta Barat
- c. Bertambahnya jumlah pengunjung perpustakaan dari 602.521 orang tahun 2009, menjadi 604.245 orang pada tahun 2010

- d. Bertambahnya jumlah TBM (Taman Bacaan Masyarakat) dari 136 TBM tahun 2009, menjadi 140 TBM pada tahun 2010
- e. Jumlah perpustakaan keliling tahun 2009 berjumlah 21 mobil tahun 2009, menjadi 25 unit pada tahun 2010
- f. Meningkatnya kompetisi pengelola taman bacaan dari 126 orang pada Tahun 2009 menjadi 140 orang pada Tahun 2010

27. Urusan Pariwisata

Untuk urusan Pariwisata pada tahun 2010 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 102.846.500.000 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 91.193.652.192 atau 88,67%.

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan Pariwisata antara lain:

a. Program pengembangan destinasi pariwisata,

- Terselenggaranya pemilihan Abang dan Nene Jakarta Tahun 2010
- Terselenggaranya *Internasional Kite Festival*
- Terselenggaranya *Jakarta Fashion Week*

b. Program pengembangan pemasaran pariwisata,

- Terlaksananya promosi pariwisata luar negeri sebanyak 9 event/10 negara (Promosi Pariwisata di Kawasan UEA dan Saudi Arabia, di China, di AS, di Rusia, di ITB Berlin, Turnamen *Enjoy Golf, Hi Seoul Festival* 2010, Festival Indonesia di Melbourne-Australia, World Expo Shanghai-China)
- Terlaksananya Promosi Pariwisata Dalam Negeri sebanyak 1 event/6 kota (*Jakarta Tourism Expo/JTE* 2010)
- Terlaksananya pemasangan iklan di media elektronik dalam negeri sebanyak 19 stasiun dan luar negeri sebanyak 4 stasiun
- Terlaksananya Pemasangan iklan di media cetak dalam negeri sebanyak 9 media cetak dan luar negeri sebanyak 6 media cetak

c. Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata

- Terlaksananya klasifikasi dan reklasifikasi usaha akomodasi
- Terlaksananya penilaian adhikarya wisata bagi pelaku kepariwisataan
- Terlaksananya forum kemitraan pengrajin dan pemilik home industri dengan pengelola industri pariwisata
- Terlaksananya pemberian penghargaan adhikarya wisata pada pelaku kepariwisataan
- Terlaksananya pemberdayaan masyarakat di lokasi potensi wisata

d. Program Pengembangan Kebijakan Urusan Pariwisata

- Terlaksananya Kompilasi Data Kepariwisata Jakarta 2010
- Terlaksananya Neraca Satelit Pariwisata Daerah 2010
- Terlaksananya Kajian Persepsi Wisatawan Mancanegara terhadap *Brand "Enjoy Jakarta"*

e. Program Fasilitas Wisata *Meeting, Incentive, Convention Exhibition (MICE)*

- Terlaksananya promosi pariwisata MICE Jakarta
- Terlaksananya operasional Biro Konvensi Jakarta (JCB)

f. Program Peningkatan Iklim Usaha Kepariwisata

- Terlaksananya penilaian kegiatan hiburan daerah (sensor artis asing)
- Terlaksananya pengawasan industri pariwisata dan kebudayaan
- Terlaksananya pengawasan dan pengendalian khusus industri pariwisata pada bulan suci ramadhan

g. Program Pembinaan Keanggotaan pada Lembaga/ Forum Kepariwisata Nasional dan Internasional

- Terlaksananya Kerjasama Kepariwisata dan Kebudayaan Antar Daerah di Lingkungan Mitra Praja Utama

- Terlaksananya Forum Friends of Jakarta Tourism
- Terlaksananya Keikutsertaan pada Council of Promotion Tourism in Asia (CPTA), Tourism Promotion Organization (TPO) Forum, International Congress and Convention Association (ICCA), Asian Network of Major Cities 21 di Tokyo

Adapun *outcome* yang dihasilkan dari pelaksanaan program pada urusan pariwisata antara lain :

- a. Jumlah kunjungan wisman dari 1.451.914 orang (2009) menjadi 1.592.600 orang (2010), kunjungan wisnus dari 16.708.834 orang (2009) menjadi 18.045.541 orang (2010)
- b. Meningkatnya lama tinggal wisman 3,48 hari (2009) menjadi 3,95 hari (2010)
- c. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata, pada tahun 2010 mencapai Rp. 1.839.655.020.628,- atau mengalami kenaikan 12,36 % dibanding 2009.
- d. Meningkatnya penerimaan devisa wisman dari US\$ 736,70 juta tahun 2009 menjadi US\$ 769,72 juta Tahun 2010
- e. Meningkatnya Penerimaan devisa wisnus Rp. 14,17 triliun Tahun 2009 menjadi Rp. 14,84 triliun Tahun 2010

28. Urusan Perikanan, Kelautan, dan Peternakan

Untuk urusan Perikanan, Kelautan, dan Peternakan pada tahun 2010 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 320.872.183.685 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 278.297.418.962 atau 86,73%.

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan Perikanan, Kelautan, dan Peternakan antara lain:

- a. **Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan**
 - Terlaksananya Pengawasan Mutu di UPI (pra SKP dan verifikasi HACCP).

- Terlaksananya pengawasan mutu hasil perikanan di pasar swalayan dan sentra hasil perikanan
- Terlaksananya pengawasan mutu ikan diatas kapal penangkap dan pengangkut ikan
- Terlaksananya Gelar Hasil Perikanan 1 kali
- Terlaksananya pengawasan mutu ikan di atas kapal penangkap dan pengangkut ikan
- Terlaksananya koordinasi regional pemanfaatan SDI dengan Kalimantan Barat dan Bangka Belitung
- Terlaksananya pelatihan ToT perikanan budidaya

b. Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan

- Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan pembangunan perikanan tangkap
- Terlaksananya monitoring dpl, fish shelter dan transplantasi karang di 3 lokasi (P. Kelapa, P. Kaliage, Karang Waroh, P. Pramuka Gosong Pramuka dan P. Pari)
- Terlaksananya rembug KTNA Tingkat Provinsi DKI Jakarta, dengan peserta 30 KTNA
- Terlaksananya peningkatan nilai tambah komoditi perikanan budidaya
- Terlaksananya pengadaan peragaan teknologi penangkapan ikan (Fish Finder, GPS, Fish Elektric, Jaring (Rajungan, Rampus, Gillnet)
- Terlaksananya monitoring dan evaluasi DPL, fishshelter, dan transplantasi karang
- Terlaksananya pelatihan keahlian teknologi nautika penangkapan ikan bagi nelayan

c. Program peningkatan sarana dan prasarana perikanan, kelautan, dan peternakan

- Terlaksananya Pengadaan sarana teknologi Budidaya laut (keramba jaring apung) sebanyak 2 unit
- Terlaksananya peningkatan teknologi budidaya ikan konsumsi
- Terlaksananya pembangunan Breakwater (Tetrapods) di Dermaga sebelah barat PPI Muara Angke sepanjang 1110 m
- Terlaksananya peninggian Breakwater sebelah barat (alur masuk Pelabuhan Perikanan Muara Angke) sepanjang 336 m
- Terlaksananya pembangunan Tempat Pelelangan Ikan Hygienis di Muara Angke seluas 1025 m²
- Terlaksananya pembangunan docking kapal perikanan tradisional di Muara Angke sejumlah 4 unit
- Terlaksananya pembangunan pompa dan instalasi air untuk pencucian ikan di TPI
- Terlaksananya pengadaan alat peraga teknologi penangkapan ikan

d. Program pengembangan usaha peternakan, budidaya ikan konsumsi, ikan hias dan perikanan tangkap

- Terlaksananya pengembangan mutu hasil perikanan sebagai otoritas kompeten lokal
- Terlaksananya pengembangan aplikasi teknologi perikanan budidaya
- Terlaksananya pengembangan informasi perikanan budidaya

e. Program pengelolaan sumberdaya peternakan perikanan dan kelautan

- Terlaksananya pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan
- Terlaksananya pembinaan nelayan Provinsi DKI Jakarta tentang peraturan dan perundangan kepada 30 orang

- Terlaksananya pemberdayaan wanita nelayan sebanyak 30 orang, di Kecamatan Kepulauan Seribu Utara dan Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan
- Terlaksananya operasi pengawasan dan pengendalian sumberdaya ikan
- Terlaksananya Festival Bahari (Pembinaan Kader Bina Cinta Laut dan Under Water Cleanup)
- Terlaksananya Studi Daerah Pemijahan Ikan (Spawning Ground)
- Terlaksananya Sosialisasi Rekomendasi Hasil Analisa (CPUE, TED, RPP)
- Terlaksananya pembinaan dan pengembangan teknologi penangkapan ikan
- Terlaksananya transplantasi karang dan penyulaman

f. Program pemberdayaan komunitas peternakan, perikanan dan kelautan

Terlaksananya pengembangan kapasitas komunitas nelayan dalam pengelolaan daerah perlindungan laut (DPL)

g. Program peningkatan produksi hasil peternakan

- Terlaksananya peningkatan koordinasi pengawasan mutu bibit ternak sapi perah dan kambing perah dengan daerah asal
- Terlaksananya evaluasi ketersediaan ayam dalam rangka mendukung ketahanan pangan

h. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

- Terlaksananya pemeriksaan kesehatan pemotongan hewan pada hari besar keagamaan
- Terlaksananya pengawasan dan penertiban peredaran pangan asal hewan di perusahaan PAH, Pasar Tradisional dan pemasok pangan asal hewan

- Terlaksananya lanjutan pembangunan RPH Babi Kapuk sebanyak 1 unit
- Terlaksananya penanggulangan, pemberantasan dan pengendalian penyakit hewan menular
- Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana pemotongan babi sebanyak 1 unit
- Terlaksananya penertiban pemasukan unggas ke wilayah DKI Jakarta di 5 wilayah DKI Jakarta
- Terlaksananya pengadaan sarana RPU-SK
- Terlaksananya pengendalian penyakit Avian Influenza
- Terlaksananya operasional malam hari RPH Cakung dan RPH Kapuk

Adapun *outcome* yang dihasilkan dari pelaksanaan program pada urusan perikanan, kelautan, dan peternakan antara lain:

- a. Terpenuhinya pasokan kebutuhan daging murah ke masyarakat pada hari-hari besar keagamaan sebanyak 40 Ton Daging meningkat dari 38,5 Ton di tahun 2009
- b. Meningkatnya jaminan keamanan ikan yang dipasarkan di swalayan dan sentra pemasaran sebesar 2%
- c. Meningkatnya optimalisasi penangkapan ikan dan produksi hasil perikanan rata-rata 5% per tahun yakni sebanyak 145.839,4 ton pada tahun 2010
- d. Meningkatnya populasi ikan konsumsi di perairan umum wilayah DKI Jakarta sebesar 5%
- e. Meningkatnya produksi hasil perikanan budidaya air laut di DKI Jakarta sebesar 10% dari 1.316,84 ton per 2010
- f. Meningkatnya produksi hasil perikanan budidaya air tawar di DKI Jakarta sebesar 18,6 % dari 14.704,51 ton (Tahun 2009) yakni sebesar 17.439,55 Ton

29. Urusan Perdagangan

Untuk urusan Perdagangan pada tahun 2010 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 114.372.863.610 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 92.874.254.215 atau 81,20%.

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan Perikanan, Kelautan, dan Peternakan antara lain:

a. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

- Terlaksananya pasar lelang foward kebutuhan pokok masyarakat DKI Jakarta pada tahun 2010 dengan terealisasi 15 komoditas yang terjual
- Terlaksananya peningkatan perlindungan konsumen bagi masyarakat di 5 wilayah kota administrasi terhadap 200 orang pelaku usaha
- Terlaksananya peningkatan pemahaman kemetrolagian bagi pengusaha SPBU di 5 wilayah Kota Administrasi dengan peserta 270 pelaku usaha SPBU
- Terlaksananya Sosialisasi Perda Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pengendalian Mutu dan Keamanan Komoditas Hasil Pertanian

b. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri

- Terlaksananya pelaksanaan Pasar Lelang di DKI Jakarta
- Terlaksananya keikutsertaan pada Pameran Produk Industri Tahun 2010 sebanyak 10 kali

c. Program peningkatan promosi dan pengembangan ekspor

- Partisipasi pada forum ANMC (*Annual Network Meeting Corporate*) 21 di Jepang
- Partisipasi Promosi Potensi Balai Tekstil Jakarta pada Bulan Mutu BSN dan pameran dalam negeri

d. Program pengembangan strategi industri kecil dan menengah,

- Jumlah Pengusaha di Bidang Telematika yang diberdayakan sebanyak 5 pengusaha
- Tersedianya data industri di DKI Jakarta yang up to date
- Terlaksananya pendampingan bimbingan pengembangan industri kreatif
- Terlaksananya Kajian Komoditi Bidang Industri dan Energi pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Marunda sejumlah 1 kegiatan
- Terlaksananya pemberdayaan dan pengembangan industri kreatif bagi 10 perusahaan
- Terlaksananya pemetaan Data Industri di DKI Jakarta sejumlah 1 kegiatan

e. Program peningkatan kualitas produk sentra industri

- Terlaksananya Pemilihan Nominasi Penerima Penghargaan Upakarti tahun 2010
- Terlaksananya partisipasi kegiatan Mitra Praja Utama (MPU) bidang industri dan energi sebanyak 1 kali
- Terlaksananya pendampingan persiapan dalam rangka SNI wajib komoditi helm sebanyak 2 unit usaha
- Terlaksananya penerapan standar keamanan pangan GMP pada industri pangan di 3 industri
- Terlaksananya pemanfaatan *workshop* dalam rangka pembinaan dan pelayanan industri kecil dan menengah (IKM) sebanyak 1 kali

f. Program peningkatan sarana dan prasarana Perdagangan

- Terbangunnya Gedung workshop di PIK Pulogadung
- Terpeliharanya Gedung Dinas Perindustrian dan Energi
- Terlaksananya rehab Gedung Dinas Perindustrian dan Energi
- Terlaksananya pengadaan peralatan kemetrolagian
- Terlaksananya rehab workshop Balai Tekstil

- Terlaksananya pengadaan alat uji laboratorium
- Terlaksananya pengadaan impact tester dan dispersi karbon hitam
- Terlaksananya pengembangan instalasi uji meter air kapasitas besar

Adapun *outcome* yang dihasilkan dari pelaksanaan program pada urusan perdagangan antara lain:

- a. Terpenuhinya 19 jenis kebutuhan pokok pada masyarakat.
- b. Meningkatnya intensitas pelaksanaan pasar lelang Foward Kebutuhan Pokok Masyarakat DKI Jakarta Tahun 2009 adalah 15 transaksi senilai Rp 8 miliar lebih, mengalami peningkatan pada tahun 2010 menjadi 19 Transaksi dengan nilai Rp. 15.070.300.000 ,-
- c. Bertambahnya perusahaan yang berkualitas ekspor, sebanyak 1%
- d. Terjalannya kontak bisnis/dagang dengan pelaku usaha di Jepang maupun pelaku usaha dari negara Anggota ANMC 21 sebagai penetrasi pasar serta dapat meningkatnya ekspor untuk produk unggulan dimaksud
- e. Tersedianya Data Komoditi Potensial Industri dan Pemanfaatan KEK Marunda bagi Perindustrian dan Energi
- f. Meningkatnya sarana dan prasarana alat uji kemetrollogian

C. PROGRAM PRIORITAS WILAYAH

1. Kota Administrasi Jakarta Pusat

Program yang telah dilaksanakan dan *output* yang dihasilkan pada pelaksanaan program prioritas wilayah Jakarta Pusat pada tahun 2010 adalah :

a. Bangun Praja / Adipura

- Terlaksananya pengelolaan sampah sebanyak 5.250 m3 per hari
- Diraihnya Penghargaan Adipura untuk yang keenam kalinya (2004-2010)

b. RW Binaan Kumuh

Terlaksananya penataan RW Kumuh sebanyak 22 RW

c. Gerakan Jumat Sehat

- Terlaksananya Gerakan Jumat Sehat di Kota Administrasi Jakarta Pusat
- Berkurangnya jumlah kasus baru DBD (*Incident Rate*) sebanyak 2.32 persen dari 254.3/100.000 penduduk (2009) menjadi 248.4/100.000 penduduk (2010)
- Terlaksananya penanganan DBD pada 10 Kelurahan rawan DBD

d. Peningkatan Pelayanan Terpadu Satu Atap

- Terlaksananya pelayanan terpadu satu pintu sebanyak 18 jenis pelayanan
- Terintegrasinya 18 jenis layanan melalui sistem pelayanan terpadu satu atap yang berfungsi untuk pelayanan 107 jenis layanan oleh 11 unit kerja

e. Penataan Kawasan Khusus / Unggulan

- Terlaksananya penataan kawasan Monas sebagai *landmark* Kota Jakarta yang berfungsi sebagai pusat budaya, wisata dan rekreasi

Adapun *outcome* yang dihasilkan dari pelaksanaan program prioritas di Kota Administrasi Jakarta Pusat, antara lain :

- a. Diraihnya penghargaan Adipura pada tahun 2010
- b. Berkurangnya jumlah RW Kumuh sebanyak 32% dari total 30% yang ditargetkan sebelumnya
- c. Berkurangnya jumlah kasus baru DBD (*Incident Rate*) sebanyak 2.32 persen dari 254.3/100.000 penduduk (2009) menjadi 248.4/100.000 penduduk (2010)

- d. Meningkatnya pelayanan perizinan berbasis pelayanan terpadu satu pintu
- e. Tertatanya kawasan Monas sebagai *landmark* Kota Jakarta yang berfungsi sebagai pusat budaya, wisata dan rekreasi

2. Kota Administrasi Jakarta Utara

Program yang telah dilaksanakan dan *output* yang dihasilkan pada pelaksanaan program prioritas wilayah Jakarta Utara pada tahun 2010 adalah :

a. Bangun Praja / Adipura

Terkoordinasinya Program Bangun Praja di 135 titik pantau

b. RW Binaan Kumuh

- Peningkatan jalan lingkungan dan saluran airnya pada 6 Kelurahan
- Berkurangnya jumlah RW Kumuh sebanyak 29%
- Terselenggaranya perbaikan kampung di 7 (tujuh) lokasi terpadu, yaitu Sunter Jaya, Tugu Selatan, Papanggo, Pajagalan, Rawa Badak selatan, Marunda dan Semper

c. Gerakan Jumat Sehat

- Berkurangnya angka kesakitan DBD sebesar 13.50% dari 5571 kasus (2009) menjadi 4819 kasus (2010)
- Terselenggaranya 170 RW Siaga

d. Peningkatan Pelayanan Terpadu Satu Atap

- Terlaksananya peningkatan Aparatur dalam penyelenggaraan Pelayanan Prima Kota Adm JU
- Terlaksananya pengembangan Informasi Pelayanan Prima Melalui Petugas Pelayanan Umum di Kelurahan
- Terlaksananya peningkatan kesejahteraan apatur dalam penyelenggaraan Pelayanan Prima Kota Adm Jakut

- Terlaksananya Lomba Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik pada PKM Kota Adm JU
- Terlaksananya pembinaan pelayanan publik di 6 Kecamatan Kota Adm JU
- Terintegrasinya 17 jenis layanan melalui sistem pelayanan terpadu satu atap yang dilaksanakan oleh 14 UKPD di lingkungan Jakarta Utara

e. Penataan Kawasan Khusus / Unggulan

- Terlaksananya koordinasi Pelaksanaan Festival Pesisir Jakarta Utara
- Terlaksananya pembangunan 4 Gapura Wisata di Jakarta Utara
- Tertatanya Kawasan Islamic Center, Kawasan Tugu dan Kawasan Sunda Kelapa sebagai kawasan budaya dan sejarah
- Tertatanya tiga jalur unggulan (Yos Sudarso, Gunung Sahari dan Jembatan Tiga) sebagai pintu gerbang kota Jakarta Utara
- Tertatanya jalan sejajar di bawah kolong tol (kawasan Sungai Bambu, Warakas dan Papanggo)

Adapun outcome yang dihasilkan dari pelaksanaan program prioritas di Kota Administrasi Jakarta Utara, antara lain :

- a. Diraihnya penghargaan Adipura Tahun 2010
- b. Berkurangnya jumlah RW Kumuh sebanyak 29%
- c. Berkurangnya angka kesakitan DBD sebesar 13.50% dari 5571 kasus (2009) menjadi 4819 kasus (2010)
- d. Meningkatnya pelayanan perizinan yang makin sesuai dengan standar mutu ISO 9001-2000
- e. Meningkatnya kunjungan wisata ke Jakarta Utara

3. Kota Administrasi Jakarta Barat

Program yang telah dilaksanakan dan *output* yang dihasilkan pada pelaksanaan program prioritas wilayah Jakarta Barat pada tahun 2010

adalah :

a. Bangun Praja / Adipura

- Terlaksananya pembinaan Adiwiyata
- Terlaksananya Bina Lomba Sekolah Sehat pada 8 sekolah
- Terlaksananya koordinasi program Bangun Praja di 144 titik pantau
- Terlaksananya monitoring pada 24 Puskesmas di lokasi titik pantau Adipura
- Terlaksananya pengelolaan sampah dengan sistem Zero Waste di 8 lokasi
- Terlaksananya pemilahan dan pengomposan sampah di 8 RW, 8 Kelurahan dan 8 Kecamatan
- Terlaksananya peningkatan dipo sampah di 4 lokasi
- Tersedianya 14 unit bak kontainer 6 m³
- Tersedianya 16 unit bak kontainer 10 m³
- Tersedianya 200 unit tong pilah sampah
- Tersedianya 58 buah gerobak Sampah
- Tersedianya 18.420 pohon pelindung/tanaman hias
- Terlaksananya pemeliharaan taman seluas 74.355 m²
- Terlaksananya pemeliharaan jalur hijau seluas 206.307 m²

b. RW Binaan Kumuh

- Terlaksananya pendampingan pada 4 Kelurahan sebagai langkah pengembangan dalam rangka perbaikan kampung
- Terlaksananya peningkatan prasarana lingkungan permukiman seluas 32.211 m²
- Terlaksananya peningkatan pemberdayaan masyarakat di 56 Kelurahan
- Terlaksananya peningkatan prasarana lingkungan permukiman seluas 54.175 m²

- Terlaksananya penataan dan penghijauan kawasan permukiman di 3 kelurahan
- Terlaksananya pemeliharaan dan perbaikan jalan orang seluas 28.710 m²

c. Gerakan Jumat Sehat

- Terlaksananya penggerakan masyarakat dalam kegiatan kerja bakti lingkungan (K3) di 8 Kecamatan
- Terselenggaranya Program P2B2 & Pertemuan Teknis DBD yang sesuai SOP pada 74 Puskesmas

d. Peningkatan Pelayanan Terpadu Satu Atap

- Terlaksananya 71 jenis pelayanan terpadu di Kota Administrasi Jakarta Barat
- Terpasangnya 4 unit katalis jaringan komunikasi gedung blok B
- Tersedianya 10 unit perangkat Hardware untuk mendukung sistem informasi pelayanan terpadu yang disediakan
- Terlaksananya satu sistem informasi Pelayanan Terpadu
- Tersedianya 14 unit operasional dan fasilitator Pelayanan Satu Atap / Terpadu
- Terselenggaranya Pembinaan Aparatur di Bidang Pelayanan Publik Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat yang diikuti oleh 150 peserta
- Terlaksananya penataan ruang 14 unit Pelayanan Terpadu Kantor Walikota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2010

e. Penataan Kawasan Khusus / Unggulan

- Terlaksananya pengembangan Kawasan/strategis Khusus Kota Tua sebagai pusat wisata budaya sejarah
- Terlaksananya pengembangan Kawasan/strategis Khusus Glodok sebagai pusat perdagangan elektronik

- Terlaksananya pengembangan Kawasan/strategis Khusus Sentra Primer Baru sebagai kawasan perdagangan dan jasa
- Terlaksananya pengembangan Kawasan/strategis Khusus Rawa Buaya sebagai sentra usaha mikro dan kecil

Adapun *outcome* yang dihasilkan dari pelaksanaan program prioritas di Kota Administrasi Jakarta Barat, antara lain :

- a. Diraihnya penghargaan Adipura Tahun 2010
- b. Tertatanya RW Kumuh sebanyak 25 RW dari 95 RW Kumuh
- c. Berkurangnya jumlah kasus DBD sebanyak 60%
- d. Terintegrasinya 71 jenis Pelayanan Terpadu di Kota Adm. Jakarta Barat
- e. Tertatanya kawasan strategis / khusus Kota Tua, Glodok, Sentra Primer Baru dan Rawa Buaya

4. Kota Administrasi Jakarta Selatan

Program yang telah dilaksanakan dan *output* yang dihasilkan pada pelaksanaan program prioritas wilayah Jakarta Selatan pada tahun 2010 adalah :

a. Bangun Praja / Adipura

- Terlaksananya pengelolaan kebersihan, keindahan dan kesehatan lingkungan sekolah pada 140 sekolah
- Terlaksananya peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah
- Terlaksananya pengendalian, penanganan, dan penanggulangan kebersihan dan sarana kebersihan pada 10 kecamatan
- Terlaksananya penertiban 15 kawasan dari parkir liar dan angkutan perbatasan
- Terlaksananya penertiban 2 (dua) kawasan terminal angkutan umum
- Terbangunnya 7 (tujuh) unit halte bus tipe betawi

- Terlaksananya pemeliharaan 92 unit halte bus
- b. RW Binaan Kumuh**
- Terlaksananya perbaikan Prasarana Lingkungan Permukiman Jalan Orang / Lingkungan / Saluran pada 8 RW
- c. Gerakan Jumat Sehat**
- Terlaksananya antisipasi lonjakan kasus DBD pada 10 kecamatan
 - Terlaksananya survey kasus DBD berdasarkan PE (+) dengan status angka bebas jentik
 - Terlaksananya 24 kali GJS bersama dokter dan pemberdayaan perempuan
 - Terlaksananya pembinaan PHBS dan Evaluasi Kinerja PHBS kepada 700 orang
 - Terlaksananya pengembangan 140 RW siaga
 - Terlaksananya penyehatan lingkungan permukiman pada 10 Kecamatan Jakarta Selatan
 - Terlaksananya monitoring pelaksanaan Pemberantasan Sarang Nyamuk pada 65 Kelurahan
- d. Peningkatan Pelayanan Terpadu Satu Atap**
- Terlaksananya pelayanan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) di 10 Kecamatan
 - Terlaksananya pelayanan RTLB di Kota Adm. Jakarta Selatan di 10 Kecamatan
 - Implementasi sistem pelayanan terpadu prima
- e. Penataan Kawasan Khusus / Unggulan**
- Terlaksananya penataan RTH Kawasan Blok M
 - Terlaksananya penataan Hijau Kawasan Pasar Minggu

- Terlaksananya pembangunan/Peningkatan Saluran Kawasan Blok M
- Terlaksananya pembangunan saluran kawasan Pasar Minggu
- Terlaksananya peningkatan sarana prasarana jalan dan trotoar di Kawasan Pasar Minggu
- Terlaksananya pemeliharaan Berat Layer Jalan Kawasan Pasar Minggu
- Terlaksananya peningkatan sarana prasarana saluran di Kawasan Pasar Minggu
- Terlaksananya revitalisasi Lokbin di Kawasan pasar Minggu
- Terlaksananya rehabilitasi saluran kawasan Blok M

Adapun *outcome* yang dihasilkan dari pelaksanaan program prioritas di Kota Administrasi Jakarta Selatan, antara lain :

- a. Teraihnya Adipura Kencana tahun 2010 diperolehnya Adipura Kencana ke- 7 tahun 2010
- b. Berkurangnya jumlah RW kumuh sebesar 30%
- c. Tertatanya kawasan unggulan di Jakarta Selatan sebesar 10%
- d. Tercapainya target penurunan jumlah incident rate sebesar 300 per 100.000 penduduk

5. Kota Administrasi Jakarta Timur

Program yang telah dilaksanakan dan *output* yang dihasilkan pada pelaksanaan program prioritas wilayah Jakarta Timur pada tahun 2010 adalah :

a. Bangun Praja / Adipura

- Terkoordinasinya 40 SKPD/UKPD dalam pelaksanaan program UKS
- Terlaksananya koordinasi 25 lokasi pembangunan dan penataan prasarana jalan, saluran, jembatan dan waduk/situ
- Terlaksananya perbaikan jalan sepanjang 36.243 m

- Terlaksananya pengurasan saluran air sepanjang 26.868 m.
- Terlaksananya pemeliharaan transito sampah sebanyak 8 unit
- Terlaksananya pemeliharaan 6 unit dipo sampah
- Terlaksananya penanaman 730 pohon
- Terlaksananya penghijauan Lingkungan sebanyak 1000 pohon
- Terlaksananya penyulaman tanaman sebanyak 908 pohon
- Terlaksananya pemeliharaan 2 unit landasan TPS
- Terlaksananya peningkatan dan pemeliharaan hutan kota pada 10 kecamatan
- Terlaksananya penopongan pohon sebanyak 4.022 pohon
- Terlaksananya pemeliharaan/Perawatan PJU dan Sarana Umum bulan Januari s.d. Juni 2010 dan bulan Juli - Desember 2010 wilayah Kota adm. Jakarta Timur pada 93.304 titik lampu PJU
- Terlaksananya pengembangan sistem drainasse sepanjang 20.634 m
- Terlaksananya pemeliharaan saluran drainase sebanyak 279.431 m²
- Terlaksananya pengadaan 291 tong sampah pilah
- Terlaksananya pemeliharaan 143.646 m² taman di Jakarta Timur
- Terlaksananya pemeliharaan 886.508 m² jalur hijau di Jakarta Timur
- Terlaksananya penertiban dan pengamanan 100 bangunan/gubuk liar di atas bantaran kali dan di atas RTH

b. RW Binaan Kumuh

- Terlaksananya koordinasi dengan 375 organisasi dalam kegiatan Program Kota Sehat
- Terlaksananya koordinasi dengan 375 organisasi dalam kegiatan RW Siaga
- Terlaksananya koordinasi dengan 90 organisasi dalam kegiatan Pengendalian dan Pemantauan Pendistribusian Raskin

- Terlaksananya koordinasi dengan 375 organisasi dalam kegiatan RW Asmita
- Terlaksananya kordinasi dengan 170 organisasi dalam kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan perempuan dalam pembuatan biopori
- Terlaksananya koordinasi dengan 170 organisasi dalam kegiatan P2WKSS
- Terlaksananya kordinasi dengan 375 organisasi dalam kegiatan penanggulangan kasus gizi buruk
- Terlaksananya koordinasi dengan 195 organisasi dalam kegiatan posyandu
- Terlaksananya koordinasi dengan 170 organisasi dalam kegiatan TNI Manunggal KB Kesehatan
- Terlaksananya koordinasi dengan 180 organisasi dalam pemberdayaan potensi lembaga kesejahteraan sosial
- Terlaksananya pengadaan 797 gerobak sampah
- Terlaksananya peningkatan 10 RW Asmita di 10 kecamatan
- Terlaksananya sosialisasi bagi 20 RW dalam pengelolaan sampah dengan sistem 3R
- Terlaksananya pembinaan penghijauan lingkungan di 10 RW
- Terlaksananya pengembangan program kesehatan RW Siaga bagi 150 kader
- Terlaksananya perbaikan prasarana lingkungan permukiman seluas 23.370 m²

c. Gerakan Jumat Sehat

- Terlaksananya koordinasi dengan 375 organisasi dalam penanggulangan penyakit DBD
- Terlaksananya koordinasi dengan 190 organisasi dalam kegiatan pemberdayaan perempuan
- Terlaksananya pembinaan, pengawaan dan pengendalian binwasdal program DBD di 10 kecamatan

- Terlaksananya fogging di 135 RW
- Terlaksananya binwasdal surveillance epidemiologi di 15 rumah sakit

d. Peningkatan Pelayanan Terpadu Satu Atap

- Terlaksananya pembinaan dan koordinasi operasionalisasi pelayanan publik
- Terlaksananya koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penanganan sengketa atas pengaduan masyarakat di Jakarta Timur
- Terlaksananya koordinasi IUJK di Jakarta Timur
- Terlaksananya penataan Design Interior ruang pelayanan publik jakarta timur
- Terlaksananya *one day service*

e. Penataan Kawasan Khusus / Unggulan

- Terlaksananya penertiban PMKS
- Terlaksananya penertiban PK-5 liar yang dilakukan
- Terlaksananya pengendalian Ketentraman dan Ketertiban
- Terlaksananya penertiban dan pasca penertiban pada bantaran kali, jalur hijau, kaw. Prioritas dan hunian liar
- Terlaksananya pembangunan 18 unit rambu Lalu Lintas
- Terlaksananya pemeliharaan marka jalan 852 m²
- Terlaksananya pemeliharaan Taman di Kawasan jatinegara seluas 59.109 m²
- Terlaksananya pemeliharaan Jalur di Kawasan jatinegara seluas 49.500 m²
- Terlaksananya pemeliharaan 1.595 pot tanaman dalam pot di Kawasan Jatinegara
- Terlaksananya pemeliharaan Taman di Kawasan sentra primer timur seluas 8.760 m²

- Terlaksananya pemeliharaan Jalur di Kawasan Sentra Primer Timur seluas 15.140 m²
- Terlaksananya pemeliharaan 550 pot tanaman dalam pot di Kawasan Sentra Primer Timur
- Terlaksananya peningkatan dan pemeliharaan jalan sepanjang 10.400 m² di Kawasan Jatinegara
- Terlaksananya pemeliharaan Jalan di Kawasan Sentra Primer Timur seluas 4.500 m²
- Terlaksananya pemeliharaan saluran di kawasan Jatinegara seluas 5.544 m²
- Terlaksananya pemeliharaan saluran di kawasan Pasar Rebo seluas 2.040 m²
- Terlaksananya pemeliharaan saluran di kawasan Sentra Primer seluas 4.584,80 m²

Adapun outcome yang dihasilkan dari pelaksanaan program prioritas di Kota Administrasi Jakarta Timur, antara lain :

- a. Kota Administrasi Jakarta Timur memperoleh penghagaan Adipura
- b. Jumlah RW Kumuh yang berubah menjadi RW Sehat, Nyaman dan Hijau sebanyak 15 RW
- c. Pencapaian incidence rate DBD (200 kasus /100.000 penduduk)
- d. Pencapaian prosentase waktu pelayanan masyarakat menjadi lebih cepat 25%
- e. Berfungsinya sarana publik dengan baik sesuai prosedur pada 3 kawasan khusus (FO Pasar Rebo, Jatinegara, Sentra Primer Timur)

6. Kab. Administrasi Kepulauan Seribu

Program yang telah dilaksanakan dan *output* yang dihasilkan pada pelaksanaan program prioritas wilayah Kepulauan Seribu pada tahun 2010 adalah :

a. Rehabilitasi lingkungan dan pemukiman

- Terlaksananya pembibitan tanaman mangrove pohon dan pemeliharaan tanaman mangrove
- Terlaksananya transplantasi terumbu karang dan pemeliharaan transplantasi terumbu karang
- Terlaksananya pembinaan kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) Daerah Perlindungan Laut dan Ikan Hias, Forum Masyarakat Peduli Lingkungan (FORMAPEL)
- Terlaksananya pembuatan rumpon permukaan
- Terlaksananya perbaikan serta pembangunan Tanggul dan Breakwater Pulau Kelapa Dua, Pulau Karya, Pulau Tidung Besar Sisi Utara, Pulau Untung Jawa Sisi Utara-Timur
- Terlaksananya pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan
- Terlaksananya pendelegasian kewenangan penilaian dokumen UKL/UPL

b. RW Binaan Kumuh

- Terlaksananya pendampingan masyarakat dalam perbaikan kampung di kelurahan pulau panggang dan kelurahan pulau panggang
- Terlaksananya kajian akademik pembangunan IPAL domestik
- Terlaksananya pengadaan Alat TTG daur ulang sampah yang dikelola oleh masyarakat

c. Gerakan Jumat Sehat

- Terlaksananya pengadaan mesin fogging
- Terlaksananya pencegahan dan penanggulangan faktor resiko malaria, pencegahan dan pemberantasan DBD, pemberantasan Vektor, pemeriksaan jentik berkala dan larvasida
- Terlaksananya penemuan dan tatalaksana penderita malaria, filaria dan new emerging disease

- Terlaksananya pembinaan lapangan pemberantasan sarang nyamuk di Kab. Adm. Kep. Seribu

d. Peningkatan Pelayanan Masyarakat

- Terlaksananya pelayanan teruji sistem jemput bola, akta catatan sipil, KTP dan KK
- Terlaksananya pembuatan Lembar Rencana Kota (LRK) P. Kelapa, P. Harapan dan P. Panggang
- Terlaksananya pembentukan Perpustakaan Kelurahan, Taman Bacaan Masyarakat, di Kab.Adm.Kep. Seribu
- Terlaksananya pembangunan Kantor Camat Kepulauan Seribu Utara
- Terlaksananya peningkatan pengetahuan kewirausahaan bagi pelaku usaha kecil di Kep. Seribu
- Terlaksananya sosialisasi tata cara penyelesaian IMB dan ketentuan membangun di kab.Kep. Seribu

e. Penataan Kawasan Khusus / Unggulan

- Terlaksananya Festival Pulau Seribu tahun 2010
- Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkar Luar pada 4 pulau pemukiman (Pulau Pramuka, Pulau Harapan, Pulau Karya, serta Tidung)
- Terlaksananya penarikan Trace dan pematokan jalan dan saluran pada 11 pulau pemukiman (Pulau Sebir, Pulau Harapan, Pulau Kelapa, Pulau Kelapa Dua, Pulau Panggang, Pulau Pramuka, Pulau Lancang, Pulau Pari, Pulau Tidung Besar, Pulau Payung, dan Pulau Untung Jawa)
- Terlaksananya pembuatan Data Citra Satelit Mutakhir (*softcopy* dan *hardcopy*) Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan
- Terlaksananya pembuatan Peta Bathymetri Pulau Panggang dan Pulau Pramuka

- Terlaksananya perencanaan Revitalisasi Pulau Tidung dan Pulau Pari.
- Terlaksananya perbaikan sarana dan prasarana *sea farming*

Adapun *outcome* yang dihasilkan dari pelaksanaan program prioritas di Kab. Administrasi Kepulauan Seribu, antara lain :

- a. Terwujudnya rehabilitasi lingkungan laut dan lingkungan pemukiman
- b. Terwujudnya perbaikan kualitas lingkungan RW Kumuh pada 2 Kelurahan
- c. Menurunnya kasus DBD, malaria, dan penyakit menular lainnya pada 6 kelurahan
- d. Meningkatnya pelayanan teruji sistem jemput bola di bidang kependudukan mencakup pelayanan akta catatan sipil, KTP dan KK
- e. Berkembangnya wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagai kawasan pariwisata dan pengembangan *sea farming* di Kepulauan Seribu

D. PENCAPAIAN MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS (MDG's)

Output yang telah dihasilkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaan program Millenium Development Goals (MDGs) pada tahun 2010 adalah :

Tabel. 4-1
Pencapaian MDGs DKI Jakarta

No	INDIKATOR	PUSAT	DKI JAKARTA	SUMBER
I	TUJUAN 1 : MENANGGULANGI KEMISKINAN DAN KELAPARAN			
	Target 1A : Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk dengan tingkat pendapatan kurang dari USD 1 (PPP) per hari			
	- Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan nasional	13,33%	3,48%	Susenas 2010
	- Indeks Kedalaman Kemiskinan/P1	2,50%	0,57%	Susenas 2009
	Target 1B : Mewujudkan kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua, termasuk perempuan dan kaum muda			
	- Rasio pekerja terhadap penduduk > 15 tahun	61,93%	58,51%	Sakernas 2009
	- Tingkat pengangguran usia muda	22,20%	24,97%	Sakernas 2009
	- Pekerja bebas & keluarga/total penduduk yang bekerja	28,36%	6,80%	Sakernas 2009

No	INDIKATOR	PUSAT	DKI JAKARTA	SUMBER
	Target 1C : Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk yang menderita kelaparan dalam kurun waktu 1990-2015			
	- Konsumsi penduduk termiskin	8,75%	8,08%	Susenas 2009
	- Kecukupan konsumsi kalori (Kkal) < 1400	14,47%	14,63%	Susenas 2009
	- Kecukupan konsumsi kalori (Kkal) < 2000	61,86%	64,44%	Susenas 2010
II	TUJUAN 2 : MENCAPAI PENDIDIKAN DASAR UNTUK SEMUA			
	- Angka Melek Huruf usia 15-24 tahun	99,47%	99,99%	Susenas 2009
	- Angka Melek Huruf penduduk laki-laki usia 15-24 tahun	99,55%	99,98%	Susenas 2009
	- Angka Melek Huruf penduduk perempuan usia 15-24 tahu	99,40%	100%	Susenas 2009
III	TUJUAN 3 : MENDORONG KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			
	- Rasio APM perempuan/laki-laki di SD, MI & Paket A	99,73%	99,49%	Susenas 2009
	- Rasio APM perempuan/laki-laki di SD, MI & Paket B	101,99%	95,67%	Susenas 2009
	- Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA	96,16%	78,85%	Susenas 2009
	- Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi	102,95%	81,09%	Susenas 2009
	- Rasio melek huruf perempuan/laki-laki usia 15-24 tahun	99,85%	100,02%	Susenas 2009
	- Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan (non pertanian)	33,45%	40,23%	Susenas 2009
IV	TUJUAN 4 : MENURUNKAN ANGKA KEMATIAN ANAK			
	Target 4A : Menurunkan Angka Kematian Balita (AKBA) hingga dua per tiga dalam kurun waktu 1990-2015			
	- Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	34	28	SDKI 2007
	- Angka Kematian Balita (AKBA) per 1.000 kelahiran hidup	44	36	SDKI 2007
V	TUJUAN 5 : MENINGKATKAN KESEHATAN IBU			
	Target 5A : Angka kematian Ibu hingga tiga per empat dalam kurun waktu 1990-2015			
	- Proporsi kelahiran yang ditolong oleh Tenaga Kesehatan	77,35%	98,14%*	Susenas 2009
	Target 5B : Mewujudkan Akses Kesehatan Reproduksi Bagi Semua Pada Tahun 2015			
	- Angka Kesuburan Menurut Kelompok Umur 15-19 (ASFR)	35	11	SDKI 2007
	- Penggunaan Kontrasepsi Perempuan Menikah (15-49 tahun) semua cara	61,40%	60,10%	SDKI 2007
	- Penggunaan Kontrasepsi Perempuan Menikah (15-49 tahun) cara modern	57,40%	56,40%	SDKI 2007
	- Cakupan pelayanan Antenatal 1 kunjungan	93,30%	99,50%	SDKI 2007
	- Cakupan pelayanan Antenatal 4 kunjungan	81,50%	97,70%	SDKI 2007
	- Unmet need (kebutuhan keluarga berencana/KB yang tidak terpenuhi)	9,1	6,9	SDKI 2007
VI	TUJUAN 6 : MEMERANGI HIV/AIDS MALARIA DAN PENYAKIT MENULAR LAINNYA			
	- Angka Kumulatif Kasus HIV/AIDS per 100.000 penduduk	0,87	82,9	KemKes 2010
	- Angka Kumulatif Kasus HIV/AIDS	20.564	2.828	KemKes 2010
	- Prevalensi kasus AIDS per 100.000 penduduk	8,92	31,67	KemKes 2010
	- Angka Penemuan Kasus Baru TB Paru BTA positif (CDR)	73,1	81	KemKes 2010
	- Angka Kesembuhan	82,9	69,5	KemKes 2010

No	INDIKATOR	PUSAT	DKI JAKARTA	SUMBER
VII	TUJUAN 7 : MEMASTIKAN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP			
	- Angka Keberhasilan Pengobatan	91	85,6	KemKes 2010
	- Akses terhadap air minum layak (total)	47,71%	34,81%	Susenas 2009
	- Akses terhadap air minum layak (perkotaan)	49,82%	34,81%	Susenas 2009
	- Akses terhadap air minum tidak layak	45,72%	11,70%	Susenas 2009
	- Akses terhadap sanitasi layak (perkotaan)	69,51%	80,37%	Susenas 2009
	- Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	12,12%	25,1%**	Susenas 2009

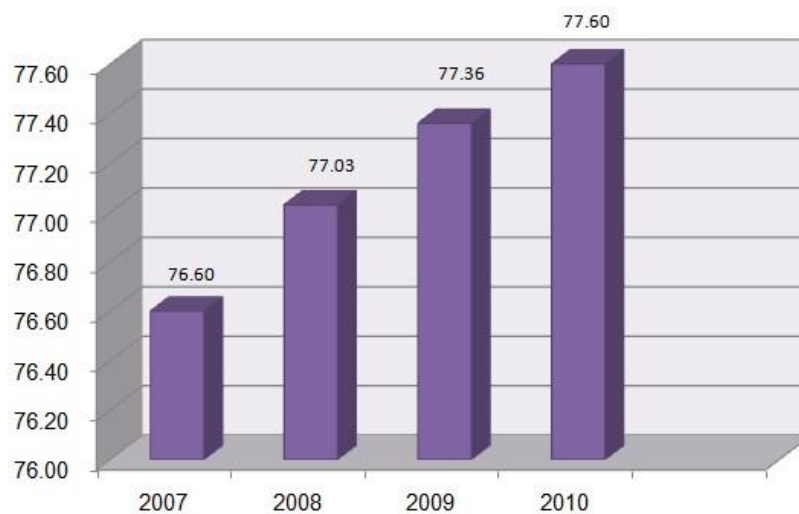
E. DAMPAK PEMBANGUNAN DAERAH

Dampak pembangunan daerah memberikan kontribusi terhadap peningkatan kinerja agregat yang diindikasikan dalam bentuk indeks komposit, sebagai berikut :

1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia mencakup tiga dimensi pembangunan manusia, yakni kesehatan yang diwakili Angka Harapan Hidup (AHH), pendidikan yang diwakili Angka Melek Huruf (AMH) dan Rata-rata Lama Sekolah, serta kemampuan daya beli diperoleh dari Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Riil. Dari ketiga komponen tersebut yang paling signifikan mempengaruhi IPM adalah rata-rata pengeluaran per kapita riil, diikuti rata-rata lama sekolah (pendidikan), dan Angka Harapan Hidup. Sejalan dengan meningkatnya kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, perkembangan IPM DKI Jakarta selama periode 2007-2010 menunjukkan peningkatan, yakni dari 76,60 pada tahun 2007 meningkat menjadi 77,36 pada tahun 2009. Untuk tahun 2010 IPM DKI Jakarta diperkirakan naik menjadi 77,60.

Gambar 4.1
Indeks Pembangunan Manusia DKI Jakarta



Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta

Komposisi masing-masing variabel yang membentuk IPM dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 4-2
Karakteristik Pembentuk IPM

Karakteristik	Satuan	Tahun			
		2007	2008	2009	2010
Angka Harapan Hidup	Tahun	75,80	75,90	76,00	76,2*
Angka Melek Huruf	%	98,83	98,68	99,71	99,30
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	11,16	11,56	11,50	11,56
Pendapatan Per Kapita Disesuaikan	Rp (000)	620,78	625,70	627,46	Na
IPM		76,60	77,03	77,36	77,60

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta

Peningkatan pengeluaran riil per kapita penduduk merupakan dampak dari membaiknya ekonomi makro DKI Jakarta. Sedangkan kemajuan di bidang pendidikan, salah satunya disebabkan adanya program wajib pendidikan dasar sembilan tahun. Harapan ke depan, wajib belajar bagi penduduk DKI Jakarta dapat ditingkatkan menjadi 12 tahun. Di bidang kesehatan, angka harapan hidup penduduk DKI Jakarta meningkat seiring dengan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.

Secara nasional IPM DKI Jakarta selama periode 2007-2010 selalu berada di posisi teratas dibandingkan dengan provinsi lain yang ada di

Indonesia. Jika diukur menurut skala internasional, posisi IPM DKI Jakarta berada dalam kategori menengah ke atas (66,00–79,99). Ini menunjukkan bahwa pencapaian hasil pembangunan yang dilaksanakan di DKI Jakarta telah berhasil menempatkan manusia sebagai titik sentral pembangunan.

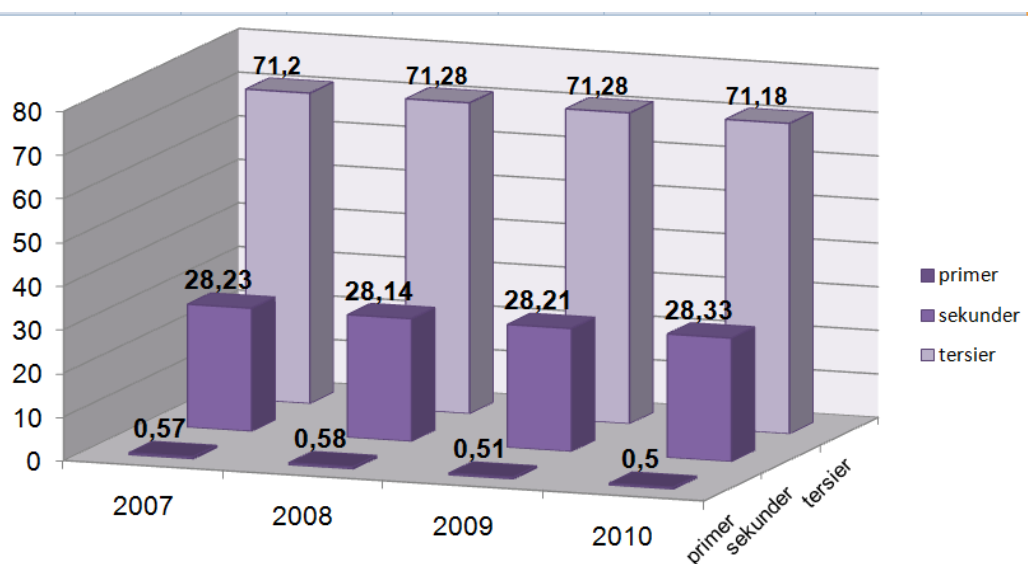
2. Indikator Ekonomi Makro

1) Ekonomi

a) Struktur Ekonomi

Perekonomian Jakarta yang digambarkan dengan PDRB atas dasar harga berlaku secara nominal dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu dari Rp 501,8 triliun pada tahun 2006 menjadi Rp 862,16 triliun pada tahun 2010. Dominasi sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, serta sektor keuangan, real estat dan jasa perusahaan dalam perekonomian Jakarta belum tergoyahkan disamping sektor konstruksi dan sektor jasa-jasa.

Gambar 4.2
Distribusi Prosentase PDRB DKI Jakarta
Menurut Sektoral (Persen)



Sebagai tulang punggung perekonomian Jakarta, sektor jasa (tersier) memiliki peranan sebesar 71 persen bila dilihat dari kontribusinya pada PDRB. Pembentuk sektor tersier meliputi sektor perdagangan, hotel, dan restoran yang mempunyai kontribusi terhadap perekonomian daerah sekitar 20 persen, sektor jasa keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan sekitar 28 persen dan sisanya diberikan oleh sektor pengangkutan dan komunikasi, serta sektor jasa-jasa lainnya. Ini menunjukkan struktur perekonomian Jakarta sudah mengarah kepada struktur jasa (*service city*).

Penyumbang perekonomian Jakarta lainnya adalah sektor sekunder yang terdiri dari sektor industri pengolahan dan sektor bangunan. Sektor industri pengolahan menyumbang sekitar 16 persen sedangkan sektor bangunan sebesar 11 persen. Sementara sumbangan sektor primer di Jakarta hanya sebesar 0,5 persen yang terdiri dari sektor pertanian sebesar 0,1 persen dan sektor pertambangan sebesar 0,4 persen.

Dari sisi penggunaan, dalam kurun waktu 2007-2010 lebih dari 55 persen dari total PDRB digunakan untuk memenuhi permintaan dari luar Jakarta (ekspor ke provinsi lain dan luar negeri). Komponen penggunaan lainnya yang cukup besar adalah konsumsi rumah tangga sekitar 55 persen, impor barang dan jasa sebesar 53 persen serta pembentukan modal tetap bruto atau investasi fisik sebesar 35 persen. Selanjutnya, konsumsi pemerintah sebesar 6 persen.

b) Pertumbuhan Ekonomi Secara Sektoral

Pertumbuhan ekonomi secara sektoral memperlihatkan sektor-sektor unggulan (yang mempunyai peran dominan dalam perekonomian Jakarta) seperti: sektor keuangan, real estat dan jasa perusahaan; sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor industri pengolahan; sektor jasa-jasa mengalami pertumbuhan yang relatif stabil. Sementara sektor konstruksi dalam lima tahun terakhir mengalami pertumbuhan relatif cepat dibandingkan sektor-sektor

lainnya. Percepatan pertumbuhan sektor bangunan didorong juga oleh pembangunan fisik yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, seperti pembangunan KBT, *fly over*, *under pass*, rumah susun dan pembangunan sarana busway, yang semuanya masuk ke dalam *dedicated program*. Demikian pula dengan pembangunan pusat-pusat bisnis dan pemukiman elit (apartemen atau kondominium) yang dilaksanakan oleh pihak swasta.

Sektor pengangkutan dan komunikasi selama lima tahun mengalami pertumbuhan fenomenal, yakni mampu tumbuh sekitar 14 persen per tahun. Maraknya penggunaan telepon seluler memberikan dampak yang sangat besar terhadap pertumbuhan sub sektor komunikasi.

Pada tahun 2010, pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor pengangkutan dan komunikasi yaitu sebesar 14,75 persen, kemudian diikuti oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 7,29 persen, sektor konstruksi sebesar 7,08 persen, sektor jasa-jasa sebesar 6,58 persen, sektor listrik, gas, dan air bersih sebesar 5,64 persen, sektor keuangan, real estat, dan jasa perusahaan dengan pertumbuhan 4,21 persen, sektor industri pengolahan sebesar 3,63 persen, sektor pertanian dengan pertumbuhan 1,70 persen, serta sektor pertambangan dan penggalian dengan pertumbuhan sebesar 1,49 persen.

Sementara dari sisi penggunaan, pertumbuhan ekonomi Jakarta secara dominan masih didorong oleh konsumsi rumah tangga dan ekspor barang dan jasa. Selama lima tahun terakhir, komponen konsumsi rumah tangga mengalami peningkatan, demikian juga ekspor barang dan jasa.

Pada Tahun 2010 pembentukan modal tetap bruto meningkat sebesar 8,81 persen, impor naik sebesar 8,1 persen, ekspor meningkat 7,3 persen, konsumsi rumah tangga yang meningkat 6,34 persen, dan konsumsi pemerintah mengalami pertumbuhan terendah yakni sebesar 0,73 persen.

c) Laju Inflasi

Dalam lima tahun terakhir laju inflasi DKI Jakarta hampir selalu berada di bawah nasional, kecuali pada tahun 2008 sedikit lebih tinggi dari nasional. Inflasi Tahun 2010 sebesar 6,21 persen, lebih tinggi bila dibandingkan tahun 2009 yang hanya sebesar 2,34 persen. Berbeda dengan tahun 2009 yang sepanjang tahun pemerintah tidak membuat kebijakan yang dapat mengganggu stabilitas harga, di tahun 2010 pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan antara lain menaikkan harga tarif dasar listrik (TDL) rata-rata sebesar 18 persen dan juga biaya pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) pada Juli 2010.

Hal lainnya yang cukup berpengaruh adalah kondisi cuaca yang relatif buruk bahkan tidak dapat terprediksi selama tahun 2010. Musim hujan berkepanjangan dan kondisi kemarau basah menyebabkan sektor pertanian tidak dapat berproduksi maksimal, bahkan di beberapa daerah mengalami gagal panen, hal ini selanjutnya mendorong harga pokok pangan meningkat.

d) PDRB Per Kapita

PDRB Per Kapita sebagai gambaran tingkat kemakmuran penduduk suatu wilayah secara kasar. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku selama empat tahun mengalami kenaikan, yakni dari Rp 62,5 juta pada tahun 2007 menjadi Rp 89,9 juta pada tahun 2010. Jika dihitung rata-rata selama periode 2007-2010 pertumbuhan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku adalah sebesar 12,63 persen.

PDRB per kapita secara riil dapat dilihat dari PDRB Per kapita atas dasar harga konstan. Dalam periode 2007-2010 rata-rata pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2000 sebesar 4,28 persen.

e) Koefisien Gini

Koefisien Gini di DKI Jakarta selama periode 2007-2010 relatif stabil. Kondisi ini menunjukkan perubahan distribusi pendapatan DKI Jakarta relatif tidak berubah, namun demikian, ketimpangan pendapatan yang terjadi di DKI Jakarta masih dalam kategori ketimpangan rendah, yaitu 0,36 pada tahun 2006 dan 0,38 pada tahun 2010. Hal ini didukung pula oleh kriteria ketimpangan Bank Dunia, 40 persen penduduk berpendapatan rendah di DKI Jakarta menikmati lebih dari 17 persen total pendapatan. Ini mengindikasikan bahwa pembangunan di DKI Jakarta juga dinikmati oleh masyarakat ekonomi lemah.

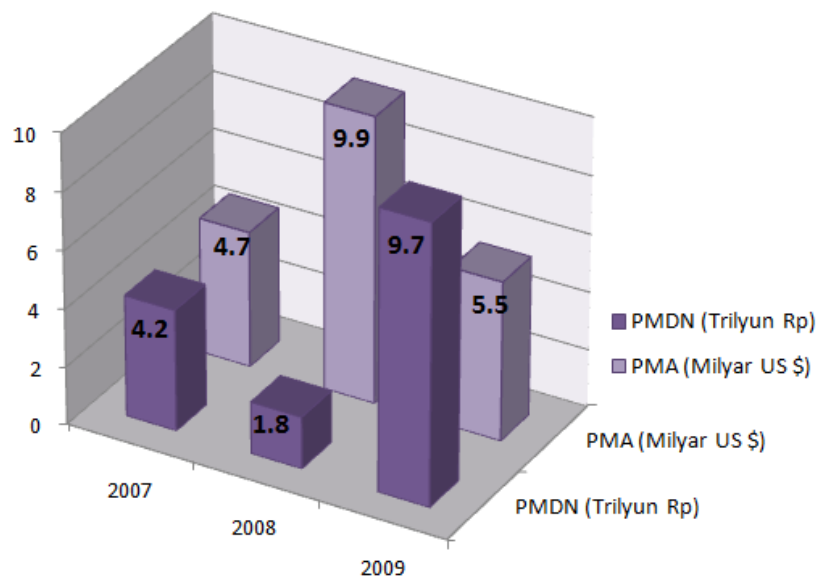
Menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan visi pembangunan DKI Jakarta. Kesejahteraan yang dinikmati oleh semua orang adalah suatu cita-cita yang ingin dicapai. Salah satu upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mempersempit ketimpangan pendapatan antara yang kaya dan yang miskin, adalah dengan melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pendapatan penduduk khususnya penduduk miskin.

2) Investasi

Realiasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) pada tahun 2009 sebesar Rp. 9,69 trilyun, meningkat sangat tajam hampir empat kali lipat dari tahun 2008 yang sebesar Rp. 1,84 trilyun.

Sebaliknya realisasi penanaman modal asing (PMA), menurun sebesar minus 44,5 persen dibanding tahun 2008, dari 9,93 milyar dolar Amerika menjadi 5,51 milyar dolar Amerika. Namun dibandingkan pada tahun 2007, nilai investasi di DKI Jakarta mengalami kenaikan baik PMDN maupun PMA, masing-masing sebesar 129,8 persen dan 25,8 persen.

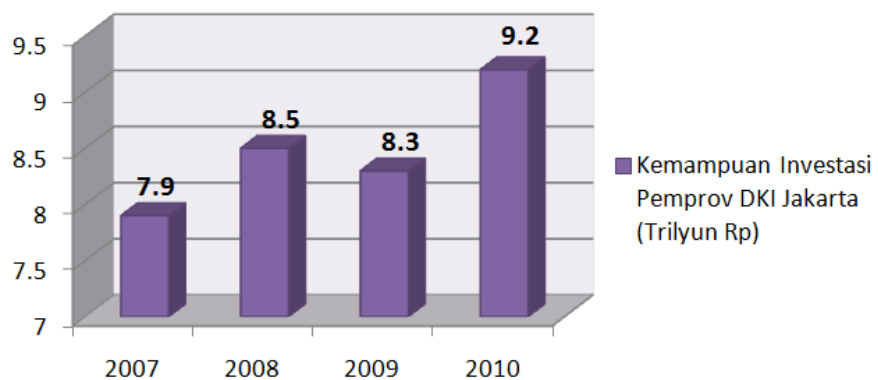
Gambar 4.3
Nilai Investasi di Provinsi DKI Jakarta



Sumber : Jakarta Dalam Angka 2010

Kempampuan investasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2010 sebesar Rp. 9,2 Trilyun atau meningkat sebesar 9,8 persen dari tahun 2009 sebesar Rp 8,3 Trilyun, sebagaimana yang ditunjukkan pada grafik berikut.

Gambar 4.4
Kemampuan Investasi Pemprov DKI Jakarta



Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta

Pada tahun 2010 peranan investasi pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap investasi total tercatat sebesar 3 persen atau naik 0,01 poin dibandingkan persentase tahun 2009, sebagaimana digambarkan dalam grafik berikut.

Gambar 4-5
Peranan Investasi Pemrov DKI Jakarta Terhadap Investasi Total



Sumber : BPS DKI Jakarta

3. Indikator Makro Sosial

1) Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk pada tahun 2010 hasil Sensus penduduk mencapai 9,59 juta, dengan demikian dalam periode 2000-2010 laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,40 persen per tahun. Dalam sepuluh tahun penduduk Jakarta bertambah sebanyak 1,24 juta sehingga kepadatan penduduk meningkat dari 12.603 per km pada tahun 2000 menjadi 14.476 per km pada tahun 2010.

2) Jumlah Keluarga Miskin

Jumlah Keluarga Miskin di DKI Jakarta periode 2007-2010 mengalami penurunan dari 4.48 persen pada tahun 2007 menjadi 3.26

persen pada tahun 2010. Pada tahun 2007 penduduk miskin di DKI Jakarta sebanyak 405,7 ribu jiwa dan pada tahun 2010 menurun menjadi 312,2 ribu jiwa. Penurunan penduduk miskin tertinggi terjadi pada periode 2008-2009, dimana pada periode tersebut penduduk miskin turun sebanyak 56,4 ribu jiwa dan angka kemiskinan turun sebanyak 0,67 poin.

Seiring dengan laju inflasi, Garis Kemiskinan (GK) di DKI Jakarta terus menunjukkan peningkatan. Sejak tahun 2009 GK di DKI mencapai angka di atas 300 ribu per kapita per bulan. Pada tahun 2010 GK sebesar Rp. 331.169,- per kapita per bulan.

Di samping jumlahnya yang terus menurun, kondisi penduduk miskin pun mengalami perbaikan. Kondisi ini tercermin dari Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) adalah rata-rata jarak pengeluaran per kapita per bulan penduduk miskin dengan GK. Sementara itu, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) adalah penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Sejak tahun 2008, P1 terus mengalami penurunan dari 0,72 menjadi 0,45 pada tahun 2010 yang artinya rata-rata jarak pengeluaran penduduk miskin dengan GK semakin dekat. Seperti halnya dengan P1, P2 pun terus mengalami penurunan sejak 2008 dari 0,19 menjadi 0,11 yang artinya penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin semakin menyempit.

Penurunan angka kemiskinan tidak terlepas dari upaya pemerintah provinsi menempatkan masalah kemiskinan sebagai prioritas utama. Hal ini sejalan dengan Visi Pembangunan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang ingin mewujudkan Jakarta yang Nyaman dan Sejahtera untuk Semua.

3) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami penurunan secara perlahan selama periode 2007-2010. Momentum pertumbuhan ekonomi yang terjadi telah menciptakan lapangan kerja yang cukup besar dan sekaligus menurunkan pengangguran terbuka. Dalam bulan Agustus

2009 – Agustus 2010, telah tercipta lapangan kerja baru bagi 571 ribu orang sehingga pengangguran terbuka menurun dari 12,15 persen pada tahun 2009 menjadi 11,05 persen pada tahun 2010.

Berdasarkan komposisi lapangan pekerjaan, sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor perdagangan, jasa-jasa dan sektor industri pengolahan. Kondisi tersebut juga mencerminkan perekonomian DKI Jakarta jika dikaitkan dengan kontribusi sektoral pembentukan PDRB.

Jumlah angkatan kerja meningkat dari 4,96 juta pada tahun 2009 menjadi 5,27 juta pada tahun 2010. Namun karena adanya peningkatan perluasan lapangan kerja, peningkatan angkatan kerja tersebut dapat diantisipasi sehingga dapat menekan angka pengangguran terbuka dari 12,15% pada tahun 2009 menjadi 11,05% pada tahun 2010.

4) Angka Melek Huruf

Secara umum Angka Melek Huruf (AMH) penduduk usia 10 tahun ke atas di DKI Jakarta relatif stabil sepanjang tahun 2006-2010. Pada tahun 2006, AMH penduduk DKI Jakarta sebesar 98,34 persen dan pada tahun 2010 sebesar 99,30 persen.

5) Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah pada jenjang pendidikan dasar cukup menggembirakan, kondisi ini memberikan indikasi bahwa Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) 9 tahun di DKI Jakarta cukup berhasil. Sekitar lebih dari 90 persen penduduk usia 7-15 tahun, yang merupakan "*target goal*" pemerintah dalam program ini, masih aktif bersekolah pada tahun 2009. Pemberian dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) oleh Pemerintah Pusat melalui APBN dan pemberian dana BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui dana APBD, memberikan kontribusi yang cukup besar dalam menaikkan persentase angka partisipasi sekolah pada tingkat pendidikan dasar.

Dalam rangka meningkatkan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu pada pendidikan dasar di Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi mengalokasikan Biaya Operasional Pendidikan (BOP).

Sasaran Penerima BOP adalah seluruh Sekolah Dasar Negeri (SDN), Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), Sekolah Dasar Luar Biasa Negeri (SDLBN), Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa Negeri (SMPLBN), dan SMAN/SMKN. BOP dialokasikan untuk membiayai pengelolaan kurikulum, penunjang kegiatan belajar mengajar, sarana dan prasarana, pengembangan ketenagaan, kesiswaan dan ekstrakurikuler, peningkatan mutu, rumahtangga sekolah, daya dan jasa, ATK dan perlengkapan perkantoran, dan humas.

6) Tingkat Pendidikan

Secara umum tingkat pendidikan penduduk di Jakarta relatif lebih tinggi dibandingkan tingkat pendidikan penduduk di provinsi lain di Indonesia. Keberhasilan ini tidak terlepas dari kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai provinsi pertama di Indonesia yang mengalokasikan lebih dari 20 persen dari total APBD untuk pendidikan. Persentase ini melampaui angka yang diamanatkan oleh Undang-Undang Sisdiknas yaitu sebesar 20 persen.

Keberhasilan pembangunan bidang pendidikan dapat pula dilihat dari indikator tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh penduduk. Dibandingkan dengan kondisi tahun 2006, telah terjadi peningkatan rata-rata pendidikan masyarakat Jakarta yang cukup berarti pada tahun 2009. Hal ini ditandai dengan meningkatnya penduduk yang menamatkan pendidikan di tingkat SLTA ke atas, yaitu dari 47,56 persen pada tahun 2006 menjadi 67,2 persen pada tahun 2010. Khusus untuk yang tamat S1 ke atas naik dari 7,58 persen pada tahun 2006 menjadi 10,8 persen pada tahun 2010.

BAB V

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN DEKONSENTRASI

Tugas Pembantuan merupakan penugasan dari pemerintah kepada daerah dan atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Penyelenggaraan urusan Pemerintah yang dilaksanakan oleh gubernur dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan didanai APBN. Sedangkan Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau kepada Instansi vertikal di wilayah tertentu. Pendanaan dalam rangka Tugas Pembantuan dilaksanakan setelah adanya penugasan Pemerintah melalui kementerian negara/lembaga kepada Kepala Daerah.

Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi yang diterima Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat dijelaskan dalam uraian berikut.

A. DASAR HUKUM TUGAS PEMBANTUAN DAN DEKONSENTRASI

Peraturan yang mendasari pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi adalah :

- Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA

Tugas Pembantuan yang diterima merupakan Tugas Pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian atau Lembaga kepada Pemerintah Daerah (Provinsi).

1. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan (TP) dan Instansi Pelaksana

Untuk tahun 2010, Provinsi DKI Jakarta menerima Tugas Pembantuan dari 4 Kementerian yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Sosial dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Nilai keseluruhan yang diterima sebesar Rp. 6,80 milyar dengan realisasi sebesar Rp. 4,06 milyar. Sedangkan instansi pelaksana (penerima) TP adalah Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta, Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 5.1
Instansi Pemberi dan Pelaksana Tugas Pembantuan
Tahun Anggaran 2010

No.	Kementerian	SKPD Pelaksana	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Pertanian Prov. DKI Jakarta	3.798.000.000	1.437.335.400	37,84
2.	Pertanian	Dinas Kelautan dan Pertanian Prov. DKI Jakarta	1.006.260.000	735.441.800	73,09
3.	Sosial	Dinas Sosial Prov. DKI Jakarta	394.870.000	366.805.000	92,89
4.	Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. DKI Jakarta	1.605.036.000	1.523.922.000	94,95
J U M L A H			6.804.166.000	4.063.504.200	59,72

Sumber : Laporan Tahunan SKPD Pelaksana TP 2010

2. Program dan Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya

Program dan realisasi pelaksanaannya dari tiap-tiap Kementerian pemberi dana Tugas Pembantuan dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Kementerian Kelautan dan Perikanan

- SKPD pelaksana : Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
- Program : Pengembangan Sumber Daya Perikanan
- Realisasi :
 - Tersusunnya desain, dokumen, dan spesifikasi teknis kapal penangkap ikan berkapasitas 30 GT sesuai kriteria teknis, efisiensi operasional dan ramah lingkungan

- Terlaksananya rehabilitasi kolam di Ujung Menteng 3 kolam
- Terlaksananya pengadaan induk ikan air tawar untuk konsumsi 480 ekor
- Terlaksananya pengadaan pakan ikan kerapu 960 kilogram
- Terlaksananya pengadaan obat-obatan
- Terlaksananya pengadaan induk ikan hias (koi) 5 ekor
- Terlaksananya pengadaan *genset stationary* 1 unit
- Terlaksananya pengadaan filter air laut 1 unit
- Terlaksananya pengadaan pompa 2 unit
- Terlaksananya sosialisasi PNPM mandiri 50 orang peserta
- Terlaksananya lokakarya evaluasi kegiatan PNPM mandiri
- Tersalurkannya bantuan sosial kepada kelompok budidaya ikan sebanyak 60 orang

b. Kementerian Pertanian

- SKPD pelaksana : Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
- Program : Pengembangan Sumber Daya Perikanan
- Realisasi :
 - Tersusunnya peta kerawanan pangan di Provinsi DKI Jakarta dan Kabupaten Kepulauan Seribu
 - Terlaksananya monitoring kegiatan ketahanan pangan di Provinsi DKI Jakarta dan Kabupaten Kepulauan Seribu
 - Terlaksananya kegiatan pembinaan, dan pendampingan kegiatan pengembangan Desa Mandiri Pangan di Provinsi DKI Jakarta
 - Terlaksananya kegiatan pemberdayaan gerakan penganekaragaman konsumsi pangan dan gizi

c. Kementerian Sosial

- SKPD pelaksana : Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
- Program : Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial
- Realisasi :

- Terlaksananya penyediaan jumlah persediaan makanan di gudang-gudang penanggulangan bencana untuk Provinsi DKI Jakarta dan Kabupaten Kepulauan Seribu
- Terlaksananya dukungan administrasi kegiatan selama 12 bulan

d. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

- SKPD pelaksana : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta
- Program :
 - Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
 - Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
- Realisasi :
 - Terlaksananya administrasi kegiatan pengembangan sistem informasi manajemen
 - Terbinanya program dan rencana kerja tahunan
 - Terlaksananya pengelolaan sistem akuntansi pemerintahan (SAP)
 - Tersusunnya pengelolaan barang milik negara
 - Terlaksananya evaluasi seluruh kegiatan proyek
 - Terlaksananya dukungan administrasi kegiatan kegiatan selama 12 bulan
 - Tersedianya alat-alat penunjang operasional pelatihan dan penyuluhan di Balai Peningkatan Produktivitas Daerah (BPPD) Provinsi DKI Jakarta

C. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN

Tugas Pembantuan yang diberikan berarti bahwa Pemerintah Provinsi memberikan Tugas Pemerintahan kepada Pemerintahan Kota/Kabupaten. Provinsi DKI Jakarta merupakan Daerah Otonom yang didalamnya tidak dibagi lagi dalam Kota/Kabupaten Otonom. Dalam pelaksanaannya Provinsi DKI Jakarta tidak memberikan Tugas Pembantuan kepada Pemerintahan Kota/Kabupaten.

D. DEKONSENTRASI

Dana Dekonsentrasi merupakan dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.

1. Instansi Pemberi Dekonsentrasi dan Instansi Pelaksana

Untuk tahun 2010, Provinsi DKI Jakarta menerima Dekonsentrasi dari 15 Kementerian dan 1 Badan yaitu :

- 1) Kementerian Dalam Negeri
- 2) Kementerian Pertanian
- 3) Kementerian Kehutanan
- 4) Kementerian Kelautan dan Perikanan
- 5) Kementerian Perindustrian
- 6) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- 7) Kementerian Pendidikan Nasional
- 8) Kementerian Kesehatan
- 9) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- 10) Kementerian Sosial
- 11) Kementerian Koperasi dan UKM
- 12) Kementerian Perdagangan
- 13) Kementerian Pemuda dan Olah Raga
- 14) Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata
- 15) Kementerian Perumahan Rakyat
- 16) Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

Nilai keseluruhan Dana Dekonsentrasi yang diterima oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 1,05 triliun dengan realisasi sebesar Rp 1,01 triliun atau 96,42 persen, yang dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 5.2
Nilai Dana Dekonsentrasi yang Diterima DKI Jakarta
Tahun Anggaran 2010

No.	Kementerian	SKPD Pelaksana	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	Kementerian Dalam Negeri	Sekretariat Daerah Prov. DKI Jakarta	160.000.000	153.488.500	95,93
2	Kementerian Pertanian	Dinas Kelautan dan Pertanian Prov. DKI Jakarta	7.971.009.000	5.768.098.128	72,36
3	Kementerian Kehutanan	Dinas Kelautan dan Pertanian Prov. DKI Jakarta	1.397.078.000	902.074.680	64,57
4	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Pertanian Prov. DKI Jakarta	4.850.833.000	3.981.483.700	82,08
5	Kementerian Perindustrian	Dinas Perindustrian dan Energi Prov. DKI Jakarta	700.000.000	368.309.150	52,62
6	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Perindustrian dan Energi Prov. DKI Jakarta	1.000.000.000	800.597.000	80,06
7	Kementerian Pendidikan Nasional	Dinas Pendidikan Prov. DKI Jakarta	984.041.465.000	961.457.267.426	97,70
8	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan Prov. DKI Jakarta	8.312.864.000	6.688.526.064	80,46
9	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. DKI Jakarta	11.838.363.000	9.761.158.260	82,45
10	Kementerian Sosial	Dinas Sosial Prov. DKI Jakarta	11.103.379.000	6.510.209.125	58,63
11	Kementerian Negara Koperasi dan UKM	Dinas Koperasi,UMKM dan Perdagangan Prov. DKI Jakarta	2.928.294.000	2.881.773.697	98,41
12	Kementerian Perdagangan	Dinas Koperasi,UMKM dan Perdagangan Prov. DKI Jakarta	1.491.700.000	552.721.000	37,05
13	Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga (092)	Dinas Olah Raga dan Pemuda Prov. DKI Jakarta	5.396.085.000	5.366.462.800	99,45
14	Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Prov. DKI Jakarta	1.843.000.000	986.606.800	53,53
15	Kementerian Negara Perumahan Rakyat	Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Prov. DKI Jakarta	712.854.000	568.572.350	79,76
16	Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (068)	Badan Pemberdayaan Masy. Perempuan dan Keluarga Berencana Prov. DKI Jakarta	6.633.975.000	6.022.914.661	90,79
J U M L A H			1.050.380.899.000	1.012.770.263.341	96,42

Sumber : Laporan Tahunan SKPD Pelaksana TP 2010

2. Program dan Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya

Program dan realisasi pelaksanaannya dari tiap-tiap Kementerian pemberi dana Dekonsentrasi dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Kementerian Dalam Negeri

- SKPD pelaksana : Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta (Biro Tata Pemerintahan)

- Program : Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Daerah
- Realisasi :
 - Terlaksananya koordinasi dan monitoring pelaksanaan dekonsentrasi selama 4 triwulan
 - Tersusunnya laporan tahunan pelaksanaan dekonsentrasi selama 4 triwulan

b. Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan

- SKPD pelaksana : Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
- Program : Peningkatan Ketahanan Pangan
- Realisasi :
 - Terlaksananya sosialisasi penanganan dan pemasaran komoditas pasca panen
 - Terlaksananya penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)
 - Terlaksananya pembinaan, koordinasi dan pelaporan dana dekonsentrasi
 - Terlaksananya sosialisasi pembinaan dan pengembangan sistem usaha perikanan
 - Terlaksananya peningkatan mutu dan pengembangan pengolahan hasil perikanan
 - Terlaksananya pengendalian organisme pengganggu tanaman, penyakit hewan, karantina dan peningkatan keamanan pangan

c. Kementerian Perindustrian

- SKPD pelaksana : Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
- Program : Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

- Realisasi :
 - Terlaksananya kegiatan sosialisasi pembinaan industri kecil dan menengah di Jakarta

d. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

- SKPD pelaksana : Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
- Program : Pembinaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
- Realisasi :
 - Terlaksananya penyusunan data statistik tentang kegiatan pertambangan di DKI Jakarta
 - Terlaksananya inventarisasi potensi bahan galian
 - Terlaksananya dukungan administrasi kegiatan selama 12 bulan

e. Kementerian Pendidikan Nasional

- SKPD pelaksana : Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
- Program : - Pendidikan Anak Usia Dini
- Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
- Pendidikan Non Formal
- Realisasi :
 - Terlaksananya perluasan dan peningkatan mutu TK
 - Terlaksananya pembinaan, koordinasi dan pelaporan kegiatan
 - Terlaksananya Bantuan Operasional Sekolah
 - Terlaksananya perluasan dan peningkatan mutu SD, SMP dan SMA
 - Terlaksananya bantuan operasional manajemen mutu sekolah
 - Terlaksananya penyelenggaraan anak usia dini
 - Terlaksananya penyelenggaraan Paket A setara SD
 - Terlaksananya penyelenggaraan Paket B setara SMP

- Terlaksananya perluasan dan peningkatan mutu pendidikan khusus tingkat dasar
- Terlaksananya penyelenggaraan kursus dan magang
- Terlaksananya pendidikan keaksaraan fungsional
- Terlaksananya pemberian subsidi tunjangan fungsional guru non PNS
- Terlaksananya pemberian subsidi tunjangan profesi guru

f. Kementerian Kesehatan

- SKPD pelaksana : Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
- Program : Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
- Realisasi :
 - Terlaksananya pendidikan dan pelatihan teknis kesehatan kepada masyarakat
 - Terlaksananya penyusunan, pengkajian dan pengembangan data dan informasi kesehatan
 - Terlaksananya penyusunan/perumusan sistem dan prosedur teknis
 - Terlaksananya sosialisasi dan upaya kesehatan masyarakat
 - Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar termasuk biaya operasional
 - Terlaksananya pendidikan dan pelatihan teknis kesehatan ibu
 - Terlaksananya pelayanan kesehatan anak
 - Terlaksananya pelayanan kesehatan dan perbaikan gizi ibu dan anak

g. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

- SKPD pelaksana : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta
- Program : Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

- Realisasi :
 - Terlaksananya pelatihan kerja berbasis masyarakat
 - Terlaksananya pelatihan pemagangan dalam dan luar negeri
 - Terlaksananya peningkatan dan revitalisasi BLK menjadi lembaga berbasis kompetensi
 - Terlaksananya peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pengawas hubungan industrial
 - Terlaksananya konsolidasi program-program perluasan kesempatan kerja

h. Kementerian Sosial

- SKPD pelaksana : Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
- Program : Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial
- Realisasi :
 - Terlaksananya pemberdayaan sosial keluarga fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya
 - Terlaksananya pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat
 - Terlaksananya pemberdayaan organisasi sosial
 - Terlaksananya pemberdayaan pekerja sosial masyarakat

i. Kementerian Negara Koperasi dan UKM

- SKPD pelaksana : Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
- Program : Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM
- Realisasi :
 - Terlaksananya peningkatan sistem perencanaan dan manajemen koperasi dan UMKM
 - Terlaksananya koordinasi, monitoring dan pelaporan kegiatan dekonsentrasi
 - Terlaksananya pembinaan koperasi dan UMKM di Jakarta

j. Kementerian Perdagangan

- SKPD pelaksana : Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
- Program : Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
- Realisasi :
 - Terlaksananya sosialisasi pengembangan perdagangan dalam negeri
 - Terlaksananya pembinaan pengembangan pasar lelang daerah
 - Terlaksananya dukungan administrasi kegiatan kegiatan selama 12 bulan

k. Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga

- SKPD pelaksana : Dinas Olah Raga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta
- Program : Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
- Realisasi :
 - Terlaksananya pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat berdasarkan cabang olah raga prioritas daerah
 - Terlaksananya perluasan tenaga terdidik untuk pemasyarakatan olah raga
 - Terlaksananya dukungan administrasi kegiatan kegiatan selama 12 bulan

l. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata

- SKPD pelaksana : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
- Program : Pengembangan Nilai Budaya dan Pariwisata
- Realisasi :
 - Terlaksananya pendudukan pengembangan kebijakan pemasaran dan promosi pariwisata daerah

- Terlaksananya dukungan administrasi kegiatan kegiatan selama 12 bulan

m. Kementerian Negara Perumahan Rakyat

- SKPD pelaksana : Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi DKI Jakarta
- Program : Pemberdayaan Komunitas Perumahan
- Realisasi :
 - Terlaksananya pengendalian pelaksanaan kebijakan program pemberdayaan komunitas
 - Terlaksananya monitoring dan pelaporan pelaksanaan program pemberdayaan komunitas
 - Terlaksananya dukungan administrasi kegiatan kegiatan selama 12 bulan

n. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional

- SKPD pelaksana : Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta
- Program :
 - Keluarga berencana
 - Kesehatan reproduksi remaja
- Realisasi :
 - Terlaksananya jaminan pelayanan KB berkualitas bagi keluarga miskin
 - Terlaksananya jejaring pelayanan KB pemerintah dan swasta/non pemerintah
 - Terlaksananya sosialisasi tentang kesehatan reproduksi remaja
 - Terlaksananya sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya partisipasi terhadap kesehatan reproduksi remaja
 - Terlaksananya pembentukan pusat pelayanan kesehatan reproduksi remaja

E. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

1. Permasalahan

- Sistem monitoring kegiatan tugas pembantuan masih manual mengakibatkan data kurang up to date
- Beberapa revisi DIPA turun pada akhir triwulan II atau triwulan III sehingga kegiatan terlambat dijalankan
- Munculnya kegiatan baru pada triwulan IV sehingga kegiatan dilaksanakan tidak optimal

2. Solusi

- Perlu adanya monitoring kegiatan tugas pembantuan secara online karena softwarenya yang disediakan oleh Bappenas masih berupa software offline yang hanya bisa dilihat bila diisi dan diupdate secara manual oleh SKPD
- Keterlambatan turunnya revisi DIPA dan munculnya kegiatan baru hingga mendekati akhir tahun anggaran, belum dapat diatasi karena kewenangan penuh dari Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga)

BAB VI

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

A. KERJA SAMA ANTAR DAERAH/KOTA

1. Kerjasama DKI Jakarta dengan Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Cianjur (Bodetabekjur)

Pada tahun 2010, dianggarkan Hibah sebesar Rp.25.000.000.000,- untuk 9 (sembilan) Kabupaten/Kota tetangga yang berbatasan langsung dengan Provinsi DKI Jakarta, yaitu : Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Kabupaten Cianjur.

Disamping itu, dianggarkan pula bantuan keuangan sebesar Rp.1.500.000.000,- untuk operasional Sekretariat BKSP Jabodetabekjur dan penyusunan kajian akademis mengenai revitalisasi kelembagaan kerja sama antar daerah Jabodetabekjur dan kajian pengelolaan sumber daya air dalam rangka pengendalian banjir Jabodetabekjur.

2. Kerja sama Provinsi DKI Jakarta dengan Provinsi se Jawa-Bali

Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah partisipasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Regional se Jawa-Bali di Bandung, yang menghasilkan deklarasi kesepakatan kerja sama regional se Jawa-Bali dan advokasi ke Pemerintah Pusat dengan isu :

a. Peningkatan Pelayanan Publik

Usulan/Rekomendasi ke Pemerintah untuk :

- Penyesuaian kembali SPM yang telah tersusun sesuai dengan PP 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Fasilitasi implementasi SPM di daerah
- Sosialisasi dan penyusunan standar pelayanan publik

- Sertifikasi ISO pada unit-unit pelayanan publik
- Mengkaji produk-produk hukum terkait dengan pelayanan publik
- Pelembagaan unit pengaduan melalui pembentukan pelayanan komisi publik
- Penerbitan PP yang mengatur pola karier PNS, serta batas usia pensiun (58 Tahun) untuk PNS setara dengan TNI dan POLRI
- Mempercepat pembentukan Komisi Kepegawaian
- Pelaksanaan survey Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)
- Perlu Kebijakan Pemerintah tentang Profesionalisme SDM Pelayanan Publik (a.l Diklat, Jenjang Karier, Kerjasama antar daerah)
- Kebijakan peningkatan Kesejahteraan melalui penghargaan pensiun setara dengan BUMN

b. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur

Usulan/Rekomendasi ke Pemerintah untuk :

- Revitalisasi situ-situ
- Normalisasi sungai yang menjadi urusan pemerintah pusat, pembangunan waduk-waduk strategis
- Dukungan pembuatan sistem informasi banjir
- Pengendalian erosi
- Percepatan Penyesuaian peraturan-peraturan terkait dengan kewajiban Kementerian/Lembaga (K/L) untuk menyusun NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria)
- Membangun infrastruktur irigasi dan rehabilitasi daerah resapan air di kawasan - kawasan budidaya pertanian
- Mendorong Pembangunan waduk – waduk
- Peningkatan alokasi dana untuk pembangunan jalan baru, dan pemeliharaan jalan (jalur lintas selatan Jawa dan Bali Utara, Tengah dan Selatan, Pemantapan Jalur Lintas Utara Jawa)

- Penyusunan Permen tentang sistem jaringan jalan serta pedoman pelaksanaan penetapan pelebaran jalan
- Penyusunan pedoman dan standarisasi serta pembentukan dewan keselamatan transportasi sebagai acuan penyusunan dan pembentukan di daerah
- Percepatan pembangunan penataan lintasan sebidang (Under Pass, Fly Over dan otomasi pintu kereta api)
- Percepatan pembangunan dan revitalisasi angkutan perkotaan dan antar wilayah (pembangunan *Double Track*, revitalisasi jaringan kereta api, pembangunan jalur baru serta *Bus Rapid Transportation*)
- Percepatan penanganan jalan nasional dan penetapan fungsi dan status jalan strategis
- Dukungan bantuan dana dari pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang jalan
- Dukungan alokasi dana sarana dan prasarana pelabuhan penyeberangan
- Penerbitan peraturan pemerintah tentang penerapan pajak progresif, sebagai tindak lanjut Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak daerah dan retribusi daerah
- Sosialisasi ketentuan undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah
- Fasilitasi pemerintah dalam upaya pengoperasian bandara dan pembukaan rute regular
- Pembangunan Bandara Perintis di Jateng, Banten dan Jatim.
- Mengusulkan interkoneksi tol trans jawa dengan Jembatan Selat Sunda (JSS), dalam RPJMN 2010 - 2014 dan RPJP Nasional
- Penerbitan Peraturan Presiden Pengembangan Kawasan Selat Sunda termasuk jembatan selat sunda di dalamnya
- Percepatan penyelesaian pembangunan dan pengembangan aksesibilitas serta infrastruktur wilayah selatan Jawa

- Percepatan pembahasan RUU Ketenagalistrikan yang baru
- Dukungan pembiayaan pembangunan listrik skala kecil dan energi alternatif

c. Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Tata Ruang

Usulan/Rekomendasi ke Pemerintah untuk :

- Percepatan terbitnya peraturan RTRW Jawa Bali dan sosialisasi Juklak/Juknis dari kementerian terkait yang terintegrasi
- Menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang penjabaran UU No. 26/2007, serta peraturan perundangan yang menjabarkan secara konkrit pelaksanaan PP. No. 26/2008 tentang RTRW Nasional.
- Melakukan mediasi dan fasilitasi masalah perbatasan
- Fasilitasi dan segera terbitnya UU tentang perlindungan alih fungsi lahan pertanian / sawah
- Menerbitkan kebijakan yang memberikan kewenangan pengendalian konversi lahan/kawasan strategis kepada Gubernur dalam kesatuan ekologi tata ruang Jawa Bali
- Meningkatkan dukungan dan kebijakan Pemerintah dalam konservasi Sumber Daya Air, antara lain Prokasih yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, keberlanjutan GERHAN dan Dana Rehabilitasi
- Fasilitasi dan koordinasi penanganan dan pengendalian limbah B3 antar lembaga K/L
- Fasilitasi dan dukungan dana pembangunan IPAL Komunal dan IKM

d. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Sosial Dasar

Usulan/Rekomendasi ke Pemerintah untuk :

- Sinkronisasi mengenai penyelenggaraan pendidikan antara pemerintah pusat dan daerah (anggaran dan lokasi)

- Dukungan anggaran untuk percepatan Wajar 9 tahun dan rintisan Wajar 12 tahun disertai upaya peningkatan mutu dan relevansi pendidikan
- Kebijakan pelaksanaan Sertifikasi ISO untuk SMA dan SMK
- Dukungan pembiayaan untuk pencapaian ratio ideal SMK : SMU (70 : 30)
- Dukungan kebijakan Pemerintah untuk dapat memanfaatkan fasilitas umum milik pusat di daerah untuk kepentingan pendidikan
- Menerbitkan pedoman standarisasi penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan.
- Penyusunan kebijakan penambahan dan distribusi tenaga kesehatan
- Peningkatan kerjasama Diklat tenaga kesehatan
- Perbaikan pendataan peserta Jamkesmas dan penambahan kuota
- Penyempurnaan sistem rujukan pelayanan kesehatan di wilayah perbatasan.
- Pemberian bantuan perbaikan gizi masyarakat
- Peningkatan dukungan terhadap gerakan PHBS dan pembangunan Penyehatan Lingkungan Pemukiman (PLP)
- Dukungan peningkatan kualitas sarana prasaranan Puskesmas
- Peninjauan Kembali atau Penjelasan lebih lanjut terhadap Surat Edaran Mendagri Nomor 903/2706/SJ tanggal 8 September 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dalam APBD Tahun 2008
- Tunjangan sertifikasi guru yang akan dialokasikan melalui DAU Kab/Kota. Harapannya, alokasi DAU kab/Kota besarannya ditambah mengikuti tunjangan dimaksud

e. Peningkatan Pembangunan Pertanian dan Ketahanan Pangan

Usulan/Rekomendasi ke Pemerintah untuk :

- Menerbitkan Peraturan Perundangan yang mengatur penetapan lahan sawah abadi terkait dengan RPPK dan Penataan Ruang serta dukungan insentif dan disinsentif guna mengendalikan alih fungsi lahan sawah ke non sawah.
- Dukungan penerapan Teknologi Tepat Guna dan penetapan regulasi pemerintah dalam peningkatan harga dasar produk di bidang pertanian
- Percepatan pelaksanaan Konsolidasi lahan pertanian dan Bantuan land managment integrated system
- Pelaksanakan TOT, diklat, pelatihan, Sekolah Lapang, pendampingan petani
- Penyusunan produk peraturan perundang-undangan tentang pengaturan area penanaman
- Peningkatan perbaikan daerah tangkapan air, peningkatan kualitas dan kuantitas saluran irigasi, antisipasi terhadap ledakan hama penyakit, dan peningkatan daya dukung lahan.
- Dukungan regulasi bagi akses modal usaha di bidang pertanian dan pengembangan jaringan distribusi produk-produk pertanian melalui lembaga koperasi
- Menerbitkan peraturan tentang Lembaga Penjaminan Kredit bagi Koperasi dan UMKM pertanian.
- Fasilitasi dan revitalisasi kelembagaan di bidang pertanian.
- Sosialisasi secara nasional tentang pentingnya kelembagaan dan peningkatan fungsi kelembagaan petani.
- Fasilitasi petani ataupun pengusaha tani melalui kegiatan-kegiatan promosi, temu usaha dengan buyer baik di dalam maupun luar negeri.
- Restrukturisasi kebijakan pemerintah dalam bidang pasar dan tata niaga produk pertanian.

3. Kerja Sama Multilateral Mitra Praja Utama (MPU)

Mitra Praja Utama (MPU) saat ini meliputi 10 Provinsi yaitu Provinsi Lampung, Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi D.I Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mencakup kerjasama dibidang infrastruktur dan lingkungan, kesejahteraan social, perekonomian serta pemerintahan. Dengan subbidang kerjasama antara lain : peternakan, pertanian, perikanan, perindag, kesehatan, perekonomian, pariwisata, kesos, kehutanan, infokom, perhubungan, ke-PU-an, pertambangan, kependudukan dan tenaga kerja. Kerjasama ini bertujuan untuk kerjasama pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

4. Kerja Sama Multilateral Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia(APPSI)

APPSI terbentuk pada tanggal 6 Juni 2000 yang merupakan organisasi kerjasama dan hubungan kemitraan antar pemerintah provinsi serta sebagai penghubung antara pemerintah provinsi dengan pemerintah pusat. Tujuan didirikannya APPSI antara lain :

- a. Mendorong dan memfasilitasi kerjasama antar daerah, antara daerah dengan pihak ketiga, serta badan-badan kerjasama internasional demi terwujudnya laju pertumbuhan antar daerah yang seimbang dan terpeliharanya hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan daerah.
- b. Memberikan dorongan, memfasilitasi dan membantu memberdayakan daerah melalui kegiatan pendidikan dan latihan, penelitian, konsultasi, seminar/lokakarya dan sebagainya dalam upaya meningkatkan kapasitas daerah.

5. Kerja Sama Luar Negeri

a. Program *Sister City*

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menandatangani *Memorandum of Understanding (MoU) Sister City* dengan 21 kota di seluruh dunia. Program *Sister City* yang ada di tahun 2010, antara lain :

- *Enjoy Jakarta Basketball Tournament.*
- *Jakarta International 10K.*
- *Chinese Language Training for International Relations Office* (Program Jakarta-Beijing, dilaksanakan oleh Beijing)
- *International Youth Game* (Program Jakarta-Seoul, dilaksanakan oleh Seoul)
- *Tokyo International Youth Football (U-14) Tournament, Tokyo,*
- *Asia Junior Sport Exchange Program, Tokyo,.*
- *Business Forum, Tokyo.*
- *Hi-Seoul: World Design Cities Summit, Seoul.*
- *Seoul Friendship Fair, Seoul.*
- *Sister City Youth Program, Bangkok.*
- *Sister City Week Fair, Bangkok.*
- *The Training Workshop for Chinese Language Teacher, Beijing.*
- *Friendly Matches of Sister City Beijing, Beijing.*
- *The Forum on Educational Cooperation Among The Sister City of Beijing, Beijing.*
- *1000th Anniversary of Hanoi, Hanoi.*
- *Working Level Meeting Jakarta-Berlin Sister City, Berlin.*
- *Festival of Indonesia, Los Angeles.*
- *Master of Public Administration Program on Urban Administration, Seoul.*
- *2010 International Youth Sport Tournament, Seoul.*
- *Vocational Training Program, Seoul.*

- Seoul 10th Training Workshop for Municipal Officials of Foreign Cities, Seoul.
- Working Level for Sister City Week Fair, Bangkok.
- Chinese Language Training for Foreign Officer, Beijing.

Beberapa kota yang aktif dapat dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 6.2.
Program Sister City DKI Jakarta dengan Kota Lain

NO	KOTA	NASKAH YANG DITANDATANGANI	BIDANG YANG DIKERJASAMAKAN
1.	Seoul, Korea Selatan	<i>Memorandum of Understanding (MoU)</i> tanggal 25 Juli 1984.	1) Sistem Adm. Umum dan Kependudukan. 2) Manajemen dan Perencanaan Kota. 3) Penataan lalu lintas dan transportasi. 4) Pengawasan dan penataan lingkungan. 5) Pembangunan masyarakat. 6) Program kesenian dan kebudayaan. 7) Peningkatan program ketenagakerjaan.
2.	Rotterdam, Belanda	<i>Memorandum of Understanding (MoU)</i> tanggal 1 Agustus 1986	1) Sistem Informasi Manajemen 2) Teknologi Penanganan Sampah padat dan pemusnahan 3) Sampah 4) <i>City Cargo Terminal</i> 5) Bidang-bidang yang disetujui oleh kedua kota.
3.	Tokyo, Jepang	Pernyataan Bersama tanggal 23 Oktober 1989.	1) Manajemen perkotaan 2) kebudayaan. 3) Kesenian. 4) Olahraga dan bidang-bidang lain yang disepakati kedua Pemerintah Kota.
4.	Beijing, RRC	<i>Memorandum of Understanding (MoU)</i> tanggal 4 Agustus 1992	1) Administrasi Perkotaan. 2) Kesehatan Masyarakat. 3) Pembangunan Perkotaan. 4) Manajemen Pariwisata. 5) Industri Kecil dan Kerajinan.
5.	Berlin, Jerman	<i>Memorandum of Understanding (MoU)</i> tanggal 13 April 1994	1) Perencanaan Kota. 2) Angkutan Umum Kota. 3) Air Minum dan Pengelolaan Air Limbah. 4) Perencanaan Pembangunan Perumahan. 5) Ekonomi. 6) Kebudayaan.

NO	KOTA	NASKAH YANG DITANDATANGANI	BIDANG YANG DIKERJASAMAKAN
6.	Bangkok, Thailand	<i>Memorandum of Understanding (MoU)</i> tanggal 21 Januari 2002	1) Perdagangan dan investasi 2) Promosi pariwisata dan manajemen 3) <i>Traffic control</i> 4) Perencanaan perkotaan 5) Sumber daya manusia 6) Administrasi pemerintahan daerah
7.	Moskow, Rusia	<i>Memorandum of Understanding (MoU)</i> tanggal 22 Juni 2007	1) Arsitektur dan Taman Kota 2) Pertamanan dan Monumen Kota 3) Olah Raga, Kebudayaan dan Seni Pertunjukkan 4) Pengelolaan Transportasi Kota 5) Pengelolaan Pariwisata 6) Perdagangan dan Investasi 7) Fasilitasi Program Pertukaran Lembaga Legislatif

Sumber : Biro KDH dan KLN Provinsi DKI Jakarta tahun 2010

b. Keanggotaan dan partisipasi pada organisasi dan event internasional

Selain melaksanakan kerjasama dengan berbagai kota luar negeri melalui *sister city*, Jakarta menjadi penyelenggara Forum pertama *Meeting for Governors and Mayor of Asia Europe Meeting (ASEM)*. Disamping itu, Pemprov DKI Jakarta juga menjadi anggota aktif pada organisasi-organisasi internasional, yaitu:

- *United Cities and Local Government World (UCLG World)*. UCLG adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan pemerintah daerah maupun asosiasi pemerintah daerah dari berbagai daerah. UCLG adalah satu-satunya organisasi pemerintah daerah yang diakui oleh PBB. 10 dari 20 anggota United Nations Advisory Committee of Local Authorities (UNACLA) – badan penasehat pemerintah daerah pertama yang berafiliasi dengan PBB—dinominasikan oleh UCLG. Pada UCLG, Jakarta tidak hanya menjadi anggota biasa, tetapi menjadi pengurus, yaitu sebagai salah

satu Vice President dan sebagai anggota Executive Bureau dan anggota Council.

- *United Cities and Local Government Asia Pacific (UCLG ASPAC)*. UCLG ASPAC adalah salah satu seksi dari delapan seksi yang dimiliki oleh UCLG World, dimana masing-masing seksi memiliki otoritas untuk menjalankan organisasinya sendiri. Jakarta berperan sangat aktif pada UCLG ASPAC, yaitu sebagai Presiden untuk periode 2010 – 2011. Di samping itu, Jakarta juga menyediakan ruang kantor untuk Sekretariat UCLG ASPAC di Jakarta.
- *Asian Network of Major Cities 21 (ANMC21)*, sebuah organisasi pemerintah kota di Asia. Hingga saat ini, ANMC memiliki 11 kota anggota. Sekretariat organisasi ini berada di Tokyo dan didanai oleh Pemerintah Metropolitan Tokyo.
- *Metropolis*, sebuah asosiasi pemerintah kota metropolitan di tingkat internasional yang bertujuan untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan.
- *The Region Network of Local Authorities for The Management of Human Settlement (CITYNET)*.
- *Asia Pacific Cities Summit*.

c. Kerjasama Teknik Luar Negeri

Program kerjasama teknik luar negeri yang dilaksanakan Pemprov DKI Jakarta pada dasarnya adalah dalam rangka implementasi program bantuan luar negeri dalam bentuk hibah (*grant*) yang diberikan oleh negara-negara maju dan lembaga donor kepada pemerintah Republik Indonesia (cq. Setneg).

Program kerjasama teknik luar negeri meliputi:

- 1) Bantuan proyek
- 2) Beasiswa/pelatihan
- 3) Tenaga ahli
- 4) Peralatan

5) Bantuan program kemanusiaan

Realisasi program kerjasama teknik luar negeri tahun 2010, antara lain:

- 1) Program pelatihan/seminar/training internasional
 - Leadership Program for Sustainable Development (oleh KOICA dan APACA)
 - International Training Courses for Overseas Public Officials of Seoul's Sister and Cooperative Cities 2010 (oleh Seoul Metropolitan Government)
 - International Training Courses Solid Waste Management by Community Base Campaign (oleh International Urban Training Center/IUTC)
 - Sustainable Urban Development Strategies (oleh KOICA, IUTC, dan UN-HABITAT)
 - The 10th Training Workshop for Municipal Officials of Foreign Cities (oleh Seoul Metropolitan Government)
 - Officials of Seoul's Sister and Cooperative Cities 2010, Seoul.
- 2) Kerjasama Antisipasi Climate Change dan Pengelolaan Delta dalam C40 dan CDC.
- 3) Rencana kerjasama (tahap Lol) dengan British Council dan Helsinki di bidang industri kreatif.
- 4) Menjadi penyelenggara pertama Forum *Meeting for Governors and Mayors of Asia Europe Meeting* (ASEM)
- 5) Pemanfaatan Tenaga Ahli bidang kerjasama Internasional dari GIZ Jerman, Jakarta.

d. Jasa Ekonomi Luar Negeri

Kerjasama jasa ekonomi luar negeri yang dilaksanakan Pemprov DKI Jakarta pada dasarnya bertujuan selain untuk meningkatkan citra positif kota Jakarta di dunia internasional, juga bertujuan untuk meningkatkan perekonomian kota Jakarta melalui berbagai

kegiatan pameran/promosi dalam bidang pariwisata, perindustrian dan perdagangan serta investasi.

Realisasi kegiatan tahun 2010, antara lain:

- 1) Terlaksananya promosi investasi di 4 negara, yaitu :
 - Foir International D' Alger, Aljazair
 - The 18th China Kunming, China
 - APEC Ease of Doing Business Workshop, Singapura
 - Internasional Trade Fair, Vietnam
- 2) Terlaksananya forum bisnis di 3 negara, yaitu:
 - Madrid, Spanyol
 - Tokyo, Jepang
 - Singapura
- 3) Kegiatan Promosi Luar Negeri Dinas Pariwisata dan Budaya :
 - Arabian Travel Market (ATM) di Dubai
 - International Tourismus Borse (ITB) di Berlin, Jerman
 - International Meeting and Exhibition (IMEX) di Frankfurt, Jerman
 - HI Seoul, Korea
 - Festival Indonesia di Los Angeles, Amerika Serikat
 - Festival Indonesia di Melbourne, Australia
 - World Expo di Shanghai, China
 - China International Travel Mart di Shanghai, China
 - Roadshow (World Travel Market) di Moskow, Rusia

B. KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA TAHUN 2010

Kerjasama daerah dengan pihak ketiga yang dilaksanakan adalah Pemanfaatan Asset yang dilakukan dengan metode sewa asset daerah dan kerjasama asset daerah. Sewa asset daerah yang direncanakan Pemprov memperoleh pendapatan Rp 1.050.000.000 hanya terealisasi Rp.81.000.000 atau 7,71%. Sedangkan kerjasama asset daerah

terrealisasikan sebesar Rp 4.116.565.200 atau 165,82% dari rencana semula sebesar Rp 2.482.625.000. Dengan demikian, kerjasama pemanfaatan asset secara keseluruhan terealisasi sebesar Rp 4.197.565.200 atau 118,82% dari rencana sebesar Rp 3.532.625.000.

C. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL

Dalam rangka penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Daerah, pada tahun 2010, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah melakukan koordinasi dengan instansi vertikal untuk pembahasan beberapa kegiatan strategis antara lain:

1. Pembangunan 6 Ruas Jalan Tol Dalam Kota, akses Pelabuhan Tanjung Priok dan Jalur Lingkar W2N.
2. Penerapan *Electronic Road Pricing (ERP)* yang saat ini masih menunggu payung hukum berupa Peraturan Pemerintah yang mengatur penyelenggaraannya.
3. Persiapan pembangunan MRT, yang pelelangan pekerjaan fisiknya direncanakan akan dilakukan pada tahun 2011, sehingga MRT diharapkan akan dapat beroperasi pada tahun 2016.
4. Persiapan pengembangan kawasan pusat kegiatan ASEAN
5. Penyelesaian pembangunan *Monorail, Loop Line* dan integrasi angkutan antar moda.
6. Persiapan pelaksanaan program *Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI)* yang dibiayai oleh Bank Dunia dan memerlukan penyelesaian payung hukum berkaitan dengan pinjaman daerah.
7. Pembangunan sarana prasarana pengendalian banjir dan drainase
8. Inisiasi pembangunan pabrik air di Jatiluhur untuk mencukupi kebutuhan suplai kebutuhan air bersih Jakarta.
9. Review Master Plan Pengelolaan Air Limbah.
10. Persiapan studi *Metropolitan Priority Area (MPA)*.
11. Rencana pengembangan pelabuhan Tanjung Priok yang direncanakan terpadu dengan kawasan Marunda.

12. Pelaksanaan Studi awal rencana pembangunan *Giant Sea Wall* sebagai bagian dari sistem tata air dan penanggulangan banjir akibat peningkatan air laut pasang.
13. Penyusunan perencanaan pembangunan terpadu jangka panjang, menengah dan tahunan.
14. Penyelenggaraan peringatan hari-hari besar keagamaan, event-event nasional dan internasional.
15. Antisipasi penanganan bencana (banjir/kebakaran) dan ancaman terorisme.
16. Pelaksanaan sterilisasi jalur busway, pengaturan dan monitoring lalu-lintas.
17. Pemungutan pajak pusat yang ada di daerah.
18. Penyelesaian Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Teluk Jakarta dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi DKI Jakarta

D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

Bencana yang intensitas/frekuensinya cukup tinggi, yaitu sebagai berikut:

1. Kebakaran

Pada tahun 2010 terjadi 708 kasus kebakaran dengan kerugian sekitar Rp 207,84 Miliar, korban jiwa 21 orang meninggal dan luka-luka sebanyak 69 orang warga dan 2 orang petugas. Kebakaran meliputi kebakaran pada bangunan perumahan 1.975 unit, bangunan umum dan perdagangan 1.260 unit, bangunan industri 25 unit, kendaraan 70 unit dan lain-lain sebanyak 114 unit.

Penyebab kebakaran sebagian besar dari arus pendek listrik yaitu 474 kasus, kompor meledak 80 kasus, akibat rokok 19 kasus, akibat lampu 9 kasus dan akibat lainnya 126 kasus.

Realisasi upaya pencegahan antara lain:

- a. Kompilasi peraturan dan sumber-sumber yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

- b. Pemeriksaan dan pengawasan bangunan dan lingkungan termasuk akses mobil pemadam kebakaran, sumber air dan tempat berkumpul untuk kepentingan rencana operasional kebakaran.
- c. Pelayanan teknis pencegahan kebakaran kepada masyarakat.
- d. Pembinaan teknis terhadap kegiatan pendataan bangunan dan lingkungan.
- e. Sosialisasi pengamanan rumah, gedung dan bangunan dari bahaya kebakaran.
- f. Pelatihan dan simulasi penyelamatan jika terjadi kebakaran bagi masyarakat maupun pengguna gedung perkantoran.
- g. Pemeriksaan dan pengawasan secara berkala bangunan dan atau lingkungan terhadap potensi kebakaran, sarana keselamatan jiwa, kesiapan sarana pencegahan kebakaran, aksesibilitas petugas pemadam kebakaran dan sistem pengamanan kebakaran.
- h. Pengawasan dan pengendalian tata cara menyimpan dan menggunakan serta mengangkut barang mudah terbakar dan Bahan-Bahan Berbahaya (B3).
- i. Penegakan hukum terhadap pelanggar peraturan penanggulangan bencana kebakaran.
- j. Sosialisasi Perda Nomor 8 tahun 2008 tentang Ketertiban Umum

2. Banjir

Sebagai kawasan yang dialiri oleh 13 sungai besar yang bermuara di teluk Jakarta dan 40% wilayahnya merupakan dataran rendah yang berada di bawah muka air laut pasang, Jakarta merupakan daerah rawan banjir, baik banjir tahunan maupun banjir akibat limpasan air pasang lima tahunan. Pada tahun 2010, tercatat 155 Kelurahan sebagai daerah rawan genangan. Untuk itu upaya pencegahan yang dilakukan, antara lain :

- a. Upaya struktural berupa :
- Pembebasan Tanah Kanal Banjir Timur
 - Pengerukan kali / saluran / drainase
 - Penyelesaian sistem pompa dan pembangunan long storage
 - Pemeliharaan dan pembersihan saluran/kali
 - Pemeliharaan dan rehabilitasi sistem drainase untuk menangani genangan di jalan arteri dan kolektor
- b. Upaya non struktural berupa :
- Sosialisasi pemeliharaan kebersihan lingkungan
 - Kerja bakti kebersihan dengan melibatkan sebanyak mungkin masyarakat
 - Membangun dan memfungsikan sistem peringatan dini dengan memanfaatkan fungsi pintu air sebagai indikator tingkat kesiagaan banjir, seperti pintu air Katulampa, Depok dan Manggarai
 - Koordinasi dan siaga banjir lintas sektoral
 - Sinkronisasi perencanaan tata ruang di kawasan Jabodetabekjur

BAB VII

PENUTUP

Penyelenggaraan Pemerintahan di Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2010 yang merupakan tahun III dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta tahun 2007-2010, yang dituangkan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2010 memberikan indikasi bahwa hasil-hasilnya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam arti luas.

Berbagai keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Tahun Anggaran 2010 tersebut patut disyukuri, mengingat pencapaiannya diraih atas kerjasama dan partisipasi semua komponen Pemerintahan Daerah, baik jajaran Eksekutif (Pemerintah Daerah), Legislatif (DPRD), maupun masyarakat secara luas. Hasil-hasil yang telah dicapai selama ini mengindikasikan adanya komitmen moral yang kuat dari seluruh elemen Pemerintahan Daerah yang dapat dijadikan pondasi yang kokoh untuk meraih kinerja yang lebih optimal di masa mendatang.

Disamping berbagai keberhasilan yang telah dicapai, tentu saja masih terdapat celah kekurangan yang perlu diperbaiki. Melalui mekanisme penyampaian LKPJ ini diharapkan dapat diperoleh rekomendasi konstruktif dari pihak DPRD dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pembangunan yang akan datang.

Arah pembangunan di masa mendatang adalah menyiapkan Provinsi DKI Jakarta untuk dapat berkembang secara berkelanjutan menuju pada Pemerintah Daerah yang berbasis pada kekuatan sektor Jasa yang katalistik dan kompetitif, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang aman, nyaman dan sejahtera.

Akhirnya, semoga Allah SWT - Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk dan lindungan-Nya kepada kita sekalian.

LAMPIRAN

KEGIATAN PADA SKPD TAHUN 2010 YANG TIDAK TERSERAP

SKPD	No	Kegiatan	Alasan Tidak Terserap
BLUD RS BUDHI ASIH	1	Pengadaan Neuro Magnetic Stimulator	Baru diusulkan pada APBD-P sehingga tidak cukup waktu untuk proses pelelangan dan pelaksanaan
BLUD RS DUREN SAWIT	1	Pengadaan Alat-Alat Kesehatan CT Scan	Baru diusulkan pada APBD-P sehingga tidak cukup waktu untuk proses pelelangan dan pelaksanaan
	2	Pengadaan alat-alat kesehatan	Harga tidak sesuai dengan harga pasar
	3	Pengadaan Alat Laboratorium Hematology Analyzer	Baru diusulkan pada APBD-P sehingga tidak cukup waktu untuk proses pelelangan dan pelaksanaan
	4	Revisi Master Plan & DED Pengembangan Pelayanan RSKD Duren Sawit	Belum dilaksanakan karena Izin prinsip peruntukan belum ada
DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA	1	Pembebasan Tanah untuk Fasilitas/Sarana Olah Raga Jl. Mangga Besar V RT.008/02 Kel. Mangga Besar Kec. Taman Sari luas 12.265 m2	Baru diusulkan pada APBD-P sehingga tidak cukup waktu untuk proses pelelangan dan pelaksanaan
	2	Rehabilitasi Total Gedung KNPI Provinsi Provinsi DKI Jakarta	Hanya terserap kurang dari 25 %, karena adanya keterlambatan proses penghapusan gedung/bangunan lama.
	3	Pembangunan Stadion Sepak Bola Taman BMW Jakarta	Belum dapat dilaksanakan pembangunannya karena legalitas lahan belum selesai
	4	Rehabilitasi Lapangan Tennis Bulungan Jakarta Selatan	Baru diusulkan pada APBD-P sehingga tidak cukup waktu untuk proses pelelangan dan pelaksanaan
DINAS PENDIDIKAN	1	Pengadaan Multimedia Interaktif Biologi SMU	Tidak dilaksanakan karena kesalahan nomen klatur kegiatan
	2	Iklan Layanan Masyarakat Bidang Pendidikan (PSA)	Baru diusulkan pada APBD-P sehingga tidak cukup waktu untuk proses pelelangan dan pelaksanaan
	3	Talk Show Tentang Pendidikan	Baru diusulkan pada APBD-P sehingga tidak cukup waktu untuk proses pelelangan dan pelaksanaan
	4	Pengadaan Multimedia Pembelajaran Terpadu (Smart Learning) untuk Tingkat SMP	Baru diusulkan pada APBD-P sehingga tidak cukup waktu untuk proses pelelangan dan pelaksanaan
PLANETARIUM DAN OBSERVATORIUM	1	Pengadaan AC Central Planetarium	Baru diusulkan pada APBD-P sehingga tidak cukup waktu untuk proses pelelangan dan pelaksanaan
	2	Pengadaan CCTV	Baru diusulkan pada APBD-P sehingga tidak cukup waktu untuk proses pelelangan dan pelaksanaan
	3	Pengadaan LCD Panorama	Anggaran tidak mencukupi
SUDIN KESEHATAN - JAKBAR	1	Pengadaan Dental Unit untuk Puskesmas	Baru diusulkan pada APBD-P sehingga tidak cukup waktu untuk proses pelelangan dan pelaksanaan
SUDIN KESEHATAN - JAKPUS	1	Alat Hematology Analyzer 8 unit untuk Puskesmas Kecamatan	Tidak dilaksanakan karena alokasi yang tersedia tidak mencukupi untuk mengadakan sesuai yang tercantum pada kegiatan, yakni 8 unit (harga untuk 8 unit senilai Rp.1,6 M)
SUDIN PENDIDIKAN DASAR - JAKPUS	1	Jasa pemeliharaan gedung sekolah dengan anti rayap	Tidak dilaksanakan karena Gedung Sudin Dikdas Pusat sedang diperbaiki
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1	Konsultan Manajemen MRT	Proses lelang internasional dan harus diulang karena jumlah peserta yang ikut lelang tidak memenuhi syarat
	2	Pengadaan Mebelair (kantor Bappeda dan Ruang Pola)	Diusulkan dalam APBD-P, Peserta/rekanan pengadaan mengundurkan diri karena tidak sanggup melaksanakan pekerjaan dalam waktu yang sangat singkat
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN	1	Pengadaan Radio Trunking	Baru diusulkan pada APBD-P sehingga tidak cukup waktu untuk proses pelelangan dan pelaksanaan
	2	Operasionalisasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID)	Tidak dilaksanakan, karena KPID belum terbentuk
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	1	Pengadaan Papan Nama RT Kota Administrasi Jakarta Barat	Sudah dilakukan secara swadaya
	2	Pengadaan meja, kursi dan lemari Kebutuhan Kantor Kelurahan dan Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Barat	Baru diusulkan pada APBD-P sehingga tidak cukup waktu untuk proses pelelangan dan pelaksanaan
	3	Pengadaan Meubelair Kebutuhan Gedung Blok P, R dan S	Baru diusulkan pada APBD-P sehingga tidak cukup waktu untuk proses pelelangan dan pelaksanaan

SKPD	No	Kegiatan	Alasan Tidak Terserap
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	1	Pemasangan Fire Stop Gedung Blok C - D KWK Jaktim	Baru diusulkan pada APBD-P sehingga tidak cukup waktu untuk proses pelelangan dan pelaksanaan
	2	Pemeliharaan Kebersihan dan Perawatan ME Gedung Blok D Kantor Walikota Jakarta Timur	Tidak dilaksanakan, karena gedung kantor belum dipergunakan
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	1	Penggantian Cooler, Condensordan lain-lain AC Sentral Gedung Blok P	Tidak dilaksanakan, karena anggaran tidak mencukupi
SEKRETARIAT DPRD	1	Liputan Kegiatan Dewan	Baru diusulkan pada APBD-P sehingga tidak cukup waktu untuk proses pelelangan dan pelaksanaan
DINAS KEBERSIHAN	1	Pengadaan Kendaraan Street Washer Multi System	Kegiatan tidak dilaksanakan karena semua administrasi teknis peserta sph tidak memenuhi persyaratan
DINAS PEKERJAAN UMUM	1	Pembangunan Jalan Layang Non Tol Kp. Melayu - Tanah Abang (Segmen : Mas Mansyur-Dr. Satrio-Casablanca)	Sebagian tidak terserap karena untuk tahun anggaran 2010 hanya untuk uang muka kerja
	2	Pembebasan Tanah Kali Cakung Lama	Karena proses P2T Jakarta Utara belum selesai
	3	Pembangunan system jaringan CCTV Dinas PU untuk pengendalian banjir	Jaringan pendukung belum siap
	4	Pembebasan Lahan PT Pulo Mas yang terkena Pembangunan FO Suprpto	Karena masih dalam pembahasan sengketa pembayaran ganti rugi dengan PT. Pulo Mas
	5	Kompensasi tanah TNI AL yang terkena jembatan Blencong	Karena belum ada kesepakatan lokasi dan penetapan harga ganti rugi dengan Lantamal TNI AL
	6	penertiban bangunan sekitar pompa pluit	Proses sosialisasi masyarakat perlu waktu
	7	Penertiban Jalan Tembus Asia Afrika - Teuku Nyak Arief	Anggaran kurang mencukupi
	8	Rebar Locator, Corossion Test, dan Core Drill Trailer	Waktu lelang tidak cukup, karena barangnya dari luar (impor)
	9	Cone Penetration Test	Waktu lelang tidak cukup, karena barangnya dari luar (impor)
	10	Pembebasan Tanah untuk Jalan disamping BPPK Jagakarsa, Jakarta Selatan	Proses administrasi proyek belum selesai
	11	Invent dan pembebasan lahan untuk waduk, Jl. Pinang RT 001/04 Kel. Cipayung Jakarta Timur	Hasil kajian tidak memungkinkan lokasi tersebut dibuat waduk
DINAS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN	1	Perencanaan / Master Plan TPU Rorotan	Belum ada SK Gub tentang Penetapan lokasi untuk menjadi TMP, masih memerlukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat
	2	Pembangunan Taman RTH Interaktif Jl. Manunggal II RT 011 RW 006	Kesalahan dalam administrasi proyek
	3	Pembangunan Taman diatas TPO Stasiun Kota (Kawasan Kota Tua)	Didanai melalui program kemitraan (CSR) dengan Bank Mandiri
	4	Penataan Eks SPBU 34-14304 Jl. Enim/Tongkol, Kec.Tanjung Priok, Jakarta Utara	Kegiatan belum bisa dilaksanakan sebelum lahan dibebaskan
	5	Pembebasan Lahan PHU disamping BPPK Jagakarsa Jakarta Selatan	Membutuhkan biaya pengamanan dan pematangan lahan yang tinggi
	6	Penataan Eks SPBU 34-12111 Jl. Mataram Sisi Barat, Jakarta Selatan	Menunggu penyelesaian asset bangunan
	7	Penataan Eks SPBU 34-13207 Jl. Ahmad Yani (Sisi Utara), Jakarta Timur	Peruntukan DAMIJA
	8	Penataan Eks SPBU 34-13204 Jl. Ahmad Yani (Sisi Selatan), Jakarta Timur	Peruntukan DAMIJA
	9	Penataan Eks SPBU 34-10102 Jl. Tanah Abang Timur (ABRI), Jakarta Pusat	Bangunan SPBU belum dibongkar
	10	Pembuatan Patok Batas Kepemilikan Tanah kebun Pisang, Penjaringan, Jakarta Utara	Kondisi lapangan tidak kondusif dan banyak hunian liar
	11	Penataan Eks SPBU 34-11101 Jl. Hayam Wuruk (sisi Selatan), Jakarta Barat	Dalam proses Peninjauan Kembali (PK) keputusan MA
	12	Penataan Eks SPBU 34-11102 Jl. Hayam Wuruk (sisi Utara), Jakarta Barat	Dalam proses Peninjauan Kembali (PK) keputusan MA
	13	Pembangunan Area Demo Monas, Jakarta Pusat	Kajian belum selesai
	14	Pembebasan Tanah untuk RTH di Jl. Moh. Kafi I RT 001/02 Kel. Ciganjur, Kec. Jagakarsa - Jakarta Selatan Luas 924 m2	Dokumen tidak lengkap
	15	Pembebasan Tanah untuk Taman Interaktif Jl. Depnaker Rt.005/Rw. 005 Kel. Makasar, Kec. Makasar, Jak-Tim	Dokumen tidak lengkap
	16	Pembebasan Tanah untuk RTH Jl. Kemang Timur V Kec. Mampang, Jakarta Selatan	Kesalahan administrasi proyek
	17	Pembebasan Tanah untuk PHU Kemang Timur V Kel. Bangka, Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan (2.202 M2)	Kesalahan administrasi proyek
	18	Pembebasan Tanah untuk PHU RW 007 Kel. Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan	Membutuhkan biaya pengamanan dan pematangan lahan yang tinggi
	19	Pembebasan Tanah untuk PHU Jl. Margasatwa RT 007 RW 003, Kel. Pondok Labu, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan (3.737 M2)	Tidak ada akses jalan masuk untuk masyarakat umum

SKPD	No	Kegiatan	Alasan Tidak Terserap
	20	Pembebasan Lahan RTH Jl. Karang Kendal RT 005 RW 008, Kel. Rorotan, Kec. Cilincing, Jakarta Utara	Membutuhkan biaya pengamanan dan pematangan lahan yang tinggi
	21	Pembebasan Tanah untuk PHT Jl. Kemang Timur Raya Kel.Pejaten Barat, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan (3005 M2)	Perlu waktu koordinasi karena terdapat indikasi lahan fasos fasum
	22	Pembebasan Tanah untuk PHU Jl. Madrasah RT 002 RW 012 Kel. Bintaro, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan (300 M2)	Anggaran tidak mencukupi, setelah dilakukan cek lapangan luas + 12.000 m2
	23	Pembebasan Tanah Jl. Mawar Ujung RW 05 Kel. Bintaro Jakarta Selatan (12.500 M2)	Kesalahan administrasi proyek
	24	Pembebasan Lahan RTH Jl. Mufakat, Pondok Rangun, Kel. Cipayung, Jakarta Timur	Membutuhkan biaya pengamanan dan pematangan lahan yang tinggi
	25	Pembebasan Lahan RTH untuk Taman Interaktif Jl. Gotong Royong Blok A No. 8 RT 004 RW 008 Kel. Kapuk Kec. Cengkareng Jakarta Barat (550 M2)	Memerlukan waktu untuk memperjelas kepemilikan
	26	Pembebasan Tanah untuk RTH Cipedak RT 011/09 Kel. Srengseng Sawah Kec. Jagakarsa, Jaksel (1.598 M2)	Dokumen tidak lengkap
	27	Pembebasan Tanah RTH Jl. Kebagusan RT 011/05 Kelurahan Jagakarsa Kec. Jagakarsa Luas 5.500 m2	Dokumen tidak lengkap
	28	Penataan Jalur Hijau Rel Kereta Api Tanjung Priok - Kota	Memerlukan waktu untuk berkoordinasi dengan pemilik lahan/pemerintah pusat/kementrian perhubungan
	29	Pembebasan Tanah Untuk TPU Kampung Rawadas RT 003 RW 003 Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit	Lahan dalam sengketa
	30	Perataan dan Pematatan Tanah dari Eks Galian Situbabakan di TPU Srengseng Sawah, Jakarta Selatan	Pengerukan Situ Babakan belum dilaksanakan
	31	Pembebasan Tanah untuk TMP Rorotan di Kel. Rorotan, Kec. Cilincing, Jakarta Utara	Kajian TMP belum selesai masih berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat.
	32	Pembebasan Lahan TPU Pondok Ranggon Jakarta Timur	Persil terpisah jauh dengan lokasi TPU Pondok Ranggon
	33	Pembebasan Lahan RTH di Kecamatan Makasar Jakarta Timur	Tidak terjadi kesepakatan harga
	34	Pembebasan Tanah untuk Taman Interaktif Jl. Sakti III Blok FF No. 78 Kel. Kemanggisan, Kec. Palmerah, Jak-Bar	Masih dalam penguasaan Kementerian Keuangan RI
	35	Pembebasan Tanah Jl. Jagakarsa Raya RT 001 RW 01 Kel. Jagakarsa, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan (5.400 M2)	Membutuhkan biaya pengamanan dan pematangan lahan yang tinggi
DINAS PERUMAHAN PERMUKIMAN DAN GEDUNG PEMDA	1	Pembebasan Tanah lokasi Rusun Waduk Pluit Jakarta Utara	Lahan tidak bisa dibebaskan, karena proses peningkatan status tanah sampai dengan saat ini belum selesai di BPN
	2	Pembebasan Tanah Lokasi Perbaikan Kampung Terpadu Kota Administratif Jakarta Pusat	Tidak adanya kesepakatan harga dengan warga
	3	Pembebasan Tanah Lokasi Perbaikan Kampung Terpadu Kota Administrasi Jakarta Barat	TTidak adanya kesepakatan harga dengan warga
DINAS TATA RUANG DAN PERTANAHAN	1	Penyusunan Raperda zoning regulation	Tidak bisa dilaksanakan karena RTRW belum dapat diselesaikan
	2	Pelibatan masyarakat dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kec. Prov. DKI Jakarta 2030	Tidak bisa dilaksanakan karena RTRW belum dapat diselesaikan
SUDIN KEBERSIHAN - JAKUT	1	Bersih - bersih sampah pesisir dan muara sungai di teluk Jakarta	Baru diusulkan pada APBD-P sehingga tidak cukup waktu untuk proses pelelangan dan pelaksanaan
Sudin Pertamanan - JAKPUS	1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Khusus	Kegiatan dimatikan, karena berkas administrasi belum selesai
SUDIN PERTAMANAN - JAKSEL	1	Pembebasan tanah untuk RTH di Kel. Pasar Minggu Kec. Pasar Minggu Wailayah Jakarta Selatan.	Bukti kepemilikan belum lengkap
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	1	Penyelesaian Sertifikat Tanah Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	BPK menyarankan untuk tidak dilaksanakan karena proses sertifikasi belum selesai pada tahun 2009
	2	Pengadaan Lemari Arsip Dokumen Asset	Terjadi 2 kali gagal lelang, sehingga tidak cukup waktu untuk pelaksanaannya
	3	Expose pemanfaatan aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Tidak memerlukan APBD karena dilaksanakan oleh BPKP
UPT PUSAT PENYIMPANAN BARANG DAERAH	1	Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Tidak terserap karena keterbatasan waktu proses pelelangan dan pelaksanaanya
DINAS PELAYANAN PAJAK	1	KUDR (Kualitas Udara dalam Ruangan) Pemasangan sistim filter udara non ionisasi	Perubahan kode rekening baru diusulkan pada APBD-P sehingga tidak cukup waktu untuk proses pelelangan dan pelaksanaan
	2	Cleaning Ducting	Perubahan kode rekening baru diusulkan pada APBD-P sehingga tidak cukup waktu untuk proses pelelangan dan pelaksanaan
	3	Perbaikan Instalasi AC Central Kantor SAMSAT Jakarta Timur	Perubahan kode rekening baru diusulkan pada APBD-P sehingga tidak cukup waktu untuk proses pelelangan dan pelaksanaan

SKPD	No	Kegiatan	Alasan Tidak Terserap
	4	Peningkatan Pemahaman Pajak Sejak dini	Terjadi perubahan anggaran pada APBD-P sehingga tidak cukup waktu untuk proses pelelangan dan pelaksanaan
BLUD TRANSJAKARTA BUSWAY	1	Pemeliharaan Mesin Tiket Koridor I	Tidak memerlukan APBD karena direncanakan dilaksanakan oleh Bank DKI
	2	Pengadaan Kartu Tiket Smart Card	Tidak memerlukan APBD karena direncanakan dilaksanakan oleh Bank DKI
DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN	1	Pembebasan Lahan untuk RTH Kehutanan di Jakarta Utara	Harga lahan di atas NJOP
	2	Penyusunan Amdal Kawasan Pelabuhan perikanan Muara Angke	Karena dalam proses lelang tidak ada perusahaan konsultan yang mendaftar
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	1	Pembelian Tanah dan Bangunan Asset PT Jasindo di Kota Tua (Tahap Awal)	Data Pendukung Administrasi legalitas tanah tidak memenuhi syarat dan lokasi masih dikuasai oleh inkopol
DINAS PERHUBUNGAN	1	Pengadaan Armada Bus Sekolah	Rekanan yang mendaftar/memasukan penawaran lelang kurang dari ketentuan (minimal 3 perusahaan). Untuk dilakukan pelelangan ulang, waktu tidak mencukupi
	2	Pembebasan Lahan Depo MRT Lebak Bulus	Kegiatan pembebasan tanah depo MRT Lebak Bulus belum dapat dilaksanakan karena hingga saat ini belum ada fatwa dari BPKP apakah lahan tersebut merupakan fasos - fasum atau bukan
	3	Pengadaan Kendaraan Patroli Sepeda Motor Besar	Pemenang lelang tidak sanggup merealisasikan pengadaannya (wan prestasi)
	4	Pemeliharaan Saluran TB Pulogadung	Rekanan yang mendaftar tidak ada yang lulus evaluasi penawaran. Untuk dilakukan pelelangan ulang waktu tidak mencukupi
UPT Balai Budidaya Perikanan	1	Rehap hatchery	Perubahan kode rekening baru diusulkan pada APBD-P sehingga tidak cukup waktu untuk proses pelelangan dan pelaksanaan
UPT Balai Proteksi Tanaman	1	Pengadaan Bio Pestisida & Agens Hayati	Baru diusulkan pada APBD-P sehingga tidak cukup waktu untuk proses pelelangan dan pelaksanaan
UPT Balai Tekstil	1	Pembangunan pagar lingkungan UPT Balai Tekstil	Perubahan kode rekening baru diusulkan pada APBD-P sehingga tidak cukup waktu untuk proses pelelangan dan pelaksanaan
UPT Pusat Perkayuan	1	Rehab Bangunan dan Kantor TPK Pondok Pinang UPT. Pusat Perkayuan	Perubahan kode rekening baru diusulkan pada APBD-P sehingga tidak cukup waktu untuk proses pelelangan dan pelaksanaan
UPT Taman Margasatwa Ragunan	1	Tukar menukar satwa dengan LK Dalam dan Luar Negeri	Kebun Binatang Luar Negeri tidak bisa menyediakan hewan jerapah yang akan ditukar